



KANWIL DJPb
PROVINSI LAMPUNG

KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG

Triwulan I 2024

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



TIM PENYUSUN

Pengarah

Mohammad Dody Fachrudin
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab

Farhan Fatnanto
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim

Gwen Adhitya Amalkhan
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun

Silvi Yuniar
Aulia Resta Nuryantie
Romadhona Puspita Sari
Edwin Hayadi
Lily Radhiya Ulfa

Anggota Tim

Ponco Priyono
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
Ahmad Sapriannoor
Kepala Seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B



*New DJPb
in Town*

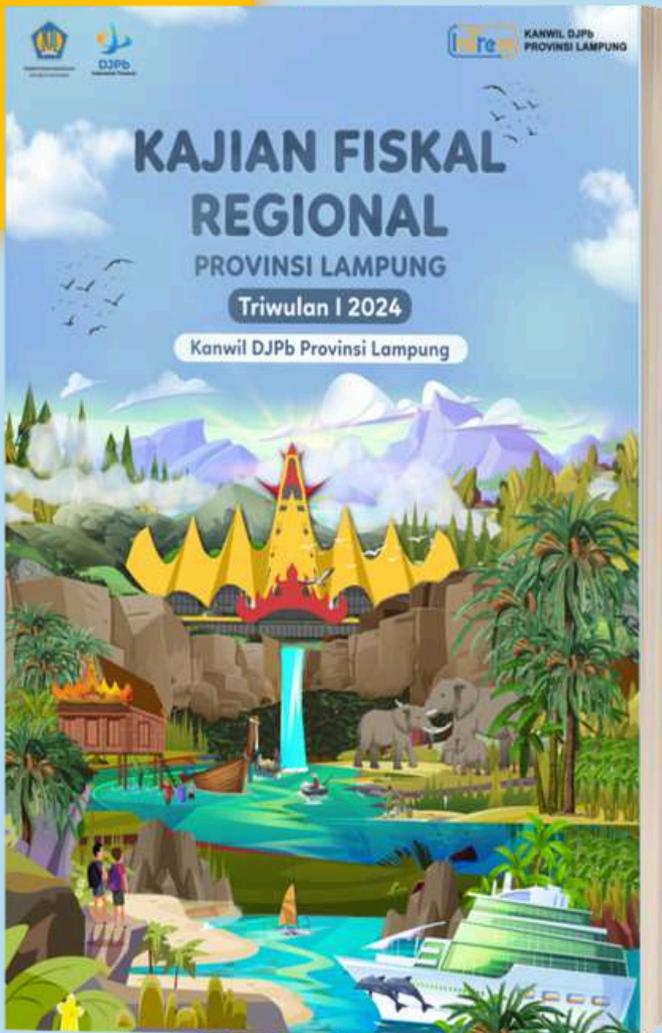
HANDAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I 2024 SECARA ONLINE



SCAN ME!



Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

<https://bit.ly/KFRLampung>



KRITIK DAN SARAN:

**Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung**

Email: pa2.kanwildjpb.lampung@gmail.com



Kata Pengantar

Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Di era yang penuh dengan volatilitas dan ketidakpastian, memahami denyut nadi ekonomi dan fiskal regional menjadi kian penting. Ibarat sebuah kompas di tengah lautan informasi, Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I 2024 hadir untuk mengantarkan para pemangku kepentingan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kondisi makroekonomi, implementasi kebijakan fiskal, dan progress pembangunan di regional Lampung. KFR Triwulan I 2024 merupakan persembahan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, sebuah komitmen teguh untuk mendukung arah kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengantarkan Lampung menuju masa depan yang lebih berjaya.

Di balik terwujudnya KFR, terjalin kolaborasi apik dari berbagai pihak, seperti orkestra yang memainkan simfoni pembangunan Lampung. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Lampung, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, *Regional Economist* dan *Local Experts*. Serta, kolaborator utama Kemenkeu Satu Regional Lampung yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.



Kata Pengantar

Lebih dari sekadar kumpulan angka dan analisis, KFR Triwulan I 2024 ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dan kebijakan fiskal sehingga lebih tepat sasaran. Kami percaya, dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, Lampung akan mampu melangkah maju dengan mantap menuju masa depan yang sejahtera. KFR bukan hanya milik Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

KFR ini adalah milik kita bersama, milik seluruh pemangku kepentingan di Lampung. Kami mengundang semua pihak untuk berkolaborasi, memberikan masukan, kritik konstruktif, dan saran untuk menyempurnakan KFR di masa depan. Terakhir, dengan kerendahan hati, semoga setiap kontribusi kita bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bandar Lampung, 31 Mei 2024
Kepala Kanwil DJPb
Perbendaharaan Provinsi Lampung

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
EXECUTIVE SUMMARY	xiv
BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI.....	1
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
1.1.2. Suku Bunga.....	9
1.1.3. Inflasi.....	10
1.1.3.1. Inflasi Bulanan	10
1.1.3.2. Inflasi Tahunan	13
1.1.3.3. Pengendalian Inflasi.....	15
1.1.4. Nilai Tukar	17
1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN	18
1.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	18
1.2.2. Nilai Tukar Petani (NTP).....	22
1.2.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	26
BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL.....	28
2.1. PELAKSANAAN APBN.....	28
2.1.1. Pendapatan Negara.....	29
2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan.....	29
2.1.1.2. Analisis <i>Tax Ratio</i>	32
2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	32
2.1.1.4. Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan Negara.....	33
2.1.2. Belanja Negara	33
2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP).....	34
2.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja	34
2.1.2.3. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga	35
2.1.2.4. Berdasarkan Fungsi	36



2.1.2.5. Belanja Pemerintah Pusat Per kapita.....	37
2.1.2.6. Kontribusi BPP Terhadap PDRB.....	37
2.1.3. Transfer ke Daerah	38
2.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)	39
2.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK).....	40
2.1.3.3. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	41
2.1.3.4. Dana Desa	42
2.1.4. Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Negara.....	43
2.1.5. Surplus/Defisit APBN.....	43
2.1.6. Capaian Output Sektoral	43
2.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah	44
2.2. PELAKSANAAN APBD	45
2.2.1. Pendapatan Daerah.....	46
2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
2.2.1.2. Pendapatan Transfer.....	51
2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52
2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	52
2.2.1.5. Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan	53
2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan	54
2.2.2. Belanja Daerah	55
2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja	55
2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi	58
2.2.2.3. Berdasarkan Urusan	58
2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB	59
2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita.....	59
2.2.2.6. Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Daerah	60
2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja	61
2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD	61
2.2.4. Pembiayaan Daerah	62
2.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD	62
2.3.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian.....	62
2.3.2. Pendapatan Konsolidasian	63
2.3.2.1. Proporsi dan Perbandingan	63
2.3.3. Belanja Konsolidasian.....	63





2.3.3.1. Proporsi dan Perbandingan	63
2.3.3.2. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	63
2.3.3.3. Belanja Perkapita Konsolidasi	63
2.3.4. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian	64
2.4. ANALISIS NERACA PEMERINTAH PUSAT-TINGKAT WILAYAH	64
2.4.1. Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas	64
2.4.2. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap	65
2.4.3. Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN	66
BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: PROFILING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM).....	68
3.1. PENDAHULUAN	68
3.2. KATEGORI UMKM	68
3.2.1. UMKM.....	68
3.2.2. Klasterisasi UMKM Naik Kelas	70
3.3. HASIL PROFILING UMKM.....	71
3.3.1. Proses Profiling	72
3.3.2. Hasil Profiling	73
3.3.2.1. Aspek Keuangan	73
3.3.2.2. Aspek Pemasaran	73
3.3.2.3. Aspek Legalitas Usaha	74
3.3.2.4. Aspek Kesiapan Ekspor	74
3.3.3. Deskripsi UMKM yang mendapatkan pemberdayaan	74
BAB VI ANALISIS TEMATIK: EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.....	78
4.1. PENDAHULUAN	78
4.2. ANALISIS PERKEMBANGAN BELANJA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	78
4.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Infrastruktur Konektivitas di Lampung.....	78
4.2.2. Belanja Pemerintah Daerah Pendukung Infrastruktur Konektivitas di Lampung.....	81
4.3. ANALISIS ATAS CAPAIAN INDIKATOR INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	82
4.3.1. Capaian Pembangunan Konektivitas Darat di Provinsi Lampung.....	83
4.3.2. Capaian Pembangunan Konektivitas Laut di Provinsi Lampung	84
4.3.3. Capaian Pembangunan Konektivitas Udara di Provinsi Lampung.....	84
4.3.4. Capaian Pembangunan Konektivitas TIK di Provinsi Lampung	85
4.4. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.....	86



4.4.1. Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Infrastruktur Konektivitas Darat	87
4.4.2. Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Infrastruktur Konektivitas Laut dan Udara	89
4.4.3. Tantangan Fiskal Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Lampung.....	90
4.4.4. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Pendukung Infrastruktur Konektivitas Lampung	91
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	93
5.1. KESIMPULAN	93
5.1.1. <i>Outlook</i> Makroekonomi Regional Lampung	93
5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung	94
5.1.2.1. Kinerja APBN	94
5.1.2.2. Kinerja APBD	96
5.1.2.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD	97
5.1.2.4. Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah	97
5.1.3. <i>Profiling</i> Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).....	97
5.1.4. Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas	98
5.2. REKOMENDASI	99



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 persen (<i>yoy</i>)	1
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 persen (<i>qtq</i>)	2
Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2024 Menurut Pengeluaran (Persen)	3
Grafik 1.4. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan I 2024	4
Grafik 1.5. Pertumbuhan Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan I 2024	6
Grafik 1.6. Ekspor Luar Negeri Lampung Berdasarkan Golongan Barang (Juta USD).....	6
Grafik 1.7. Distribusi dan Pertumbuhan (<i>yoy</i>) PDRB menurut Lapangan Triwulan I 2024	8
Grafik 1.8. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB per Triwulan Tahun 2020-2024 (Persen).....	9
Grafik 1.9. Perkembangan BI <i>7-Day Repo Rate</i> dan Inflasi Lampung.....	10
Grafik 1.10. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan I 2024 (Persen) ...	11
Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Januari 2024 (<i>mtm</i>).....	11
Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Februari 2024 (<i>mtm</i>).....	12
Grafik 1.13. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Maret 2024 (<i>mtm</i>)	12
Grafik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (<i>yoy</i>)	13
Grafik 1.15. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan I 2024.....	14
Grafik 1.16. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung	14
Grafik 1.17. Perkembangan Harga Bawang Putih di Provinsi Lampung	15
Grafik 1.18. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan I 2024	17
Grafik 1.19. Tren Ekspor, Impor, Neraca Perdagangan Luar Negeri (juta USD) Lampung	17
Grafik 1.20. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (persen).....	19
Grafik 1.21. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Februari 2020 – Februari 2024.....	20
Grafik 1.22. Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Februari 2020 – Februari 2024 (Persen)	21
Grafik 1.23. TPT Provinsi Lampung Februari 2020 – Februari 2024	21
Grafik 1.24. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (persen).....	21
Grafik 1.25. TPT Regional Sumatera Februari 2020 s.d. Februari 2024 (persen).....	22
Grafik 1.26. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024	23



Grafik 1.27. NTP Regional Sumatera Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen).....	23
Grafik 1.28. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024	26
Grafik 1.29. Perkembangan NTN Lampung	26
Grafik 1.30. NTN Regional Sumatera Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)	26
Grafik 2.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	30
Grafik 2.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Triwulan I 2024 (miliar rupiah, persen).....	30
Grafik 2.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota Triwulan I 2024	31
Grafik 2.4 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Triwulan I 2024 (persen).....	31
Grafik 2.5 Pertumbuhan Kumulatif PNBPN Triwulan I 2024 (miliar rupiah)	32
Grafik 2.6 Tren PNBPN Provinsi Lampung Tahun Triwulan I 2022-2024 (miliar rupiah)	33
Grafik 2.7 Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan I 2022 – 2024 (miliar rupiah)	33
Grafik 2.8. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan I 2022 – 2024 (miliar rupiah)	34
Grafik 2.9 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah).....	34
Grafik 2.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar Rp, persen).....	35
Grafik 2.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar Tahun 2024 (persen)	36
Grafik 2.12. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2024 (miliar Rp, persen).....	36
Grafik 2.13 Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah).....	37
Grafik 2.14 Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2023 (rupiah, jiwa)	37
Grafik 2.15. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, persen)	37
Grafik 2.16 Distribusi Penyaluran TKD Triwulan I 2022 – 2024 per Jenis (miliar rupiah, persen).....	38
Grafik 2.17. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD Triwulan I-2024 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen). 39	
Grafik 2.18 Komponen Penyaluran DTU Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen).....	39
Grafik 2.19 Pagu DAU Per Jenis Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	39
Grafik 2.20 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)..	40
Grafik 2.21 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTK Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen). 40	
Grafik 2.22 Alokasi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2023 dan 2024 (miliar, Rp)	40
Grafik 2.23 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2024 per 31 Maret 2024 (miliar Rp).....	42
Grafik 2.24 Distribusi Pagu Dana Desa <i>Earmarked</i> dan <i>Non-Earmarked</i> Tahun 2024 (miliar Rp)	42
Grafik 2.25. <i>Clustering</i> Penyerapan Dana Desa Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)	42
Grafik 2.26 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp).....	43
Grafik 2.27 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp)	43
Grafik 2.28. Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan I 2023 dan 2024. 46	
Grafik 2.29. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	46



Grafik 2.30. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	47
Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	48
Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	48
Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	49
Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan I Tahun 2023- 2024 (miliar rupiah)	49
Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 20023-2024 (miliar rupiah)	50
Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	50
Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	51
Grafik 2.38. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	51
Grafik 2.39. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	52
Grafik 2.40. Perkembangan Realisasi PAD (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	52
Grafik 2.41. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2024 (persen).....	53
Grafik 2.42. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)	53
Grafik 2.43. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024.....	54
Grafik 2.44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	55
Grafik 2.45. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan I-2024	55
Grafik 2.46. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah) ..	56
Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	56
Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)	57
Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	57
Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)	58
Grafik 2.51. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)	58
Grafik 2.52. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)	59



Grafik 2.53. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2024 (juta rupiah)..... 59

Grafik 2.54. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2024 (ribu rupiah)..... 60

Grafik 2.55. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024 60

Grafik 2.56. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)..... 62

Grafik 2.57. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar rupiah) 64

Grafik 2.58. Tren Target dan Realisasi Pengelolaan BMN di Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (miliar, Rp). 66

Grafik 4.1. Perkembangan Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 79

Grafik 4.2. Perkembangan Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas 2021 s.d. 2023 per Kementerian/ Lembaga (Rp miliar)..... 79

Grafik 4.3. BPP Infrastruktur Konektivitas per Kategori tahun 2023..... 80

Grafik 4.4. Porsi Kontribusi Belanja Kerangka Infrastruktur Fisik berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2023..... 81

Grafik 4.5. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Lampung 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)..... 81

Grafik 4.6. Perkembangan Indeks Kemantapan Jalan 2021 s.d. 2023 83

Grafik 4.7. Perkembangan Indeks Kemantapan Jembatan se-Sumatera 2021 s.d. 2023 83

Grafik 4.8. Panjang Dermaga Khusus Kenavigasian di Regional Sumatera 2021-2022 84

Grafik 4.9. Jumlah Keberangkatan Pesawat di Regional Sumatera 85

Grafik 4.10. Indeks Pembangunan Konektivitas TIK di Regional Sumatera 2021-2022..... 85

Grafik 4.11. Hubungan Belanja Jalan dan Kemantapan Jalan Provinsi Lampung 2021-2023..... 88

Grafik 4.12. Hubungan Belanja Jembatan dan Kemantapan Jembatan Provinsi Lampung 2021-2023..... 89

Grafik 4.13. Perbandingan Belanja Per Kategori Konektivitas di Lampung 2021-2023..... 89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)	3
Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024	7
Tabel 1.3. Rekapitulasi Fenomena Pertumbuhan (<i>yoy</i>) berdasarkan Sektor Lapangan Usaha	8
Tabel 1.4. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan I 2024 (Persen)	11
Tabel 1.5. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan I 2024	13
Tabel 1.6. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan I 2024	14
Tabel 1.7. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan I 2024 (Persen)	14
Tabel 1.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2023 (persen).....	20
Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – Triwulan I 2024	24
Tabel 1.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 – Triwulan I 2024.....	25
Tabel 2.1 <i>I-Account</i> APBN di Provinsi Lampung Realisasi Triwulan I 2024 (dalam miliar Rp)	28
Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Maret 2024 (miliar rupiah).....	29
Tabel 2.3 <i>Tax Ratio</i> Penerimaan Pajak 2022-2024 di Lampung (miliar rupiah).....	32
Tabel 2.4. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2024 Provinsi Lampung (miliar rupiah)	33
Tabel 2.5 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2024 (miliar, Rp)	41
Tabel 2.6 Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen).....	43
Tabel 2.7 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen).....	44
Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)	44
Tabel 2.9. <i>I-Account</i> Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah).....	46
Tabel 2.10. Perbandingan <i>Local Tax Ratio</i> Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024.....	49
Tabel 2.11. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024.....	54
Tabel 2.12. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2023 dan 2024.....	59
Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2024	60
Tabel 2.14. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024.....	62
Tabel 2.15. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024	62
Tabel 2.16. <i>I-Account</i> Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung Triwulan I 2023-2024 (miliar rupiah)	63
Tabel 2.17. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2023-2024.....	63
Tabel 2.18. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2021-2023.....	64
Tabel 2.19. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2022 dan 2023 (miliar Rp, persen).....	65



Tabel 2.20. Rincian Saldo Aset Tetap Bruto berdasarkan Jenis Aset per 31 Desember 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen).....	66
Tabel 2.21. Kontribusi Belanja Modal Per Jenis Tahun 2022 dan 2023 (miliar, Rp).....	66
Tabel 2.22. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap.....	66
Tabel 3.1. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023	69
Tabel 3.2. Daftar UMKM Peserta <i>Profiling</i> DJPb Lingkup Provinsi Lampung.....	73
Tabel 3.3. Hasil Klasifikasi <i>Profiling</i> UMKM.....	74
Tabel 4.1. Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas Lampung 2021 s.d. 2023 per K/L per Satker (Rp miliar)	79
Tabel 4.2. Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas Darat APBD Provinsi Lampung 2021 s.d. 2023 per Program (Rp miliar)	82
Tabel 4.3. Analisis of Variance (ANOVA) Hubungan Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jalan dengan Indeks Kemantapan Jalan 2021-2023 Provinsi Lampung.....	87





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I Tahun 2024....	2
Gambar 3.1. Ilustrasi Peningkatan Status UMKM.....	71
Gambar 3.2. Produk Kallista Cookies.....	75
Gambar 3.3. Produk Jamu Ibu Rina.....	75
Gambar 3.4. Produk <i>Crafter</i> Rajut.....	75
Gambar 3.5. Mie Ayam Dimsumol.....	76
Gambar 3.6. Dapur Bude Yah.....	76
Gambar 3.7. Kue Tat Istimewa.....	76
Gambar 3.8. Toko M. Sajid.....	76
Gambar 3.. Kopi dan Keripik Pak Arim.....	77
Gambar 3.. Warung Mba Uci.....	77
Gambar 3.11. Warung teh Uli.....	77
Gambar 4.1. Peta Cakupan Jaringan Telkomsel di Regional Lampung.....	86





EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2024
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Outlook Ekonomi Regional Lampung

Ekonomi Lampung Triwulan I 2024 masih menunjukkan pertumbuhan yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang kuat. Namun, ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim (El Nino berkepanjangan) masih menekan pasar dan produktivitas sektor basis Lampung yaitu sektor pertanian.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tumbuh moderat 3,30 persen (yoy). Meskipun tumbuh, kinerja ekonomi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 4,94 persen (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga berada di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen (yoy) dan regional Sumatera sebesar 4,24 persen (yoy). Secara *quarter-to-quarter* (qtq), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 1,24 persen (qtq). Walaupun kinerja secara qtq lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih berada di bawah nasional yang hanya terkontraksi 0,83 persen (qtq).

Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh didorong utamanya oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga masih menguat dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada berbagai momen penting, seperti bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta perayaan keagamaan lainnya termasuk Tahun Baru Cina. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) juga berkontribusi dalam mendorong daya beli masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung per 1 Januari 2024 juga berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara umum.

Berbagai tantangan dihadapi ekonomi Lampung, termasuk imbas tensi geopolitik terhadap kondisi pasar global dan neraca perdagangan luar negeri, baik dari sisi impor maupun ekspor. Tahun 2024 merupakan tahun politik yang membuat investor cenderung *wait and see* dalam melakukan aktivitas investasi. Dampak *climate change* (El Nino) juga berdampak pada produktivitas sektor utama Provinsi Lampung yaitu Pertanian. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Lampung dengan kontribusi di triwulan IV 2024 sebesar Rp26.652,73 miliar atau 23,78 persen dari total PDRB, disusul oleh Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,92 persen dan 14,66 persen. Namun demikian, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 10,97 persen (yoy) akibat dari El Nino berkepanjangan dan penurunan permintaan komoditas global.

Inflasi Lampung tetap terjaga pada di level sasaran 2,5±1 persen (yoy). Capaian inflasi Maret 2024 adalah sebesar 3,45 persen (yoy), di atas inflasi nasional sebesar 3,05 persen (yoy). Secara bulanan, rata-rata inflasi Lampung triwulan I 2024 sebesar 0,19 persen (*mtm*) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 0,44 persen (*mtm*). Secara garis besar tekanan inflasi triwulan I 2024 didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya komoditas beras.

Suku bunga acuan pada triwulan I 2024 berada pada angka 6,00 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam level sasaran 2,5±1 persen (yoy). Fokus kebijakan moneter melalui suku bunga acuan terus diarahkan untuk



menjaga nilai rupiah tetap stabil. Triwulan I 2024 nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap USD sehingga meningkatkan harga barang impor. Namun demikian, impor bahan baku dan penolong serta impor barang konsumsi Lampung mengalami peningkatan. Kenaikan ini menunjukkan indikasi sektor industri dan investasi di Lampung yang masih berkembang dengan baik dan daya beli masyarakat yang tetap kuat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan menjadi 4,12 persen, dibandingkan periode Februari 2023 yang tercatat sebesar 4,18 persen. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan yang berkelanjutan atas kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung akibat dampak pandemi yang sebelumnya terjadi. Capaian TPT Lampung juga lebih baik dibandingkan dengan capaian TPT nasional dan rata-rata TPT di regional Sumatera. Sejalan dengan struktur ekonomi Lampung, penyerapan tenaga didominasi oleh sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; sektor perdagangan; dan sektor industri pengolahan.

Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menunjukkan tren yang positif, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata NTP Provinsi Lampung di triwulan I 2024 mencapai 120,58, lebih tinggi dari capaian NTP nasional yang sebesar 119,54. Namun demikian, capaian ini masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera yang sebesar 129,63. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mendukung kesejahteraan petani, antara lain akses permodalan KUR melalui e-KPB, Asuransi Usaha Tani Padi, dan berbagai dukungan lainnya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Lampung mencatat capaian cukup baik. Pada triwulan I 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata

mencapai 110,24, menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata NTN nasional dan regional Sumatera. Dalam upaya meningkatkan sektor perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menerapkan berbagai program dan kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah Lampung. Sebagai hasil dari kerjasama ini, lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) telah ditetapkan di Pulau Pasaran.

Analisis Fiskal Regional: APBN dan APBD

Kinerja APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Maret 2023 tetap akseleratif dan adaptif di tengah ketidakpastian global. Realisasi Belanja Negara pada Triwulan I 2024 mencapai Rp7.626,33 miliar atau 24,07 persen dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 7,27 persen (yoy). Namun, perlu waspada risiko penurunan pendapatan Bea Keluar imbas dari penurunan permintaan global akibat tensi geopolitik.

Belanja Pemerintah Pusat terakselerasi 56,38% (yoy), khususnya guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, dukungan pemerataan pendapatan melalui THR, serta bantuan pendidikan tinggi Islam melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2.399,63 miliar atau 25,45 persen dari pagu, tumbuh 56,38 persen (yoy) didorong oleh penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai. Belanja Pegawai terealisasi Rp1.058,54 miliar atau 26,49 persen dari pagu, tumbuh 42,50 persen (yoy). Belanja Barang mencatatkan realisasi Rp1.176,60 miliar atau 27,64 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 88,11 persen (yoy) utamanya untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Belanja Modal secara nominal terealisasi Rp144,13 miliar, atau 12,66 persen dari pagu, tumbuh negatif 11,07 persen (yoy), seiring penurunan alokasi pagu dari Tahun 2023.



Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat dan dominan di Provinsi Lampung penting untuk direalisasikan secara lebih optimal. Alokasi TKD pada tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp22.259,81 miliar, meningkat 3,11 persen (yoy). Sampai dengan 31 Maret 2024, telah terealisasi Rp5.226,71 miliar atau 23,48 persen dari pagu, tumbuh negatif 6,25 persen (yoy) dipicu oleh penurunan realisasi komponen DTU berupa DBH (-34,98 persen, yoy), dan DTK berupa DAK Non Fisik (-37,57 persen, yoy). Sementara itu, kinerja penyaluran Insentif Fiskal dan Dana Desa menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, dipengaruhi oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 dan peningkatan kepatuhan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur.

Pendapatan Negara telah terkumpul Rp2,15 triliun atau setara dengan 19,24 persen dari target, berkontraksi 4,73 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh penerimaan Bea Keluar yang menurun tajam akibat moderasi harga komoditas di pasar global. Komponen Penerimaan perpajakan pemerintah pusat termoderasi 11,77 persen (yoy). Namun, Pajak Penghasilan sebagai kontributor utama tumbuh 3,71 persen menunjukkan bahwa sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga solid. Komponen Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tumbuh negatif sebesar 48,35 persen (yoy). Di sisi lain, PNBP menunjukkan kinerja memuaskan dengan capaian 42,62 persen dari target, tumbuh signifikan sebesar 39,51 persen (yoy).

APBN bekerja keras mendukung kebijakan fiskal ekspansif bagi Provinsi Lampung. Defisit APBN tercatat sebesar Rp Rp5.475,39 miliar, atau melebar 12,85 persen (yoy), dipicu oleh peningkatan realisasi Belanja Negara seiring dengan Pendapatan Negara yang masih tumbuh negatif. Hal ini merupakan implikasi kebijakan ekspansif yang diterapkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan agenda strategis nasional, menstimulasi perekonomian, dan

mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Kinerja APBD Provinsi Lampung Triwulan I 2024 menunjukkan Belanja Daerah yang tumbuh didukung Belanja Modal dan Belanja Operasi, namun terdapat risiko pada penurunan Pendapatan Daerah.

Realisasi Belanja Daerah tercatat Rp3.804,51 miliar, atau 11,76 persen dari pagu, tumbuh 11,29 persen (yoy). Realisasi Belanja Operasi mencapai Rp2.950,47 miliar atau 12,85 persen dari pagu, tumbuh 11,46 persen (yoy). Kontribusi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah mencapai 77,5 persen. Realisasi Belanja Modal Daerah di Lampung hingga 31 Maret 2024 tumbuh 62,41 persen (yoy) mencapai Rp332,16 miliar atau 8,27 persen dari pagu. Pertumbuhan didorong oleh peningkatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, serta Gedung dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Daerah Lampung sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp3.892,98 miliar atau 12,07 persen dari target APBD, berkontraksi 29,95 persen (yoy). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tercatat sebesar Rp560,36 miliar atau 6,90 persen dari target, tumbuh negatif 49,23 persen (yoy). Kontraksi ini terjadi seiring dengan penurunan pada kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah (-51,35 persen, yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (-62,98 persen, yoy), dan Lain-lain PAD yang Sah (-61,04 persen, yoy). Pendapatan dari Retribusi Daerah tumbuh signifikan hingga 285,15 persen (yoy). Termoderasinya Pendapatan Pajak Daerah mengakibatkan *Local Tax Ratio* yang membandingkan PDRD terhadap PDRB Lampung cenderung rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dioptimalkan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih dominan berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Lampung tercatat



Rp3.231,99 miliar atau 14,52 persen dari pagu, turun 21,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menjadi kontributor utama, menyumbang 83,02 persen dari total Pendapatan Daerah. Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi tingkat kemandirian daerah di regional Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan 35,18 persen.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada Triwulan I-2024 menunjukkan surplus, mengindikasikan kebijakan fiskal yang lebih konservatif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Peningkatan belanja perlu diakselerasi agar dapat mendorong daya beli masyarakat, namun dengan tetap memastikan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan fiskal.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Pemberdayaan UMKM oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut aktif berperan dalam sinergi pemberdayaan UMKM regional. Peran ini sesuai dengan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 dan KEP-112/PB/2023, dimana Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara turut melaksanakan program pemberdayaan UMKM di level regional.

Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Vertikal DJPb Regional Lampung dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Hal ini termasuk persiapan pemberdayaan UMKM, seperti Profiling UMKM dan Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, pelaksanaan pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan usaha dan pembiayaan. Selain itu, Kantor Vertikal DJPb juga bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan UMKM, termasuk

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan hasil kegiatan. Melalui langkah-langkah ini, Kantor Vertikal DJPb Provinsi Lampung berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya.

Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung akan diarahkan secara khusus kepada Usaha Mikro. Pemilihan fokus ini didasarkan pada peran penting Kantor Vertikal DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Dua jenis kredit ini secara signifikan dimanfaatkan oleh UMKM di tingkat Mikro dan Ultra Mikro. Langkah ini diambil, dengan salah satu tujuannya, agar turut memperkuat ekosistem UMKM di area pembiayaan tersebut, sekaligus memberikan dukungan yang lebih terarah bagi sektor usaha yang biasanya berasal dari keluarga prasejahtera. Dengan memfokuskan pemberdayaan pada Usaha Mikro, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih langsung dan merata bagi para pelaku usaha rintisan di Lampung.

Proses Pemberdayaan melibatkan komunitas UMKM agar lebih komprehensif dan kolaboratif. Kerja sama dengan komunitas/asosiasi juga memperkuat jaringan antara pemerintah dan pelaku usaha, menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Pada tahap awal, dilaksanakan profiling UMKM untuk menentukan kebutuhan akan pemberdayaan bagi UMKM calon binaan.

Analisis Tematik: Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Lampung

Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp1 miliar dalam belanja pemerintah terkait konektivitas jalan, dapat berkontribusi pada peningkatan sebesar 1,41 persen Indeks Kemantapan Jalan.





Pemerintah pusat dan daerah dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran dan skema kebijakan pembangunan infrastruktur kolaboratif guna mendorong pemerataan perekonomian di Lampung.

Beberapa capaian indikator pembangunan infrastruktur konektivitas menunjukkan tantangan bagi Provinsi Lampung, baik konektivitas darat, laut, udara, dan TIK. Pada 2023, Indeks Kemantapan Jalan di Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan antara jalan provinsi, jalan kota, dan jalan kabupaten, dengan tren yang stagnan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, hingga tahun 2022, jumlah keberangkatan pesawat di Lampung berada di peringkat kedua terendah di regional Sumatera. Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Lampung pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun masih di bawah rata-rata nasional dan regional Sumatera, dengan penurunan pada indikator infrastruktur.

Meskipun anggaran konektivitas darat paling besar, namun belum mencukupi untuk mengembangkan infrastruktur konektivitas darat yang komprehensif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam tiga tahun terakhir Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Infrastruktur Konektivitas meningkat, namun sumber daya tersebut belum cukup untuk meningkatkan capaian infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung. Misalnya pada infrastruktur jalan, pada tahun 2023, anggaran Pemerintah Provinsi untuk Jalan dan Jembatan sebesar Rp897,81 miliar yang digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan Jalan Provinsi hanya sanggup mengakomodasi sepanjang 641 km dari total 1.695,48 km panjang Jalan Provinsi Lampung.

Alokasi anggaran konektivitas laut dan udara mengalami ketimpangan selama tiga tahun terakhir, menunjukkan perlunya fokus alokasi pada APBN dan APBD. Konektivitas laut dan udara sangat penting untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, dengan pelabuhan dan bandara berperan vital dalam perdagangan, distribusi barang, dan transportasi penumpang. Kurangnya perhatian pada sektor ini dapat mengurangi daya saing Lampung di pasar global dan membatasi aksesibilitas serta konektivitas dengan wilayah lain di Indonesia maupun negara-negara tetangga.

Tantangan lain terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung meliputi kompleksitas tata kelola dan teknis pelaksanaan lapangan. Hal ini termasuk antara lain kompleksitas pelaksanaan kewenangan jalan antar tingkat pemerintahan yang mengurangi fleksibilitas dan koordinasi proyek, jeda waktu dalam pengalokasian anggaran yang menyebabkan efisiensi dan efektivitas proyek kurang optimal; proyek skala kecil juga menghadapi biaya tinggi terutama untuk sewa alat berat, dan penggunaan alat berat sering menyebabkan kerusakan jalan akses yang berulang, mengakibatkan penggunaan anggaran kurang efisien.

Policy Responses

Berdasarkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan pembangunan di Lampung pada Triwulan I 2024, dapat disampaikan beberapa *policy responses* sebagai berikut. Rekomendasi berikut utamanya guna memitigasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, UMKM, serta kondisi infrastruktur konektivitas.

- Dukungan anggaran untuk dukungan produktivitas pertanian Lampung sangat diperlukan guna memitigasi penurunan sektor pertanian akibat perubahan iklim.** Alokasi anggaran dapat ditingkatkan untuk subsidi benih, permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi usaha tani, dan pembiayaan pasca panen melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk mengatasi pergeseran masa tanam/panen dan inflasi komoditas strategis.





2. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengimplementasikan program integratif pembiayaan, pelatihan, dan manajemen risiko bagi pelaku pertanian terdampak perubahan iklim dan penurunan permintaan global. Pendekatan kolaboratif ini harus memberikan dukungan integratif bagi usaha pertanian, agroindustri, dan perikanan yang rentan.
3. Pemerintah dan OJK Lampung perlu mendorong penyaluran KUR Khusus berbasis klaster dan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Fokus pembiayaan ini perlu diarahkan ke daerah penghasil komoditas strategis Lampung, termasuk: padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan PNPB melalui pengembangan potensi agrowisata di Lampung. Strategi ini diharapkan akan memitigasi risiko penurunan penerimaan negara akibat ketergantungan usaha terhadap permintaan global atas komoditas Lampung.
5. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Joint Program antara Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah. Fokusnya pada peningkatan kualitas SDM, pengawasan sumber pendapatan, asistensi perumusan tarif pajak, dan pengembangan teknologi informasi seperti platform pembayaran digital dan tapping box.
6. Pemerintah perlu menambah skema pembangunan infrastruktur kolaboratif antar kewenangan daerah. Misalnya seperti, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sebagai payung hukum untuk memfasilitasi koordinasi pembangunan lintas sektor dan kewenangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
7. Insentif Fiskal dengan Tema Infrastruktur Konektivitas penting diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam proyek infrastruktur sebelumnya dan bagi yang memiliki kapasitas fiskal rendah seperti Provinsi/Kota/Kabupaten di Lampung. Hal tersebut bertujuan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan menarik investasi swasta untuk pertumbuhan ekonomi regional.
8. Penambahan alokasi anggaran diperlukan untuk pembangunan fasilitas tambahan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Selain itu, insentif pajak juga dapat diberikan kepada operator pelabuhan swasta yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk meningkatkan fasilitas logistik dan efisiensi operasional.
9. Peningkatan anggaran dan modernisasi Bandara Radin Inten II di Lampung diperlukan untuk memperbaiki konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Insentif pajak juga dapat diberikan kepada maskapai penerbangan yang membuka rute baru ke Lampung untuk meningkatkan konektivitas udara.
10. Peningkatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga, satuan kerja, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan anggaran. Petunjuk Teknis harus disampaikan secara antisipatif untuk memfasilitasi program kegiatan oleh Satker dan Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran.



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 (yoy)



Perekonomian Lampung pada Triwulan I 2024 tumbuh positif, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya serta periode yang sama pada tahun lalu. Kondisi ini utamanya disebabkan Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan.



Administrasi Pemerintahan dan Lainnya
14,23% (yoy) ↑

LU adm Pemerintahan mengalami pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan peningkatan belanja barang dan jasa terkait penyelenggaraan Pemilu.



Pengeluaran Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani RT
19,13% (yoy) ↑

Konsumsi LNPRM mengalami pertumbuhan tertingi, didorong eskalasi signifikan aktivitas lembaga keagamaan & Ormas selama Ramadhan, serta peningkatan aktivitas partai politik dalam konteks Pemilihan Umum 2024.

Struktur PDRB Triwulan I 2024 (yoy)

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi Produksi



Kontribusi 23,78%
PERTANIAN
10,97% (yoy) ↓

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi terkontraksi akibat menghadapi tantangan *climate change*, yaitu *El Nino* sehingga terjadi pergeseran musim panen.



Kontribusi 18,92%
INDUSTRI PENGOLAHAN
6,51% (yoy) ↑

Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh didorong oleh beberapa kinerja sektor industri, seperti kinerja industri makan-minum dan industri percetakan selama masa kampanye.



Kontribusi 14,66%
PERDAGANGAN
8,58% (yoy) ↑

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh sejalan dengan tetap kuatnya aktivitas perdagangan antar Provinsi pada periode HBKN serta ramainya penyelenggaraan event kuliner di Lampung.

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran



Pertumbuhan konsumsi RT dipicu peningkatan konsumsi masyarakat pada berbagai momen penting, seperti bulan Ramadhan, termasuk Tahun Baru Cina. Selain itu, THR dan kenaikan UMP Lampung 3,16 persen per 1 Januari 2024 juga mendorong daya beli masyarakat.

Kontribusi 65,64%
KONSUMSI RT
4,67% (yoy) ↑



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan positif, tetapi melemah dibandingkan periode triwulan I 2023 yang tumbuh 2,33% (yoy) hal ini sejalan dengan sikap investor yang *wait and see* pada periode Pemilihan Umum.

Kontribusi 32,22%
PMTB
2,31% (yoy) ↑



Perkembangan Inflasi Lampung (yoy)

Periode Maret 2024

Kota Metro
IHK 105,78
3,21% (yoy)

Kabupaten Mesuji
IHK 110,33
4,52% (yoy)

Kabupaten Lampung Timur
IHK 109,98
4,83% (yoy)

Kota Bandar Lampung
IHK 106,00
2,72% (yoy)

Perhitungan IHK pada Empat Wilayah



Inflasi Provinsi Lampung
3,45% (yoy)

Penahan Inflasi (yoy)

- Bawang Merah
- Minyak Goreng
- Cumi-cumi



Pendorong Inflasi (yoy)

- Beras
- Bawang Putih
- Daging Ayam Ras



Highlights Perkembangan Inflasi Lampung triwulan I 2024

Pada tahun 2024, level sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen (yoy). Sepanjang triwulan I 2024 inflasi Lampung dan nasional konsisten berada dalam level sasaran. Inflasi Lampung dan Nasional menunjukkan tren yang menurun sejak triwulan II 2023, tetapi kembali melonjak di triwulan IV 2023. Pemda Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya konsisten melakukan mitigasi risiko inflasi, utamanya pada komoditas pangan yang terkena dampak El Nino.

Kondisi Ketenagakerjaan



Highlights Kondisi Ketenagakerjaan Lampung Februari 2024

Membaiknya kondisi perekonomian seiring dengan penguatan ekonomi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan berkurangnya pengangguran. Sejalan dengan komposisi sektor ekonomi Lampung, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2024 didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan, serta sektor Industri Pengolahan.

Serapan Tenaga Kerja **PERTANIAN** 44,19%
0,27% (yoy) ↑

Serapan Tenaga Kerja **PERDAGANGAN** 17,92%
0,55% (yoy) ↓

Serapan Tenaga Kerja **INDUSTRI PENGOLAHAN** 9,04%
0,04% (yoy) ↓

Nilai Tukar Petani (NTP)



Triwulan I 2024
TANAMAN PANGAN 112,68
15,20% (yoy)



Triwulan I 2024
PERIKANAN TANGKAP 110,24
1,84% (yoy)



Triwulan I 2024
HORTIKULTURA 130,49
23,48% (yoy)



Triwulan I 2024
PERIKANAN BUDIDAYA 97,35
0,49% (yoy)



Triwulan I 2024
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 136,29
21,70% (yoy)



Triwulan I 2024
PETERNAKAN 96,28
2,21% (yoy)

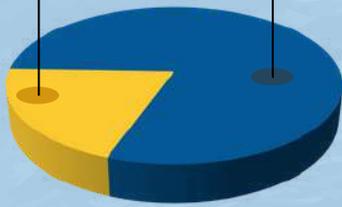
Highlights NTP

Rata-rata NTP Lampung Triwulan I 2024 sebesar 120,58 meningkat 16,24% (yoy). Peningkatan ini didorong hampir seluruh subsektor NTP kecuali Nilai Tukar Petani Perikanan yang mengalami penurunan. Dalam meningkatkan kesejahteraan Petani di Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Program e-KPB yang memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha.



Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

Realisasi Pendapatan Negara

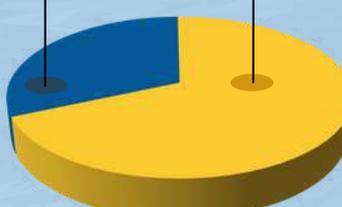


Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Sampai dengan Triwulan I 2024, Pendapatan Negara menunjukkan capaian yang positif dengan nilai realisasi mencapai Rp2.150,95 miliar atau setara dengan 19,24% dari target. Kontributor utama Pendapatan Negara bersumber dari Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan Rp805,90 Miliar	Cukai Rp2,58 Miliar	Bea Keluar Rp53,63 Miliar
Pajak Pertambahan Nilai Rp702,91 Miliar	Pajak Lainnya Rp36,40 Miliar	PNBP Lainnya Rp229,77 Miliar
Pajak Bumi dan Bangunan (Rp7,15) Miliar	Bea Masuk Rp123,83 Miliar	Pendapatan BLU Rp203,07 Miliar

Realisasi Belanja Negara

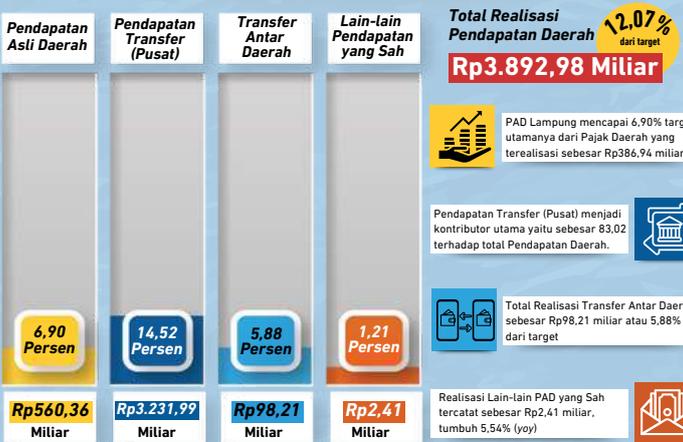


Realisasi Belanja Negara di Lampung

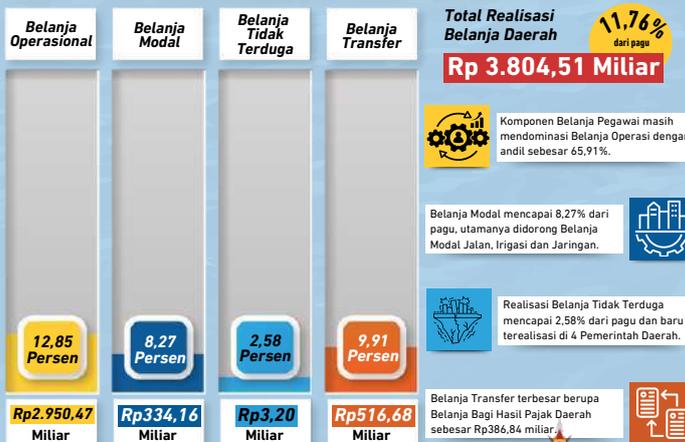
Hingga Triwulan I 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp7.626,33 miliar atau tumbuh 7,27 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara masih didominasi oleh penyaluran Dana Transfer ke Daerah dengan nominal Rp5.226,71 miliar dengan kontribusi 68,76 persen dari total Belanja Negara.

Belanja Pegawai Rp1.058,54 Miliar	Belanja Barang Rp1.176,60 Miliar	Dana Alokasi Umum Rp3.520,37 Miliar	Dana Bagi Hasil Rp73,58 Miliar	DAK Fisik Rp0
Belanja Modal Rp144,13 Miliar	Belanja Bansos Rp20,35 Miliar	DAK NonFisik Rp985,70 Miliar	Insentif Fiskal Rp10,66 Miliar	Dana Desa Rp636,40 Miliar

Realisasi Pendapatan Daerah



Realisasi Belanja Daerah



Sumber data: Kementerian Keuangan

Snapshot Analisis Tematik

Infrakon Darat



Sumber data: DJPb, Kementerian PUPR, dan BPS

Tantangan Fiskal Peningkatan InfraKon





Halaman ini sengaja dikosongkan

“ Pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB I



BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berfungsi untuk membantu dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

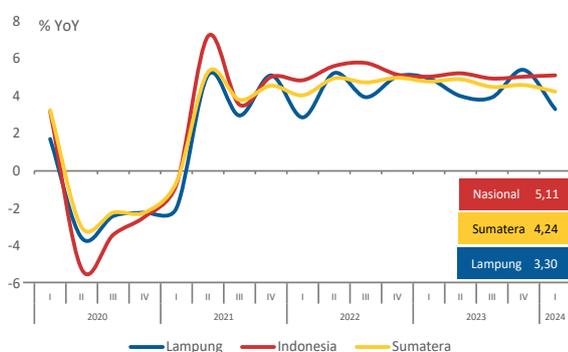
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

1.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. **Secara year-on-year (yoy)**, kinerja ekonomi Lampung triwulan I-2024 dibandingkan dengan triwulan I-2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,30 persen (yoy), melemah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy). Capaian kinerja ekonomi Lampung triwulan I-2024 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy) dan Sumatera yang tumbuh sebesar 4,24 persen (yoy) sebagaimana tampak pada grafik 1.1.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 persen (yoy)



Sumber: BPS (diolah)

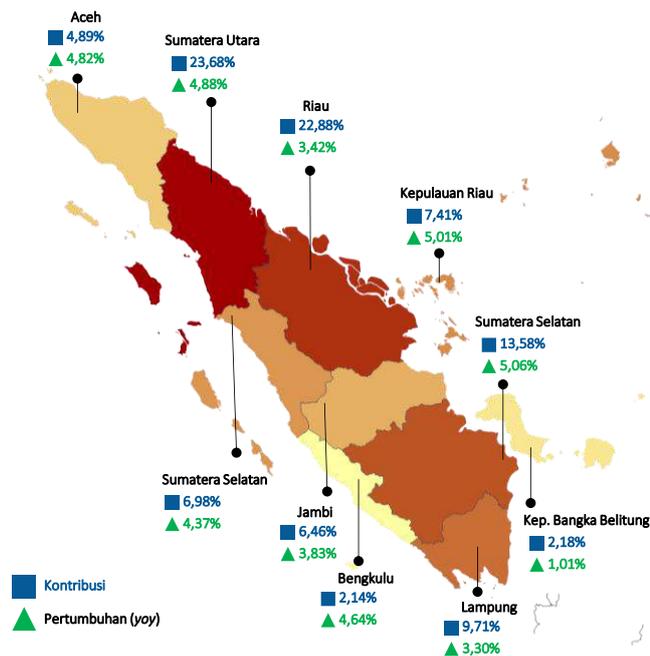
Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh peningkatan sejumlah sektor lapangan usaha, terutama sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 14,23 persen (yoy). Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalian serta Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh signifikan masing-masing sebesar 11,55 persen (yoy) dan 11,46 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh peningkatan di seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 19,13 persen (yoy) diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 15,67 persen (yoy).

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada Triwulan I Tahun 2024 didominasi oleh tiga provinsi utama. Provinsi Sumatera Utara memiliki kontribusi terbesar sebesar 23,68 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,82 persen (yoy). Provinsi Riau menyusul dengan kontribusi 22,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,01 persen (yoy). Provinsi Sumatera Selatan juga berperan penting dengan kontribusi 13,58 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen (yoy) dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada pada posisi ke-2 terendah dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 10,97 persen (yoy) akibat pengaruh perubahan iklim, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 secara keseluruhan di Lampung karena sektor ini memiliki kontribusi yang dominan dalam struktur ekonomi di Lampung yaitu sebesar 23,78 persen.

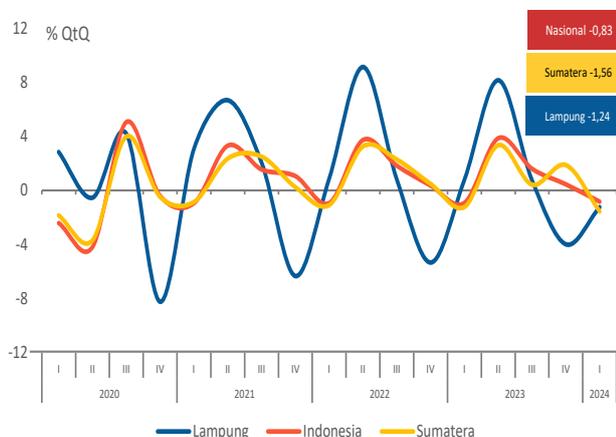
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I Tahun 2024



Sumber: BPS (diolah)

Secara *quarter-to-quarter (qtq)*, kinerja ekonomi Lampung triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 terkontraksi sebesar 1,24 persen (*qtq*), menguat dari capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,99 persen (*qtq*) dan berada di atas kinerja ekonomi Sumatera triwulan I-2024 yang terkontraksi sebesar 1,56 persen (*qtq*). Meskipun demikian, capaian perekonomian Lampung masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2024 yang hanya terkontraksi sebesar 0,83 persen (*qtq*) sebagaimana tampak pada grafik 1.2.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 persen (*qtq*)

Sumber: BPS (diolah)

Pada periode triwulan I, secara *qtq* Lampung menunjukkan *seasonal pattern* pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV). Tren yang terjadi pada tiga tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung di triwulan I selalu tumbuh positif dalam perbandingan antar triwulan. Namun, untuk periode triwulan I 2020 sampai dengan triwulan I 2024, periode triwulan I 2024 mengalami kontraksi.

Capaian ekonomi Lampung triwulan I-2024 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022) yang tumbuh sebesar 0,79 persen (*qtq*). Dari sisi produksi, sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,57 persen (*qtq*), kemudian disusul oleh sektor Konstruksi, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 9,06 persen (*qtq*) dan 5,54 persen (*qtq*). Dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 2,24 persen (*qtq*) dan Komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,58 persen (*qtq*).

1.1.1.1.2. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih dipengaruhi secara signifikan oleh dua komponen permintaan domestik, yaitu Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi RT memberikan kontribusi sebesar 65,64 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung, disusul oleh Investasi PMTB yang memberikan kontribusi sebesar 32,22 persen. PDRB ADHB Konsumsi RT sebesar Rp73.577,35 miliar dan PDRB ADHB Investasi PMTB sebesar Rp36.118,88 miliar.

Pada triwulan I 2024, laju pertumbuhan ekonomi tahunan Lampung pada konsumsi RT tumbuh sebesar 4,67 persen (*yoy*) tetapi melemah dibandingkan periode triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 4,88 persen (*yoy*). Sama halnya dengan investasi PMTB yang tumbuh sebesar 2,31 persen

(yoy) tetapi melemah dibandingkan periode triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 2,81 persen (yoy). Sementara itu, laju pertumbuhan triwulanan yakni untuk konsumsi RT tumbuh sebesar 0,58 persen (qtq), menguat dibandingkan periode triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 0,55 persen

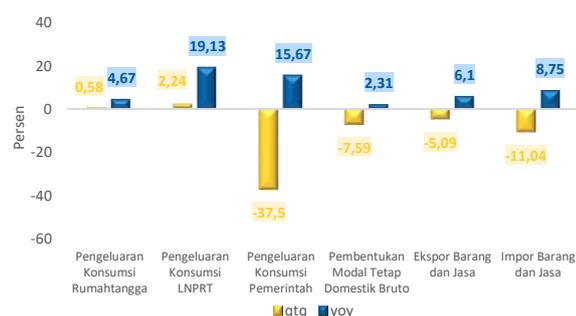
(qtq) sedangkan Investasi PMTB berkontraksi sebesar 7,59 persen (qtq), melemah dibandingkan periode triwulan I 2023 yang berkontraksi sebesar 3,27 persen (qtq). Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung triwulan I 2020 hingga triwulan I 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)

Pengeluaran	Triwulan I 2020			Triwulan I 2021			Triwulan I 2022			Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,75	-0,05	4,61	64,25	0,02	-3,87	62,67	0,35	4,03	63,45	0,55	4,88	65,64	0,58	4,67
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,68	-3,45	-1,08	1,75	-2,26	0,20	1,67	-9,89	1,23	1,70	0,72	6,90	1,95	2,24	19,13
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,82	-46,12	2,18	5,74	-47,47	-4,31	5,25	-48,53	-2,91	5,05	-44,15	3,01	5,69	-37,50	15,67
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32,43	-9,52	1,52	34,28	0,20	1,75	33,46	-3,26	2,33	32,97	-3,27	2,81	32,22	-7,59	2,31
Perubahan Inventori	0,51	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
Ekspor Barang dan Jasa	38,42	-11,65	-5,32	44,74	-1,47	14,18	50,71	-7,61	2,33	50,65	-6,57	10,11	52,87	-5,09	6,10
Impor Barang dan Jasa	42,60	-26,74	-1,14	51,61	-14,41	13,20	54,50	-16,99	2,65	54,50	-14,28	8,10	58,87	-11,04	8,75
PDRB	100,00	2,84	1,71	100,00	3,07	-1,99	100,00	0,87	2,86	100,00	0,77	4,94	100,00	-1,24	3,30

Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan I 2024 Menurut Pengeluaran (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Secara tahunan, semua komponen PDRB berdasarkan pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024 sebagaimana tampak pada grafik 1.3. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPR) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi yaitu sebesar 19,13 persen (yoy). Peningkatan ini dipicu oleh eskalasi signifikan dalam beragam aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat selama bulan Ramadhan, serta peningkatan aktivitas partai politik dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh sebesar 15,67 persen (yoy), yang didorong realisasi anggaran

pemerintah untuk belanja pegawai (pencairan THR) serta belanja barang dan jasa jelang aktivitas pemilu meningkat. Impor tumbuh sebesar 8,75 persen (yoy) didorong peningkatan kinerja impor pada komoditas bahan bakar mineral dan gandum. Ekspor tumbuh sebesar 6,10 persen (yoy) didorong peningkatan kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati. Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh sebesar 4,67 persen (yoy) yang didorong oleh adanya perayaan hari raya keagamaan seperti bulan Ramadhan, Imlek, dan menjelang Idul Fitri. PMTB tumbuh 2,31 persen (yoy) didorong kenaikan realisasi belanja modal APBD dibandingkan triwulan I 2023.

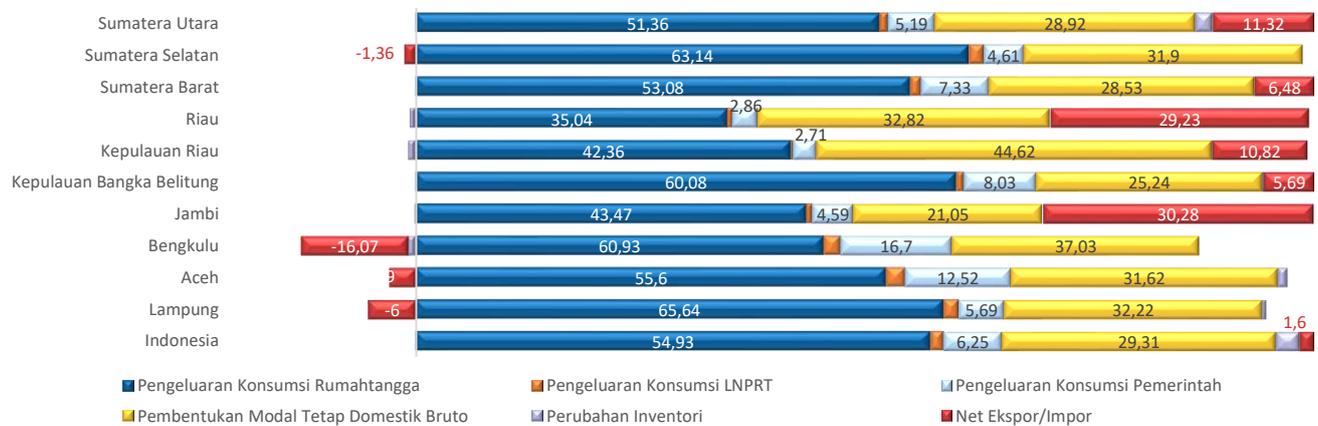
Secara triwulanan, komponen PDRB berdasarkan pengeluaran yang mengalami kontraksi yaitu PKP, PMTB, ekspor, dan impor sebagaimana tampak pada grafik 1.3. PKP berkontraksi sebesar 37,50 persen (qtq) dipengaruhi oleh penurunan barang dan jasa, serta belanja Bansos dibandingkan triwulan sebelumnya. PMTB berkontraksi sebesar 7,59 persen (qtq) dipengaruhi penurunan realisasi belanja modal APBD dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor berkontraksi sebesar 5,09 persen (qtq) dipengaruhi penurunan produksi pertanian ekspor khususnya komoditi tanaman pangan dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor

terkontraksi sebesar 11,04 persen (*qta*) dipengaruhi volume bongkar barang melalui pelabuhan panjang mengalami penurunan.

Di sisi lain, Pengeluaran Konsumsi RT, dan PK-LNPRT mengalami pertumbuhan secara triwulanan. Pengeluaran Konsumsi RT tumbuh sebesar 0,58 persen (*qta*) didorong konsumsi makanan minuman di bulan Ramadhan, konsumsi perabot, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin menyambut Idul Fitri. PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,24 persen (*qta*) didorong pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif serta aktivitas keagamaan.

Struktur ekonomi Provinsi Lampung dari sisi pengeluaran ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi RT yang mencakup 65,64 persen dari total PDRB. Selain itu, komponen permintaan domestik lainnya seperti PKP dan PK-LNPRT memberikan kontribusi masing-masing sebesar 5,69 persen dan 1,95 persen. Dari sisi komponen eksternal, impor memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pengurang PDRB Lampung dengan kontribusi sebesar 58,87 persen. Sementara itu, ekspor memberikan kontribusi sebesar 52,87 persen terhadap PDRB Lampung sehingga menghasilkan net impor sebesar 6,00 persen.

Grafik 1.4. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Triwulan I 2024



Sumber: BPS (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi di Regional Sumatera lainnya, Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mendominasi komponen permintaan domestik sama seperti Lampung sebagaimana tampak pada grafik 1.4. Namun di sisi komponen eksternal, Nasional dan tujuh Provinsi di regional Sumatera (Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara) menghasilkan Net Ekspor dimana kontribusi ekspor lebih tinggi dibandingkan kontribusi impor.

Pada triwulan I 2024, kontribusi konsumsi RT terhadap PDRB meningkat 2,19 persen poin jika dibandingkan kontribusi pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 63,45 persen. Bahkan kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada triwulan I 2020 yang sebesar 63,75 persen.

Konsumsi RT di Lampung menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 4,67 persen (*yoy*). Meskipun capaian triwulan I 2024 melemah dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 4,88 persen (*yoy*), namun pertumbuhan ini masih berada di atas pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I 2020 hingga triwulan I 2022.

Pada Triwulan I tahun 2024, pertumbuhan konsumsi RT dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada berbagai momen penting, seperti bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta perayaan keagamaan lainnya termasuk Tahun Baru Cina. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) juga berkontribusi dalam mendorong daya beli masyarakat. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 3,16 persen, atau meningkat sekitar Rp83.212, menjadi Rp2.716.496 per 1 Januari 2024 juga berperan



dalam peningkatan pendapatan masyarakat secara umum.

Pada triwulan I 2024, terdapat peningkatan kontribusi PK-LNPRT terhadap PDRB sebesar 2,5 persen poin jika dibandingkan kontribusi pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 1,70 persen. Lebih lanjut, kontribusi PK-LNPRT pada periode pelaporan juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 hingga 2023. Kinerja PK-LNPRT tumbuh signifikan sebesar 19,13 persen (yoy). Pertumbuhan PK-LNPRT didorong peningkatan berbagai kegiatan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat (ormas) selama bulan Ramadhan dan peningkatan kegiatan partai politik dalam masa kampanye Pemilu 2024. Aktivitas PK-LNPRT memiliki peran penting dalam perekonomian, sebagai mitra pemerintah. LNPRT melakukan serangkaian aktivitas ekonomis yang meliputi produksi, pengeluaran, dan investasi. Dalam aktivitas produksinya, LNPRT menghasilkan berbagai barang dan jasa, baik untuk konsumsi internal maupun untuk dijual dengan harga yang ekonomis. Aktivitas pengeluaran LNPRT mencakup konsumsi akhir, transfer ke institusi lain, dan pembentukan modal. Di samping aktivitas produksi dan konsumsi, LNPRT juga melakukan aktivitas investasi, menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian.

Dari komponen konsumsi pemerintah, pada triwulan I 2024 kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB sebesar 5,69 persen, meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang sebesar 5,25 persen dan triwulan I 2023 yang sebesar 5,05 persen. Namun, kontribusi ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 dan triwulan I 2021 yang masing-masing berkontribusi sebesar 5,82 persen dan 5,74 persen.

Pada triwulan I 2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 15,67% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah utamanya didorong dari realisasi belanja barang dan belanja pegawai di triwulan I 2024.

Dari sisi APBN, belanja barang yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 49,03 persen dari total

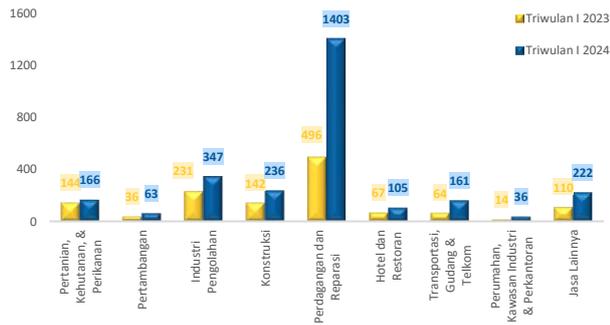
realisasi Belanja Pemerintah Pusat, telah terealisasi sebesar Rp2.399,63 miliar, tumbuh sebesar 56,36 persen (yoy). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada bulan Februari, termasuk biaya untuk pengadaan logistik, barang/jasa dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara, pembayaran honor Badan AdHoc termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pengawasan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, belanja pegawai yang merupakan komponen kedua terbesar, mencatat realisasi sebesar Rp1.058,54 miliar dengan pertumbuhan 42,50 persen (yoy), yang diantaranya digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Dari sisi APBD, belanja barang dan jasa tercatat tumbuh 14,02 persen (yoy) dengan capaian realisasi sebesar Rp855,87 miliar atau 10,42% dari pagu. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa APBD pada triwulan I 2023 yang sebesar Rp750,64 miliar atau 8,47 persen dari pagu. Lebih lanjut, peningkatan realisasi belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan yakni sebesar 4,59 persen (yoy). Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah APBD Lampung tumbuh 11,29 persen (yoy). Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai belanja pemerintah, dapat ditemukan pada Bab II Analisis Fiskal Regional.

Pada Triwulan I tahun 2024, kontribusi PMTB terhadap PDRB Lampung mencatat penurunan sebesar 0,75 persen poin dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2023, yang tercatat sebesar 32,97 persen. Meskipun demikian, kinerja PMTB pada Triwulan I tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,31 persen (yoy), meskipun menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan I tahun 2023 yang sebesar 2,33 persen (yoy), sehingga tidak bisa melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan pada periode triwulan I sejak tahun 2020 hingga 2023. Hal tersebut sejalan dengan pola historis dimana investor cenderung *wait and see* pada periode pemilu.

Pada triwulan I 2023, investasi di Provinsi Lampung mencapai 2.739 proyek meningkat sebesar 110,05 persen (*yoy*) dibandingkan dengan triwulan I 2023. Sektor yang menunjukkan peningkatan tertinggi adalah perdagangan dan reparasi, dengan pertumbuhan sebesar 182,86 persen (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 1.5.

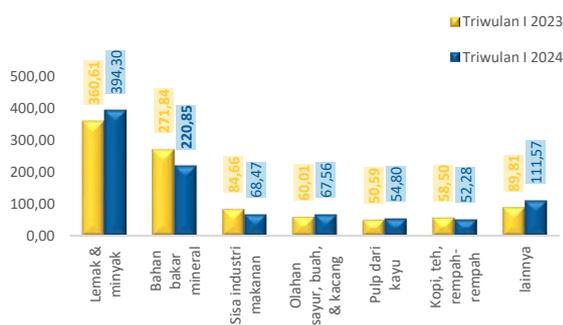
Grafik 1.5. Pertumbuhan Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan I 2024



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Kontribusi ekspor terhadap PDRB Triwulan I 2024 sebesar 52,87 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen poin dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 50,65 persen. Kinerja ekspor Provinsi Lampung triwulan I 2024 tumbuh, sebesar 6,10 persen (*yoy*), melemah dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang tumbuh sebesar 10,11 persen (*yoy*).

Grafik 1.6. Ekspor Luar Negeri Lampung Berdasarkan Golongan Barang (Juta USD)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Dari sisi ekspor luar negeri, berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, ekspor luar negeri Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 969,83 juta USD atau berkontraksi 0,63 persen (*yoy*). Penurunan ekspor luar negeri Lampung triwulan I 2024

disebabkan oleh menurunnya kinerja sebagian besar golongan barang.

Dilihat dari kontribusinya, lemak dan minyak hewan/nabati; bahan bakar mineral (batu bara); Ampas/sisa industri makanan menjadi komoditas ekspor luar negeri utama Provinsi Lampung dengan besarnya kontribusi masing-masing sebesar 40,66 persen; 22,77 persen; dan 7,06 persen. Pada triwulan I 2024 bahan bakar mineral, ampas/sisa industri makanan, dan kopi, teh, rempah-rempah mengalami penurunan ekspor.

Ekspor baru batu bara Lampung triwulan I 2024 mengalami kontraksi 18,76 persen (*yoy*). Perubahan arus perdagangan batu bara dunia menekan kinerja ekspor batu bara. Tekanan permintaan batu bara Indonesia dipengaruhi dengan mulai masuknya batu bara Rusia ke pasar global. Kembalinya Rusia ke pasar baru batu bara global mendorong peningkatan pasokan baru batu bara global sehingga rendahnya level harga acuan batu bara dunia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendorong peningkatan ekspor dari Lampung. Pada triwulan I 2024, Kanwil DJBC Sumbagbar telah menyelenggarakan kegiatan *Focus Grup Discussion* (FGD) asistensi Ekspor ke Australia secara *hybrid*, bekerja sama dengan *Atase* Perdagangan Canberra, dan ditujukan kepada UMKM di Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM di Provinsi Lampung, khususnya dalam bidang ekspor, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di Provinsi Lampung, dan mendorong UMKM Lampung untuk berani bersaing di kancah internasional. Selain itu, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat telah secara aktif memberikan asistensi kepada pengusaha UMKM di Provinsi Lampung sehingga berhasil mendorong ekspor ke Singapura. Kanwil DJBC Sumbagbar juga melakukan pendampingan dalam rangka pencanangan desa devisa untuk UMKM yang bergerak di bidang komoditas pisang, kopi, dan madu.

Kontribusi impor Lampung triwulan I 2024 sebesar 58,87 persen, mengalami kenaikan sebesar 4,37

persen poin dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 54,50 persen. Pada triwulan I 2024, kinerja impor Lampung tumbuh sebesar 8,75 persen (*yoy*), menguat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,10 persen (*yoy*). Impor bahan baku dan penolong triwulan I 2024 mencapai 491,86 juta USD, menunjukkan peningkatan sebesar 13,36 persen (*yoy*). Peningkatan juga terjadi pada impor barang konsumsi yang mencapai 55,12 juta USD atau meningkat sebesar 113,05 persen (*yoy*).

1.1.1.1.3. Analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto Sisi Lapangan Usaha

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB ADHB

terbesar di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024. Kontribusi sektor ini mencapai Rp26.652,73 miliar atau 23,78 persen dari total PDRB di triwulan I 2024, sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.2. Kontributor terbesar selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan; yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,92 persen dan 14,66 persen dari total PDRB di triwulan I 2024. Total kontribusi ketiga sektor tersebut lebih dari setengah total PDRB atau sebesar 57,36 persen. Dari ketiga *leading sector* tersebut, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 10,97 persen (*yoy*), sementara sektor Industri Pengolahan tumbuh 6,51 persen (*yoy*) dan sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh 8,58 persen (*yoy*).

Tabel 1.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024

Lapangan Usaha	Triwulan I 2020			Triwulan I 2021			Triwulan I 2022			Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY	Distribusi	Growth QtQ	Growth YoY
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,67	20,77	-2,66	28,75	17,94	-2,05	28,31	15,15	-0,35	26,95	8,01	-0,56	23,78	-3,45	-10,97
Pertambangan dan Penggalian	5,17	-2,07	-2,45	5,65	0,07	-6,44	6,05	-3,44	-4,86	5,41	-2,5	-1,23	5,69	0,44	11,55
Industri Pengolahan	18,85	-6,65	1,41	19,69	-6,25	1,72	18,75	-9,05	-0,88	18,15	-0,39	2,97	18,92	3,07	6,51
Pengadaan Listrik, Gas	0,16	-0,8	3,52	0,14	-3,26	-12,4	0,14	-4,18	7,1	0,13	-2,94	4,12	0,1	-12,57	-16,9
Pengadaan Air	0,1	0,62	4,8	0,11	-0,15	4,36	0,11	0,09	9,82	0,1	0,18	-0,12	0,1	-2,41	-3,27
Konstruksi	9,25	-8,21	3,95	10,11	0,02	5,54	10,23	-0,39	5,04	9,81	-2	0,94	9,91	-9,06	6,86
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11,88	1,61	2,71	11,46	5,57	-6,33	12,55	2,87	13,82	14,03	0,06	14,29	14,66	0,45	8,58
Transportasi dan Pergudangan	5,36	-0,27	7,25	4,72	-2,16	-14,49	5,31	-0,09	17,74	7,15	-1,07	25,04	7,64	-0,69	11,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,68	-1,02	9,87	1,49	-0,54	-12,68	1,51	-0,22	8,64	1,59	-0,63	14,37	1,63	-3,01	7,16
Informasi dan Komunikasi	4,04	0,2	6,65	4,3	-0,1	8,15	3,87	-2,27	-2,55	3,96	0,01	11,95	4,1	2,85	9,34
Jasa Keuangan	2,16	-0,82	6,71	2,27	-3,46	1,78	2,25	-0,63	1,48	2,07	6,09	-5	2,1	0,86	7,68
Real Estate	3,08	0,96	5,77	2,94	-0,04	-6,27	2,82	-5,32	2,27	2,62	-9,15	-0,51	2,74	-1,12	9,84
Jasa Perusahaan	0,15	1,51	3,59	0,15	-2,35	-7,46	0,16	3,32	15,01	0,16	-4,68	9,32	0,17	0,68	9,91
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,43	-0,93	3,94	3,24	-11,06	-7,05	2,98	-19,49	-1,12	2,97	-12,54	8,5	3,32	2,29	14,23
Jasa Pendidikan	3,02	0,27	7,16	3,02	-0,07	-1,61	2,96	-2,42	3,45	2,86	-0,58	3,16	3,01	-0,32	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1,7	7,7	1,06	-8,41	2,9	1,08	-2,02	9,25	0,98	-1,36	-2,94	0,99	-5,54	3,95
Jasa lainnya	1	2,61	10,78	0,92	0,07	-10,21	0,91	4,32	6,55	1,05	-2,66	22,16	1,13	-5,05	9,05
PDRB	100	2,84	1,71	100	3,07	-1,99	100	0,87	2,86	100	0,77	4,94	100	-1,24	3,3

Sumber: BPS (diolah)

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap total PDRB Lampung mengalami penurunan di triwulan I tahun 2020 hingga triwulan I 2024. Pada triwulan I 2024, sektor ini mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I di tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan turun sejak triwulan I 2022. Di sisi lain, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan terus mengalami peningkatan sejak tahun triwulan I tahun 2020 hingga 2023.

Pada triwulan I 2024, sektor Administrasi Pemerintahan dan Lainnya mengalami

pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 14,23 persen (*yoy*) dengan kontribusi sebesar 3,32 persen sebagaimana tampak pada grafik 1.7. Sementara itu, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan paling rendah dengan kontraksi sebesar 16,90 persen (*yoy*) dan kontribusi hanya sebesar 0,1 persen dari total PDRB Lampung, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontraksi sebesar 10,97 persen (*yoy*). Penjelasan rekapitulasi fenomena pertumbuhan berdasarkan sektor Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 1.3.

Grifik 1.7. Distribusi dan Pertumbuhan (yoy) PDRB menurut Lapangan Triwulan I 2024



Sumber: BPS (diolah)

Tabel 1.3. Rekapitulasi Fenomena Pertumbuhan (yoy) berdasarkan Sektor Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (yoy)	Fenomena
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-10,97%	Penurunan produksi padi akibat bergesernya musim tanam padi akibat El Nino, biasanya tanam mulai November, untuk saat ini tanam dimulai Desember, diperkirakan puncak panen pada bulan April dan Mei. Ditambah juga terjadi banjir di beberapa wilayah seperti Tulang Bawang dan Lampung Selatan yang menyebabkan lahan sawah puso. Tidak Terkontraksi terlalu dalam disebabkan Peningkatan produksi jagung, kedelai dan kacang tanah dan Peningkatan produksi pemotongan sapi baik di RPH/TPH maupun di luar RPH/TPH.
Pertambangan dan Pengegalian	11,55%	Peningkatan produksi minyak bumi dan gas bumi.
Industri Pengolahan	6,51%	Peningkatan industri makanan khususnya makanan ternak yang signifikan selaras dengan fenomena jagung impor sebanyak 16.873 ton diterima oleh Provinsi Lampung. Selain itu, terjadi peningkatan kinerja industri makan-minum dan industri percetakan selama masa kampanye.
Pengadaan Listrik, Gas	-16,9%	Penurunan produksi gas kota.
Pengadaan Air	-3,27%	Penurunan volume produksi air bersih.
Konstruksi	6,86%	Peningkatan Indeks Nilai Konstruksi yang diselesaikan.
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58%	Tingkat konsumsi masyarakat meningkat selama menjelang dan masa Ramadhan dibanding tahun sebelumnya. Fenomena pendukung lainnya yakni Omzet pedagang buah meningkat saat Ramadhan.
Transportasi dan Pergudangan	11,46%	Peningkatan barang dan penumpang Kereta Api, Kapal, Pesawat; Peningkatan jumlah penumpang dan barang disebabkan adanya maskapai baru yang telah beroperasi. Ada penambahan rute baru Lampung-Bali tanpa transit oleh AirAsia sebanyak 4x penerbangan dalam seminggu; Lion Air Buka Rute Lampung-Yogyakarta-Bali PP mulai Januari 2024; Penerbangan Perintis Bandara Radin Inten-Krui(Pesisir Barat-Lampung)-Bengkulu Resmi dibuka Maret 2024 menggunakan pesawat Susi Air dengan kapasitas 12 orang penumpang.
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,16%	Peningkatan penyedia makan minum dalam festival-festival yang diadakan seperti Festival Pasar Takjil Lampung selama bulan Ramadhan, festival kuliner Lantern Night Festival, festival kuliner Lampung Festival jilid I dan II; dan Peresmian Restoran/tempat makan/cafe baru seperti Rojo Sambel Si Aa (Raffi Ahmad), D'Rajash Resto, Gen X Coffee & Space (Kalamo Pulau Pasaran).
Informasi dan Komunikasi	9,34%	Peningkatan konsumsi pulsa Rumah Tangga.
Jasa Keuangan	7,68%	Peningkatan Provisi/Komis, dan pendapatan sekunder bank umum; dan Peningkatan simpanan bank dan kredit UMKM.
Real Estate	9,84%	Peningkatan penyewaan tenant pada mall dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Jasa Perusahaan	9,91%	Peningkatan aktivitas perjalanan umroh dan bimbingan haji; dan Peresmian Rumah Sakit Hewan Pertama di Provinsi Lampung, yaitu di Kota Metro, sehingga terjadi peningkatan aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan baik hewan ternak maupun hewan piaraan.
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,32%	Peningkatan jumlah siswa negeri dan swasta baik SMP maupun SMA; dan Peningkatan realisasi APBN Belanja Pegawai Fungsi Jasa Pendidikan.
Jasa Pendidikan	3,73%	Peningkatan jumlah siswa negeri dan swasta baik SMP maupun SMA; dan Peningkatan realisasi APBN Belanja Pegawai Fungsi Jasa Pendidikan.
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,95%	Peningkatan realisasi belanja pegawai fungsi jasa kesehatan.
Jasa lainnya	9,05%	Peningkatan kunjungan tempat wisata di Lampung pada bulan Februari karena ada libur panjang Imlek dan pemilu 2024, dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya ada libur tahun baru; Peningkatan Permintaan reparasi rumah tangga; dan Peningkatan sejalan dengan banyaknya wahana destinasi wisata baru.

Sumber: BPS (diolah)



Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor potensial yang ada di Lampung karena sektor ini tergolong dalam sektor maju namun tertekan. Dari sisi ekonomi, sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Lampung dalam kurun waktu empat tahun terakhir (triwulan I 2020 hingga triwulan I 2024), meskipun porsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, terkontraksinya laju pertumbuhan sektor ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Lampung secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dihadapkan pada tantangan *climate change*. El Nino menyebabkan produktivitas beberapa komoditas pertanian mengalami penurunan. Akibatnya, terjadi pergeseran musim di triwulan I 2024 sehingga panen raya produk pertanian bergeser terjadi di triwulan II 2024 ke depan.

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Lampung mengalami pergeseran ke sektor tersier. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi Lampung sebanyak 1.371.783 unit atau turun 3,44 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 1.420.607 unit.

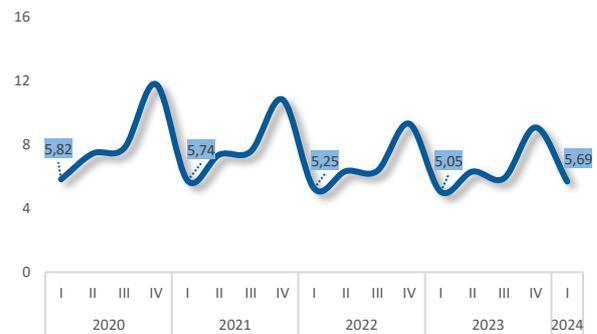
Perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat besar dimana salah satu misi dalam RPJMD 2019-2024 adalah membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dengan program strategis diantaranya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan.

1.1.1.1.4. Kontribusi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pembentukan PDRB

Pada triwulan I 2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 15,67% (*yoy*), meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 3,01% (*yoy*). Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah sejalan dengan peningkatan pada realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan

sosial. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, kontribusi konsumsi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen. Perkembangan Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB setiap Triwulan dapat dilihat pada grafik 1.8.

Grafik 1.8. Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembentukan PDRB per Triwulan Tahun 2020-2024 (Persen)



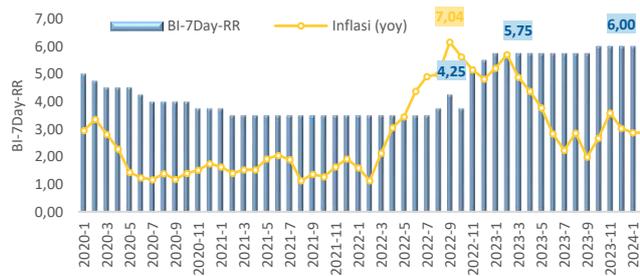
Pola fluktuasi kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB setiap tahun menunjukkan konsistensi, dengan peningkatan yang signifikan pada periode triwulan IV, sedangkan pada triwulan I terjadi tren penurunan dan akan kembali meningkat pada triwulan II. Hal ini sejalan dengan pola realisasi belanja APBN dan APBD yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

1.1.2. Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Dengan menetapkan suku bunga acuan yang sesuai dengan tingkat inflasi, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku kreditur dan debitur. Suku bunga yang tinggi akan menekan permintaan kredit dan mendorong tabungan, sehingga mengurangi uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan memperlambat ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi tabungan, sehingga menambah uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan mempercepat ekonomi. Bank Indonesia (BI) juga memiliki kebijakan makroprudensial yang berorientasi pada pertumbuhan sehingga akan terus mendorong penyaluran kredit meskipun suku

bunga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, BI memberikan insentif kepada lembaga perbankan yang menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas. Dalam menetapkan suku bunga acuan, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 1.9. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate dan Inflasi Lampung Tahun 2020 – Triwulan I Tahun 2024



Sumber: Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Pada tahun 2020 – Triwulan IV 2023 suku bunga acuan sebesar tertinggi sebesar 5,75 persen, sementara di triwulan III 2023 sampai triwulan I 2024 suku bunga acuan meningkat sebesar 6,00 persen. Suku bunga acuan dipertahankan pada level 6,00 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen sepanjang tahun 2024. Fokus kebijakan moneter melalui suku bunga acuan terus diarahkan untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil, agar harga barang-barang impor dari luar negeri tidak naik terlalu tinggi (*imported inflation*), serta untuk menghadapi risiko pasar keuangan global yang masih penuh ketidakpastian, yang menyimpan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan regional.

1.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, sementara penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu disebut deflasi. Pada tahun 2024, perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung dilakukan pada empat wilayah yakni Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Pada periode sebelumnya hanya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang menjadi dasar perhitungan IHK Provinsi Lampung. Hal ini

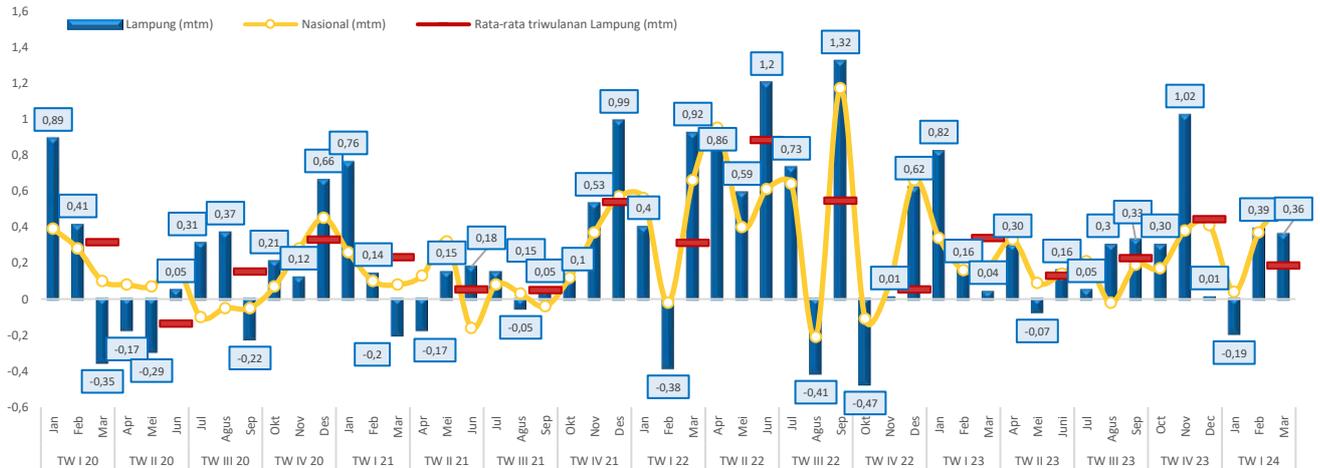
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren inflasi di Provinsi Lampung yang dihitung berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji dipilih untuk mewakili daerah perdesaan di Provinsi Lampung, dikarenakan dari hasil Survei Potensi Desa (PODES) tahun 2021, Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji memiliki komposisi daerah perdesaan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Lampung.

1.1.3.1. Inflasi Bulanan

Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – triwulan I 2024 dapat dilihat pada grafik 1.10. Rata-rata Inflasi Lampung pada triwulan I 2024 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (*mtm*), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 0,44 persen (*mtm*) dan inflasi triwulan I 2020, triwulan I 2021, triwulan I 2022, dan triwulan I 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 0,32 persen (*mtm*), 0,23 persen (*mtm*), 0,31 persen (*mtm*), dan 0,34 persen (*mtm*). Rata-rata inflasi Lampung pada triwulan I 2024 secara bulanan juga lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi nasional triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 0,31 persen (*mtm*).

Sepanjang periode tahun 2020 hingga triwulan I 2024, tekanan inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan September 2022 yaitu sebesar 1,32 persen (*mtm*) dengan andil atau porsi inflasi tertinggi berasal dari kelompok transportasi (*administered price*) sebesar 0,96 persen (*mtm*). Lebih lanjut, komoditas dengan andil inflasi tertinggi yaitu berasal dari bensin dengan andil sebesar 0,81 persen (*mtm*). Artinya, bensin menyumbang sebesar 0,81 persen (*mtm*) dari porsi inflasi bulanan periode September 2022 yang sebesar 1,32 persen (*mtm*). Pada triwulan I 2024, inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2024 yaitu sebesar 0,39 persen (*mtm*) dengan andil inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 0,39 persen (*mtm*) sebagaimana tampak pada tabel 1.4. Sementara itu, di bulan Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,19 persen (*mtm*).

Grafik 1.10. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan I 2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

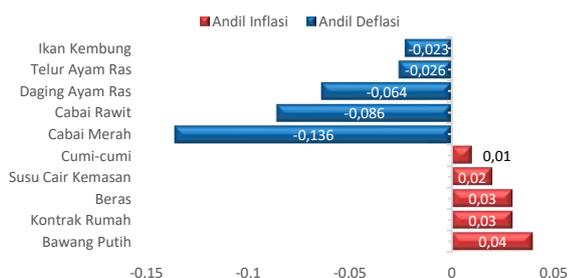
Tabel 1.4. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan I 2024 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Jan-24		Feb-24		Mar-24	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi
Umum	-0,19	-0,19	0,39	0,39	0,36	0,36
Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,21	-0,63	0,39	1,16	0,28	0,86
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,31	0,01	0,18	0,05	0,78
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah	0,04	0,28	0,00	-0,03	0,00	0,02
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,01	-0,16	-0,01	-0,13	-0,01	-0,14
Kesehatan	0,00	0,03	0,01	0,34	-0,01	-0,37
Transportasi	-0,04	-0,38	-0,01	-0,07	0,01	0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,05
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,02	0,01	0,67	0,02	0,92
Pendidikan	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,00	0,05	0,00	0,01	0,02	0,02
	0,01	0,09	-0,01	-0,11	0,00	-0,02

Sumber: BPS (diolah)

Pada Januari 2024, secara *mtm* Lampung mengalami deflasi sebesar 0,19 persen (*mtm*) sedangkan nasional mengalami inflasi sebesar 0,04 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil deflasi *mtm* pada periode ini yaitu Cabai Merah, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, dan Ikan Kembang sebagaimana tampak pada grafik 1.11.

Grafik 1.11. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Januari 2024 (mtm)



Sumber: BPS (diolah)

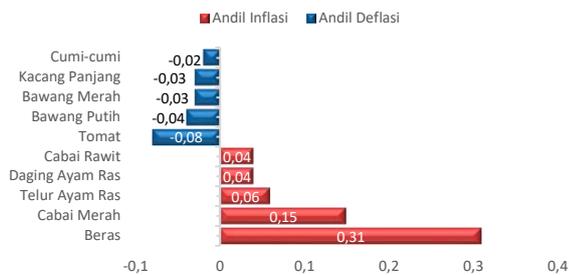
Penurunan harga aneka cabai disebabkan oleh sudah normalnya pasokan dari luar daerah maupun dari dalam Provinsi Lampung. Harga daging ayam ras menurun karena masuknya ayam afkir (ayam petelur yang sudah tidak produktif) ke pasaran, sedangkan telur ayam ras terjadi penurunan harga dikarenakan harga kembali normal setelah bulan lalu harga naik akibat Nataru. Untuk komoditas ikan kembang, pasokan telah kembali normal dan harga telah stabil.

Di sisi lain masih terdapat komoditas yang mengalami inflasi, beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *mtm* pada periode ini yaitu Bawang Putih, Kontrak Rumah, Beras, Susu Cair Kemasan, dan Cumi-cumi. Kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh peningkatan harga di tingkat produsen internasional, karena sebagian besar importir masih menunggu penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Biaya kontrak rumah naik disebabkan pergantian perjanjian kontrak setelah habis masa kontrak. Harga beras naik disebabkan belum adanya panen di tingkat petani. Harga susu cair kemasan mengalami kenaikan sebagai strategi pemasaran. Komoditi cumi-cumi mengalami kenaikan disebabkan tangkapan cumi-cumi ditingkat nelayan sedikit dikarenakan cuaca yang kurang baik.

Pada Februari 2024, secara *mtm* Lampung mengalami inflasi sebesar 0,39 persen (*mtm*) lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 0,37 persen

(*mtm*) dan lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan Februari pada empat tahun terakhir yang tercatat 0,08 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi *mtm* pada Februari 2024 adalah Beras, Cabai Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, dan Cabai Rawit sebagaimana tampak pada grafik 1.12.

Grafik 1.12. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Februari 2024 (*mtm*)



Sumber: BPS (diolah)

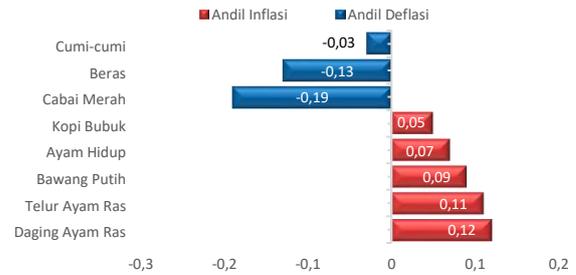
Peningkatan harga beras didorong oleh penurunan pasokan sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino pada tahun 2023 yang berimplikasi pada mundurnya masa panen. Di samping itu, kelangkaan stok beras di sejumlah pasar modern turut memengaruhi kenaikan harga beras. Kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh penurunan pasokan di sejumlah wilayah sentra produksi (Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, dan Pringsewu) akibat serangan jamur dan hama pada saat musim hujan. Kenaikan harga telur dan daging ayam ras dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak, dimana harga jagung untuk peternak di Lampung pada Februari terpantau meningkat menjadi Rp6.729 dari Rp6.537 pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang berhasil menahan inflasi yang lebih tinggi dengan kontribusi deflasi *mtm* yang dominan yaitu Tomat, Bawang Putih, Bawang Merah, Kacang Panjang, dan Cumi-cumi. Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan pada periode panen di beberapa sentra produksi di tengah permintaan yang stabil dan kenaikan kuota impor khusus bawang putih menjelang HBKN Ramadhan.

Pada Maret 2024, secara *mtm* Lampung mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (*mtm*) lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 0,52 persen (*mtm*),

namun lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan Maret pada empat tahun terakhir yang tercatat 0,10 persen (*mtm*). Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi *mtm* pada Maret 2024 adalah Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Ayam Hidup, dan Kopi Bubuk sebagaimana tampak pada grafik 1.13.

Grafik 1.13. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan Maret 2024 (*mtm*)



Sumber: BPS (diolah)

Kenaikan harga daging ayam ras, ayam hidup, dan telur ayam ras akibat menjelang hari raya Idul Fitri sehingga permintaan meningkat. Bawang putih juga mengalami kenaikan disebabkan harga bawang putih di Cina naik dan Cina merupakan sumber utama impor bawang putih. Harga kopi bubuk mengalami kenaikan disebabkan naiknya bahan baku (kopi biji) kopi di tingkat petani.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang berhasil menahan inflasi yang lebih tinggi dengan kontribusi deflasi *mtm* yang dominan, antara lain Cabai Merah, Beras, dan Cumi-cumi. Penurunan harga cumi-cumi di pasaran dapat diatribusikan akibat melimpahnya hasil tangkapan cumi-cumi dan ikan lainnya, sementara permintaan cumi-cumi mengalami penurunan. Demikian pula, terjadi penurunan pada komoditas beras, yang disebabkan beberapa daerah telah memasuki musim panen, setelah sebelumnya harga beras mengalami lonjakan yang signifikan. Sama halnya dengan harga cabai merah yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulainya musim panen cabai di pusat-pusat produksi cabai merah.

Rata-rata andil inflasi tertinggi triwulan I 2024 berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu sebesar 0,15 persen (*mtm*) dengan rata-rata inflasi sebesar 0,46 persen (*mtm*). Angka yang sangat signifikan dari rata-rata andil inflasi secara umum sebesar 0,19 (*mtm*), sementara 0,15

persen (*mtm*) inflasi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau khususnya pada komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Tabel 1.5. Inflasi Bulanan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan I 2024

Wilayah	Jan-24	Feb-24	Mar-24
	Inflasi <i>mtm</i> (%)	Inflasi <i>mtm</i> (%)	Inflasi <i>mtm</i> (%)
Kabupaten Lampung Timur	-0,01	0,25	0,60
Kabupaten Mesuji	0,04	0,25	0,75
Kota Bandar Lampung	-0,28	0,46	0,17
Kota Metro	-0,31	0,58	0,62

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan wilayahnya di Lampung, rata-rata inflasi *mtm* tertinggi pada triwulan I 2024 terjadi pada Kabupaten Mesuji dengan rata-rata sebesar 0,35 persen (*mtm*) kemudian disusul oleh Kota Metro sebesar 0,30 persen (*mtm*), Kabupaten Lampung Timur 0,28 persen (*mtm*), dan Kota Bandar Lampung 0,12 persen (*mtm*). Inflasi *mtm* di Kabupaten/Kota yang menjadi dasar perhitungan inflasi didominasi inflasi dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya dari komoditas daging ayam dan telur ayam ras.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di regional Lampung adalah kesediaan stok komoditas. Penting untuk mengidentifikasi komoditas yang rentan terhadap inflasi. Hal ini dilakukan sebagai *early warning* terhadap kenaikan harga, Jika inflasi terjadi pada komoditas bahan pokok, maka dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat lapisan bawah.

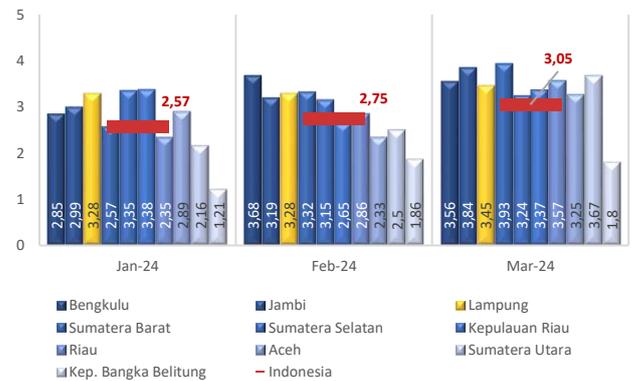
1.1.3.2. Inflasi Tahunan

Inflasi di Lampung Maret 2024 mencapai 3,45 persen (*yoy*), lebih rendah sedikit dibandingkan Desember 2023 yang tercatat sebesar 3,47 persen (*yoy*), tetapi masih di atas inflasi nasional Maret yang tercatat sebesar 3,05 persen (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 1.14.

Rata-rata capaian inflasi Lampung pada triwulan I 2024 mencatatkan Lampung sebagai Provinsi

dengan inflasi tertinggi ke tiga di Sumatera dengan rata-rata capaian inflasi sebesar 3,34 persen (*yoy*) dan berada di atas tingkat inflasi nasional. Namun demikian, capaian ini masih berada dalam level sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen (*yoy*) dan diharapkan tetap terjaga sepanjang tahun 2024.

Grafik 1.14. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (*yoy*)

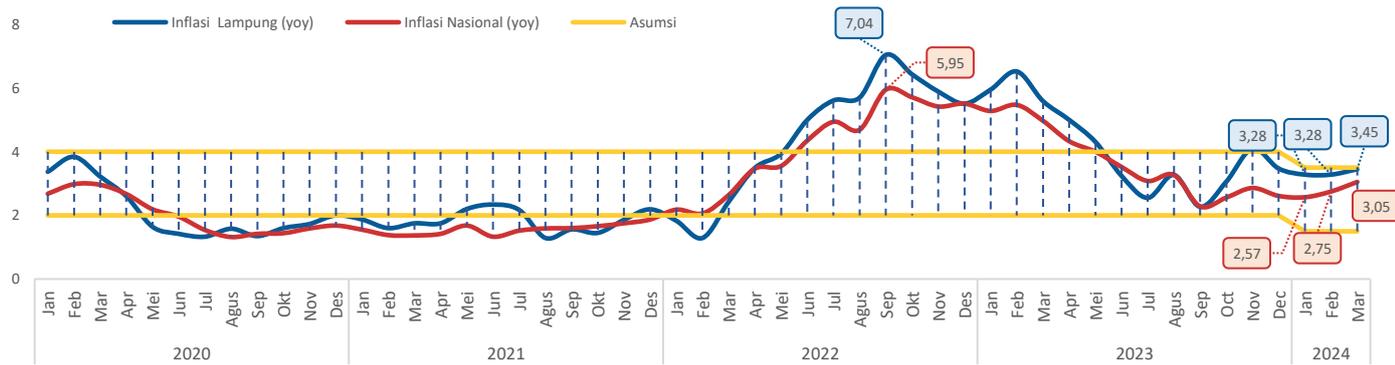


Sumber: BPS (diolah)

Pada triwulan I 2024, provinsi di Regional Sumatera dan nasional rata-rata mengalami Inflasi tertinggi pada bulan Maret 2024. Berdasarkan data inflasi tahun 2020 hingga triwulan I 2024, lonjakan inflasi yang tinggi terjadi di tahun 2022, secara umum inflasi di tahun 2022 dipengaruhi oleh tekanan harga global, kebijakan pengalihan subsidi BBM, selain itu juga meningkatnya permintaan masyarakat pasca pemulihan kondisi Pandemi Covid-19.

Inflasi Lampung dan Nasional kembali berada pada level sasaran inflasi 3±1 persen pada Juni 2023 sebagaimana tampak pada grafik 1.15 dan bertahan sampai dengan Desember 2023 meskipun pada bulan November 2023 inflasi Lampung sempat berada diatas level sasaran inflasi 3±1 persen yakni sebesar 4,10 persen (*yoy*). Pada tahun 2024, terjadi perubahan level sasaran inflasi yang sebesar 2,5±1 persen (*yoy*). Capaian inflasi yang baik karena sepanjang triwulan I 2024 inflasi Lampung dan nasional konsisten berada dalam level sasaran.

Grafik 1.15. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – Triwulan I 2024



Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Tabel 1.6. Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung triwulan I 2024

Wilayah	Jan-24	Feb-24	Mar-24
	Inflasi yoy (%)	Inflasi yoy (%)	Inflasi yoy (%)
Kabupaten Lampung Timur	5,39	4,53	4,83
Kabupaten Mesuji	4,07	4,19	4,52
Kota Bandar Lampung	2,35	2,69	2,72
Kota Metro	1,99	2,37	3,21

Sumber: BPS (diolah)

Secara spasial, Inflasi tahunan Kabupaten di Lampung pada triwulan I 2024 di atas angka 4-5 persen (yoy) sementara untuk Kota di Lampung pada triwulan I 2024 di atas angka 2-3 persen (yoy) sebagaimana tampak pada tabel 1.6.

Tabel 1.7. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Triwulan I 2024 (Persen)

Kelompok Pengeluaran	Jan-24		Feb-24		Mar-24	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi
Umum	3,28	3,28	3,28	3,28	3,45	3,45
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,39	7,49	2,41	7,53	2,64	8,23
Pakaian dan Alas Kaki	0,25	3,84	0,24	3,70	0,24	3,71
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	0,10	0,83	0,11	0,82	0,10	0,77
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,05	0,92	0,05	0,78	0,02	0,35
Kesehatan	0,02	0,88	0,03	1,22	0,03	1,20
Transportasi	0,09	0,78	0,06	0,56	0,03	0,28
Informasi, Komunikasi, dan Jasa	0,00	-0,07	-0,01	-0,13	-0,01	-0,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	-0,22	0,01	0,45	0,02	1,17
Pendidikan	0,18	2,73	0,18	2,73	0,18	2,73
Penyediaan Makanan dan	0,07	0,90	0,08	0,91	0,08	0,93
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,13	2,03	0,12	1,92	0,12	1,97

Sumber: BPS (diolah)

Inflasi Provinsi Lampung pada periode triwulan I 2024 (Januari, Februari, dan Maret) tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau kemudian disusul kelompok Pakaian dan Alas Kaki dan kelompok pendidikan sebagaimana tampak pada tabel 1.17.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Di Provinsi Lampung kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terpantau pada triwulan I 2024

mengalami peningkatan tekanan inflasi di atas 7 persen (yoy) dan andil/sumbangan inflasi di atas 2 persen (yoy). Subkelompok yang mengalami inflasi yoy tertinggi yaitu subkelompok makanan. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy pada Januari yaitu beras 0,95 persen (yoy), bawang putih 0,34 persen (yoy), dan tomat 0,13 persen (yoy); Februari yaitu beras 1,13 persen (yoy), cabai merah 0,20 persen (yoy), dan bawang putih 0,26 persen (yoy); Maret yaitu beras 1,01 persen (yoy), bawang putih 0,22 persen (yoy), dan daging ayam ras 0,17 persen (yoy). Dapat disimpulkan bahwa tekanan inflasi triwulan I 2024 didominasi oleh komoditas beras.

Grafik 1.16. Perkembangan Harga Beras di Provinsi Lampung



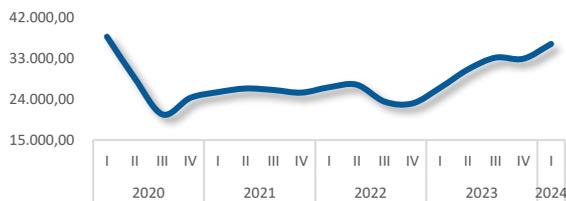
Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (diolah)

Tekanan inflasi pada beras secara yoy disebabkan berkurangnya jumlah produksi beras akibat dampak dari *climate change* yaitu El Nino di tahun 2023 sehingga mundurnya masa tanam. Jika masa tanam beras terganggu akibat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, produksi beras dapat menurun, sehingga mempengaruhi harga beras. Berdasarkan grafik 1.16 yang menunjukkan tren perkembangan harga beras di Lampung, lonjakan harga beras di Lampung terjadi di tahun 2023 hingga triwulan I 2024 masih berlanjut. Panen raya akan berlangsung

pada triwulan II 2024 dan diharapkan harga beras akan kembali stabil.

Bawang putih mengalami kenaikan disebabkan harga bawang putih di Cina mengalami kenaikan karena Cina merupakan sumber utama impor bawang putih Lampung. Berdasarkan grafik 1.17 yang menunjukkan perkembangan harga bawang putih di Provinsi Lampung, pada triwulan I 2024 menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2020 hingga triwulan IV 2023.

Grafik 1.17. Perkembangan Harga Bawang Putih di Provinsi Lampung



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (diolah)

Tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi, Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi *yoy* pada Januari yaitu bawang merah 0,12 persen (*yoy*), cabai rawit 0,09 persen (*yoy*), dan minyak goreng 0,03 persen (*yoy*); Februari yaitu bawang merah 0,22 persen (*yoy*), minyak goreng 0,06 persen (*yoy*), dan kacang panjang 0,03 persen (*yoy*); Maret yaitu bawang merah 0,10 persen (*yoy*), minyak goreng 0,04 persen (*yoy*), dan cumi-cumi 0,04 persen (*yoy*). Inflasi triwulan I 2024 dominan tertahan oleh bawang merah dan minyak goreng. Penurunan harga minyak goreng didorong pemenuhan *Domestik Market Obligation* (DMO) untuk *Crude Palm Oil* (CPO) yang berjalan semakin baik di tengah melandainya tekanan harga CPO dunia. Penurunan harga bawang merah didorong panen di daerah sentra produksi seperti di Lampung Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan komoditas bawang merah khususnya di daerah Ketapang Lampung Selatan dan di Ambarawa Pringsewu.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki juga memiliki peran menyumbang inflasi di Provinsi Lampung. Pada triwulan I 2024 kelompok ini mengalami tekanan

inflasi di atas 3 persen (*yoy*) dengan andil/sumbangan inflasi di kisaran 0,2 persen (*yoy*). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *yoy* pada Januari yaitu celana panjang jeans pria, kerudung/jilbab, sepatu anak, dan baju anak setelan masing-masing sebesar 0,02 persen (*yoy*); Februari dan yaitu celana panjang jeans pria sebesar 0,03 persen; Maret yaitu beras 1,01 persen (*yoy*). Kelompok pakaian dan alas kaki tetap perlu diperhatikan dalam mengelola stabilitas harga dan inflasi di Lampung.

Kelompok Pendidikan

Di Provinsi Lampung kelompok Pendidikan terpantau pada Maret 2024 mengalami peningkatan tekanan inflasi sebesar 2,73 persen (*yoy*) dan andil/sumbangan inflasi 1,8 persen (*yoy*). Kenaikan harga disumbang oleh kenaikan biaya sekolah menengah atas sebesar 0,06 persen (*yoy*) dan perguruan tinggi sebesar 0,04 persen (*yoy*). Inflasi sektor Pendidikan Maret 2024 terjadi akibat dampak kenaikan inflasi pada periode bulan Juli hingga September 2023 yang merupakan periode dimulainya tahun ajaran baru. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan periode Maret 2023 maka terjadi kenaikan biaya di sektor pendidikan.

1.1.3.3. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga inflasi di Lampung berada pada level sasaran $2,5 \pm 1$ persen di tahun 2024, adapun beberapa langkah yang telah dilakukan dan opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Regional Lampung dan *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

- Bank Indonesia terus memperkuat operasi moneter melalui kenaikan BI *7-day Repo Rate* atau suku bunga acuan. Suku bunga acuan dipertahankan pada level 6,00 persen di triwulan I 2024. Hal ini dilakukan sebagai langkah *front loaded*, *preemptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi memastikan inflasi tetap pada level sasaran.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan inflasi. Adapun

strategi yang digunakan yakni strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

- i. Ketersediaan Pasokan: TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi pasokan dan menjaga disparitas pasokan dan harga antar wilayah. Dengan memperluas Kerja sama antar daerah, TPID dapat mengoptimalkan distribusi barang dan jasa serta mengurangi ketidakseimbangan harga. Hilirisasi dan kerja sama dengan mitra ataupun *off taker* terus ditingkatkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Meningkatkan produksi komoditas non basis yang sensitif inflasi untuk memenuhi pasokan lokal, seperti aneka cabai dan aneka bawang. Selain itu, melanjutkan perluasan akseptasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dan perluasan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian dan UMKM;
- ii. Keterjangkauan Harga: melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) (<https://www.bi.go.id/hargapangan>) untuk melihat perkembangan harga terkini dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan operasi pasar, hingga pasar murah. Selanjutnya, pemberian bantuan sosial dan subsidi juga dapat didorong untuk memastikan keterjangkauan harga;
- iii. Kelancaran Distribusi: TPID dan Satgas Pangan dapat mendorong kemitraan industri dengan petani melalui inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Melakukan penguatan dan perluasan KAD dengan mendorong kerja sama perdagangan antar Daerah, terutama antar BUMD. Selain itu, memastikan kelancaran transportasi dengan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas, peningkatan frekuensi penerbangan, dan optimalisasi pelabuhan Panjang untuk menyebar kepadatan di pelabuhan Bakauheni. Program unggulan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2024, yakni bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penjamin suplai komoditas strategis atau *stand by buyer*;

- iv. Komunikasi yang efektif: Penguatan koordinasi antara TPID dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Selain itu, TPID melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan harga pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah sebagai *early warning* yang akurat untuk memantau denyut perekonomian daerah. Peningkatan penyebarluasan informasi harga acuan pemerintah kepada pelaku usaha/pedagang komoditas perlu dimaksimalkan.
- c. Sebagai dampak El Nino yang terjadi di tahun 2023 sehingga menyebabkan musim tanam dan panen yang bergeser, pemerintah Lampung mengalokasikan lahan seluas 100 ribu hektar untuk percepatan tanam padi dan jagung pada 2024 yang dilakukan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pemerintah Lampung juga menyiapkan sarana sumur bor, pompa air, serta persiapan jaringan irigasi, dan ketersediaan pupuk agar bisa diperoleh dengan mudah.
- d. Tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau perlu dimitigasi dengan memperkuat kegiatan pencatatan dan diseminasi stok dan harga komoditas bahan pokok dan penting sebagai acuan bersama dalam pengendalian inflasi. Selain itu, penting untuk memitigasi perubahan iklim yang

menyebabkan pergeseran musim tanam dan musim panen hal ini penting untuk menjaga ketersediaan stok.

- e. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara hati-hati, mengurangi belanja yang inefisien atau tidak mendesak. Di samping itu, fokus pada proyek infrastruktur yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat membantu mengurangi inefisiensi anggaran dari segi alokasi sumber daya dan meningkatkan potensi distribusi pendapatan kepada masyarakat. Kedua prioritas tersebut dapat membantu mengalokasikan dana secara lebih efisien, dan mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh peningkatan belanja negara yang tidak produktif, dipadukan dengan perluasan basis pajak guna mengendalikan inflasi.
- f. Menggunakan data makro dan mikro serta data detail untuk mengidentifikasi sumber tekanan inflasi di Lampung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, maka dapat merancang langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikan inflasi.

1.1.4. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar dilakukan untuk mengetahui nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi

indikator ekonomi salah satunya yaitu Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung. Data Ekspor dan Impor Lampung dalam USD tersedia untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan I 2024, untuk tahun sebelumnya terdapat keterbatasan untuk pengambilan data.

Grafik 1.18. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan I 2024



Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Kurs Rupiah terhadap dolar di tahun 2022 s.d. 2023 berada di kisaran Rp14.335,24 s.d. Rp15.741,23 trennya dapat dilihat sebagaimana tampak pada grafik 1.18. Memasuki awal tahun 2024, di triwulan I 2024 nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap USD dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Tentunya hal ini berimplikasi pada peningkatan harga barang impor. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan moneter di berbagai negara (contohnya, kebijakan yang ditetapkan oleh The Fed yakni Lembaga keuangan Amerika Serikat yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia), dan ketidakpastian geopolitik (tekanan geopolitik Timur Tengah) turut berperan dalam fluktuasi nilai tukar mata uang.

Grafik 1.19. Tren Ekspor, Impor, Neraca Perdagangan Luar Negeri (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan I 2024



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)



Pada triwulan I 2024, total ekspor Lampung sebesar 969,83 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.659,59) turun 0,63 persen (*yoy*) dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 976,02 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp 15.240,65), tetapi meningkat 1,36% (*mtm*) dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 956,80 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.624,00).

Depresiasi nilai tukar tidak secara otomatis dan langsung berdampak pada peningkatan nilai ekspor Lampung. Kondisi depresiasi nilai tukar dapat berpotensi meningkatkan atau menurunkan nilai ekspor. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data volume, ekspor Lampung pada triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,09 persen (*yoy*) dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah permintaan dan fluktuasi harga komoditas di pasar global, yang juga memiliki peran penting dalam dinamika ekspor.

Dari sisi impor Lampung, sampai dengan triwulan I 2024 sebesar 551,44 juta USD naik 14,68 persen (*yoy*) dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 481,25 juta USD, tetapi menurun 34,05% (*mtm*) dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 836,16 juta USD.

Seperti halnya kondisi ekspor di Lampung, depresiasi nilai tukar tidak secara otomatis dan langsung berdampak pada penurunan nilai impor. Kondisi depresiasi nilai tukar dapat berpotensi meningkatkan atau menurunkan nilai impor. Berdasarkan volume, impor Lampung pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 99,82 persen (*yoy*) dibandingkan dengan triwulan I 2023.

Berdasarkan data impor dari perspektif penggunaannya, terlihat bahwa nilai tukar yang mengalami depresiasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya memberikan dampak yang signifikan terhadap impor barang-barang Modal. Pada triwulan I 2024, nilai impor barang modal mencapai 4,48 juta USD, mengalami penurunan sebesar 79,15 persen jika dibandingkan dengan triwulan I 2023. Penurunan impor barang modal dapat berdampak pada investasi di sektor-sektor yang memerlukan peralatan dan mesin impor. Sebagai dampak positif, perusahaan diharuskan untuk

mengandalkan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal.

Di sisi lain, terdapat peningkatan pada impor barang konsumsi dan bahan baku & penolong. Impor bahan baku dan penolong triwulan I 2024 mencapai 491,86 juta USD, menunjukkan peningkatan sebesar 13,36 persen (*yoy*). Begitu pula, impor barang konsumsi yang mencapai 55,12 juta USD atau meningkat sebesar 113,05 persen (*yoy*). Kenaikan impor bahan baku dan penolong menandakan masih terdapat dorongan dalam sektor industri dan investasi, meskipun terjadi penurunan pada impor barang modal.

Peningkatan impor barang konsumsi di tengah terdepresiasi nilai tukar rupiah mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Lampung masih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat. Lebih dari setengah ekonomi Lampung berasal dari Konsumsi Rumah Tangga, sehingga jika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi dapat melambat.

1.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

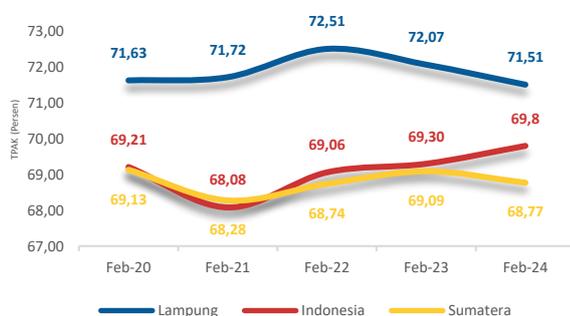
Pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pencapaian kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran; Nilai Tukar Petani (NTP); dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dalam konteks capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan gini rasio, data terkini hanya mencakup hingga tahun 2023. Informasi IPM Lampung Tahun 2024, tingkat kemiskinan Maret 2023, dan gini rasio Maret 2023 telah dijelaskan dalam Kajian Fiskal Regional Tahun 2023 Provinsi Lampung dan dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/KFRLampung>.

1.2.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada Februari 2024, ketenagakerjaan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada jumlah Angkatan Kerja maupun Bukan Angkatan Kerja. Jumlah Angkatan kerja di Lampung mencapai 5.044,04 ribu orang, meningkat sebanyak 40,90 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2023, atau sekitar 0,82 persen (*yoy*). Dari total Angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 4.836,33 ribu orang, mengalami peningkatan sebanyak 42,30 ribu orang atau 0,88 persen (*yoy*). Disisi lain jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi Lampung sebanyak 207,70 ribu orang, berkurang sebanyak 1,41 ribu orang atau sekitar 0,67 persen (*yoy*). Sementara itu, jumlah Bukan Angkatan Kerja di Lampung mencapai 2.009,54 ribu orang, meningkat sebanyak 70,70 ribu orang dibandingkan Februari 2023 atau sekitar 3,65 persen (*yoy*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK merupakan indikator yang dapat mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Grafik 1.20. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada bulan Februari 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung mencapai 71,51 persen. Angka ini lebih tinggi

daripada TPAK nasional yang tercatat sebesar 69,80 persen dan rata-rata TPAK di wilayah Sumatera yang mencapai 68,77 persen, sebagaimana terlihat pada grafik 1.20. Meskipun demikian, TPAK Lampung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga lebih rendah daripada TPAK sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2020). Penurunan TPAK Februari 2024 Lampung disebabkan oleh persentase kenaikan jumlah Bukan Angkatan Kerja yang lebih tinggi daripada persentase jumlah Angkatan Kerja. Di tingkat nasional, TPAK mengalami peningkatan, namun di rata-rata wilayah Sumatera, TPAK mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Salah satu aspek yang terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Jika kita membandingkan data antara Februari 2023 dan Februari 2024, terlihat bahwa TPAK pria di Lampung mengalami penurunan sebesar 0,62 persen poin (dari 88,39 persen pada Februari 2023 menjadi 87,76 persen pada Februari 2024). Sementara itu, TPAK perempuan di Lampung juga mengalami penurunan sebesar 0,44 persen poin (dari 54,98 persen pada Februari 2023 menjadi 54,55 persen pada Februari 2024). Penurunan TPAK perempuan tidak sedalam penurunan TPAK pria yang menunjukkan indikasi disparitas gender di pasar tenaga kerja Provinsi Lampung akan berkurang. Namun demikian, TPAK pria tetap lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 23,78 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung. Sektor industri pengolahan dan perdagangan juga memberikan kontribusi yang signifikan, masing-masing sebesar 9,04 persen dan 14,66 persen. Sejalan dengan komposisi sektor ekonomi tersebut, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2024 didominasi oleh tiga sektor. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 46,19 persen dari total penduduk yang bekerja, atau sekitar 2.233,8 ribu orang. Sektor perdagangan menyerap

17,92 persen dari total penduduk yang bekerja, atau sekitar 866,8 ribu orang. Sementara itu, sektor pertambangan dan industri pengolahan menyerap 9,04 persen dari total penduduk yang bekerja, atau sekitar 437,3 ribu orang. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2023 (persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	Feb-20	Feb-21	Feb-22	Feb-23	Feb-24	Perubahan Feb-23 s.d Feb-24	Perubahan Feb-20 s.d Feb-24
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,41	46,52	42,54	45,92	46,19	0,27	-0,22
Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan	9,74	9,7	9,55	9,09	9,04	-0,04	-0,7
Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air	0,52	0,52	0,4	0,48	0,3	-0,18	-0,22
Konstruksi	4,5	4,49	4,36	4,82	4,73	-0,1	0,23
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	18,42	18,37	19,21	18,48	17,92	-0,55	-0,5
Transportasi & Pergudangan; Informasi & Komunikasi	3,36	3,38	4,52	3,79	4,91	1,12	1,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,86	3,84	5,29	3,73	4,42	0,69	0,56
Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan	1,36	1,36	1,37	1,75	1,37	-0,38	0,01
Administrasi Pemerintahan	3,41	3,41	3,18	2,57	2,99	0,42	-0,42
Jasa Pendidikan	4,28	4,27	4,78	3,73	4,77	1,04	0,49
Jasa Pendidikan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,22	1,32	1,7	1,07	-0,63	-0,15
Jasa Lainnya	2,93	2,92	3,5	3,95	2,3	-1,65	-0,63

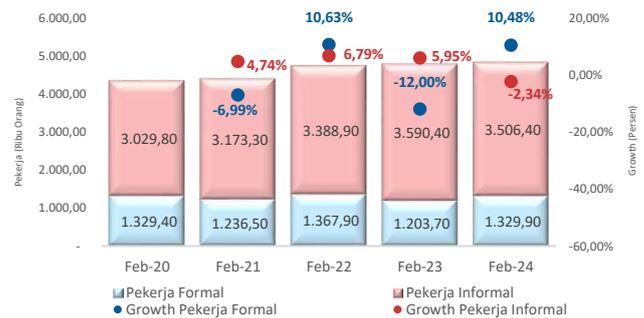
Sumber: BPS (diolah)

Pada periode Februari 2023 hingga Februari 2024, peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi, dengan peningkatan sebesar 1,12 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, peningkatan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,55 persen. Di sisi lain, sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling signifikan pada periode Februari 2023 hingga Februari 2024 adalah sektor jasa lainnya, dengan penurunan sebesar 1,65 persen. Jika dilihat dari periode Februari 2020 hingga Februari 2024, sektor ini mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,62 persen.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri (berusaha sendiri) dan pekerja yang membantu keluarga (pekerja keluarga). BPS menambahkan definisi pekerja informal yaitu pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Pada Februari 2024, kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung belum mengalami perubahan yang

signifikan. Sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, dengan pangsa sebesar 3.506,40 ribu orang atau 72,50 persen. Sementara itu, sektor formal hanya mencapai 1.329,90 ribu orang atau 27,50 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Tren ini telah berlangsung sejak periode sebelumnya, yaitu dari Februari 2020 hingga Februari 2023, di mana sekitar 7 dari 10 orang bekerja pada sektor informal di Lampung.

Grafik 1.21. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun Februari 2020 – Februari 2024



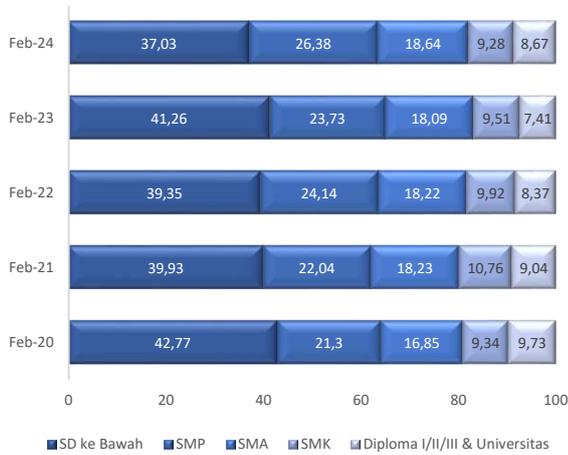
Sumber: BPS (diolah)

Pada bulan Februari 2024, terjadi penurunan sebesar 2,34 persen pada jumlah pekerja informal dibandingkan dengan periode Februari 2023. Meskipun demikian, jumlah pekerja informal masih lebih tinggi daripada periode Februari 2020, yaitu sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Sektor informal di Lampung cenderung memiliki upah yang kurang memadai, produktivitas rendah, dan kondisi kerja yang relatif kurang baik, seperti tidak adanya jaminan kerja sehingga rentan mengalami risiko dalam bekerja. Di sisi lain, pekerja formal mengalami kenaikan sebesar 10,48 persen pada periode Februari 2024 dibandingkan dengan Februari 2023. Selain itu, jumlah pekerja formal telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Februari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja di sektor formal terus membaik di Provinsi Lampung, seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi.

Tingkat pendidikan merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selaras dengan struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2024 yang masih didominasi oleh pekerja informal, ditinjau dari tingkat Pendidikan tercatat bahwa

Sebagian besar pekerja berada pada kategori Pendidikan rendah.

Grafik 1.22. Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Februari 2020 – Februari 2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada Februari 2024, struktur tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat Pendidikan SD ke bawah yang mencakup 37,03 persen dari total tenaga kerja atau sekitar 1.790,7 ribu orang. Di sisi lain, tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya mencakup 8,67 persen dari total tenaga kerja atau sekitar 419,3 ribu orang.

Grafik 1.23. TPT Provinsi Lampung Februari 2020 – Februari 2024



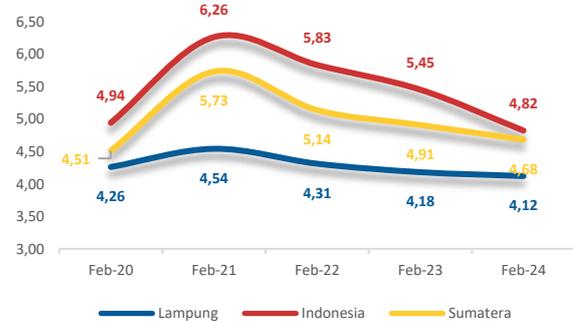
Sumber: BPS (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dalam jumlah penduduk angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena

jumlah penawaran tenaga kerja lebih kecil dari pada permintaan tenaga kerja.

TPT Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,44 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Februari 2023, TPT Lampung berada di angka 4,18 persen, dan pada periode Februari 2024, angka tersebut turun menjadi 4,12 persen sebagaimana tampak pada grafik 1.23. Konsistensi penurunan TPT di Provinsi Lampung terjadi sejak kenaikan TPT pada periode Februari 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Selain itu, capaian TPT Februari 2024 juga lebih rendah dari pada capaian TPT Februari 2020 sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi di Provinsi Lampung akibat keberlanjutan pemulihan roda perekonomian pasca pandemi. Meskipun demikian, jumlah penduduk Provinsi Lampung yang menganggur pada Februari 2024 masih lebih tinggi, yaitu sebanyak 207,70 ribu orang dibandingkan dengan periode sebelum Covid-19 yang hanya sebanyak 194,00 ribu orang.

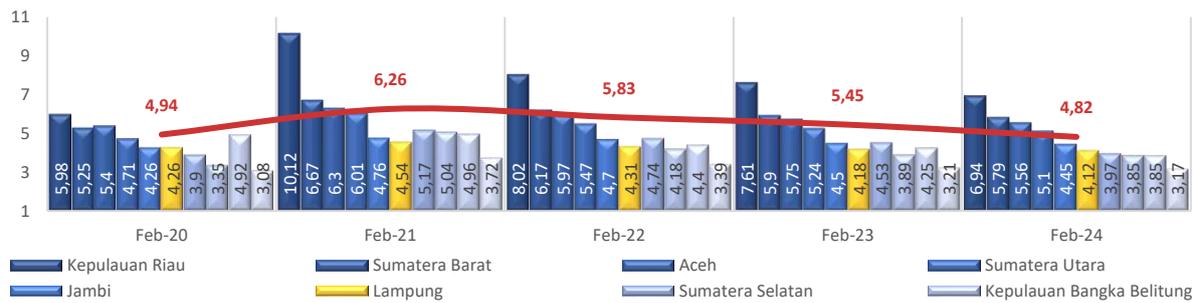
Grafik 1.24. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Februari 2020 – Februari 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada Februari 2024, TPT di Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,12 persen, yang lebih rendah daripada TPT nasional yang mencapai 4,82 persen dan rata-rata TPT Regional Sumatera sebesar 4,68 persen. Selama periode Februari 2022 hingga Februari 2024, TPT di Lampung, Nasional, dan regional Sumatera terus mengalami penurunan.

Grafik 1.25. TPT Regional Sumatera Februari 2020 s.d. Februari 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada periode Februari 2024, Provinsi Lampung menempati urutan kelima dengan TPT terendah di wilayah Sumatera setelah Bengkulu (3,17 persen), Riau (3,85 persen), Kepulauan Bangka Belitung (3,85 persen), dan Sumatera Selatan (3,97 persen) sebagaimana tampak pada grafik 1.25. Tingkat pengangguran nasional dan Provinsi di wilayah Sumatera pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan nilai lebih tinggi dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada usaha-usaha yang ada. Kemudian, seiring dengan pemulihan ekonomi, maka di tahun 2022 TPT mengalami tren yang menurun.

TPT sebesar 4,12 persen mencerminkan proporsi pengangguran dari total angkatan kerja di Provinsi Lampung, di mana dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 4 orang di antaranya tidak bekerja. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung semakin baik hal ini tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja di Lampung semakin meningkat setiap tahunnya serta diiringi dengan penurunan jumlah penduduk yang menganggur.

TPT yang mencapai 4,12 persen di Provinsi Lampung merupakan representasi dari jumlah individu yang tidak bekerja dalam total angkatan kerja. Dengan kata lain, sekitar 4 individu dari setiap 100 orang yang berada dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya, yang diiringi dengan penurunan jumlah penduduk yang tidak bekerja.

Tenaga kerja yang tersedia banyak tanpa diimbangi jumlah kebutuhan tenaga kerja yang memadai akan memberikan dampak pada rendahnya nilai jual tenaga kerja yang ada. Jika tidak diatasi maka akan menciptakan pengangguran lebih banyak dan melemahkan perekonomian.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja baru dalam lingkup aktivitas ekonomi riil masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dengan melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan *job fair*, program pelatihan tenaga kerja dan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Aplikasi Sigajahlampung. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif.

1.2.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian



dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penghitungan NTP berlandaskan pada pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima dari pada pengeluarannya dan relatif semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada triwulan I 2024, rata-rata NTP di Provinsi Lampung tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Namun demikian, NTP Lampung masih berada di bawah rata-rata NTP wilayah regional Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 1.26. NTP Lampung, nasional, dan wilayah Sumatera menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan daya beli petani yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani secara umum pada triwulan I 2024 dibandingkan triwulan I 2023.

Secara umum, tren capaian NTP masing-masing Provinsi di Regional Sumatera pada dapat dilihat pada grafik 1.27. Rata-rata NTP seluruh Provinsi di regional Sumatera triwulan I 2024 dibandingkan

dengan triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan positif. Namun, terdapat pengecualian untuk Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi sebesar 0,04 persen (*yoy*). Pada triwulan I 2024, rata-rata NTP Kepri mencapai 104,33 sedangkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya rata-rata NTP Kepri sebesar 104,75.

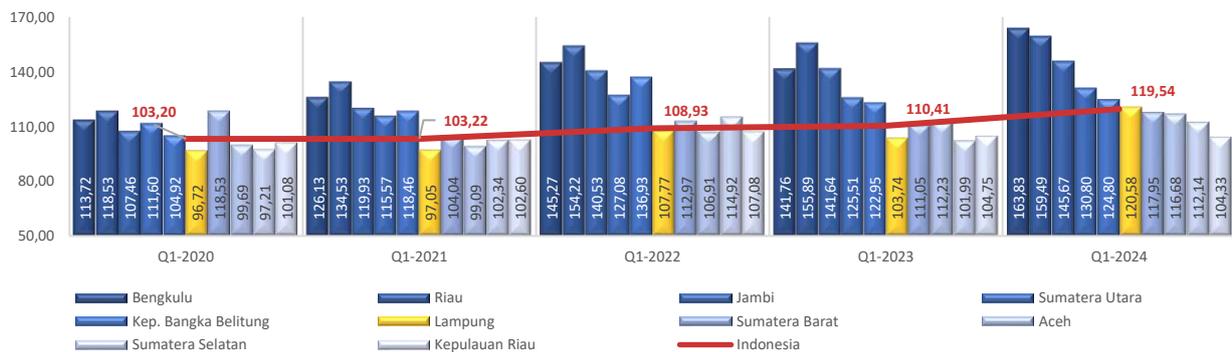
Grafik 1.26. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024



Sumber: BPS (diolah)

Lampung mencatatkan pertumbuhan NTP tertinggi untuk periode triwulan I 2024 dibandingkan dengan triwulan I 2023, dengan pertumbuhan sebesar 16,24 persen (*yoy*), kemudian diikuti oleh Provinsi Bengkulu yang tumbuh sebesar 15,57 persen (*yoy*). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan NTP provinsi lain di regional Sumatera, NTP Lampung sebesar 120,58 masih menempati posisi kelima terendah dari 10 Provinsi setelah Kepulauan Riau (104,33), Sumatera Selatan (112,14), Aceh (116,68), dan Sumatera Barat (117,95).

Grafik 1.27. NTP Regional Sumatera Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor dapat dilihat pada tabel 1.19. Peningkatan NTP Lampung pada triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa subsektor NTP lainnya. Secara triwulanan,

peningkatan NTP didorong oleh peningkatan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 3,20 persen (*qta*); Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) sebesar 2,89 persen (*qta*); Nilai Tukar Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 7,19 persen.

Namun, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT), Nilai Tukar Perikanan Tangkap (NTN), dan Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya (NTPi) mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,28 persen (*qtq*), 1,34 persen (*qtq*), dan 2,09 persen (*qtq*). Secara tahunan, Peningkatan NTP Lampung pada

triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan kinerja NTPP sebesar 15,20 persen (*yoy*); NTPH sebesar 23,48 persen (*yoy*); NTPR sebesar 21,70 persen (*yoy*); NTN sebesar 1,84 persen (*yoy*); dan NTPi sebesar 0,49 persen (*yoy*). Sementara itu NTPT mengalami penurunan sebesar 2,21 persen (*yoy*).

Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 – Triwulan I 2024

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2020				2021				2022				2023				2024		Perubahan %qtq	Perubahan %yoy
	I	II	III	IV	I															
Nilai Tukar Petani																				
Tanaman Pangan	97,55	93,64	93,90	91,96	90,90	90,54	93,43	94,44	96,79	94,31	93,10	94,47	97,81	98,33	103,42	109,18	112,68	3,20%	15,20%	
Hortikultura	97,58	95,10	95,06	97,63	99,92	95,45	94,81	96,70	97,96	105,67	118,99	107,16	105,68	105,87	112,65	126,82	130,49	2,89%	23,48%	
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,51	87,70	92,31	98,38	102,85	110,21	114,03	119,70	123,12	119,00	110,38	109,56	111,99	117,92	124,21	127,15	136,29	7,19%	21,70%	
Peternakan	99,58	98,05	100,84	99,73	99,01	102,10	104,25	104,24	104,37	104,58	102,61	100,48	98,46	100,06	100,35	98,53	96,283	-2,28%	-2,21%	
Perikanan Tangkap	101,45	99,79	101,50	102,63	103,57	104,95	106,22	108,14	109,23	110,04	108,26	106,28	108,25	110,85	111,61	111,74	110,24	-1,34%	1,84%	
Perikanan Budidaya	100,78	99,73	100,09	100,89	100,57	101,68	101,40	101,28	100,98	100,02	98,98	99,65	96,88	97,17	98,86	99,42	97,347	-2,09%	0,49%	
Gabungan																				
Nilai Tukar Petani	96,72	92,11	94,29	95,78	97,05	99,79	102,69	105,36	107,77	105,59	102,32	101,70	103,74	106,42	111,45	115,66	120,58	4,25%	16,24%	
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	101,93	97,38	99,74	101,89	104,58	107,74	111,00	114,16	118,74	119,11	117,43	117,17	120,99	124,77	131,31	137,85	145,45	5,52%	20,22%	
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	105,39	105,71	105,77	106,38	107,75	107,97	108,10	108,34	110,17	112,82	114,78	115,20	116,63	117,24	117,82	119,18	120,62	1,21%	3,42%	

Sumber: BPS (diolah)

NTPP pada triwulan I 2024 sebesar 112,68, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTPP, khususnya kelompok padi, yang mengalami peningkatan harga penjualan gabah. Faktor utama yang memicu peningkatan ini adalah dampak dari fenomena El Nino, yang berdampak pada penurunan produksi padi dan pergeseran musim tanam..

NTPH pada triwulan I sebesar 130,49, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTPH yaitu sayur-sayuran khususnya cabai merah.

NTPR pada triwulan I 2024 sebesar 136,28, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTPR yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat (khususnya komoditas kopi, karet, kelapa sawit, dan kakao). Kenaikan harga komoditas tersebut tidak terlepas dari pergerakan harga di dunia yang meningkat karena produktivitas yang menurun.

NTPT pada triwulan I 2024 sebesar 96,28, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga periode yang sama pada tahun sebelumnya. NTP < 100 berarti petani mengalami defisit atau merugi yang berarti indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Angka ini mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli peternak tidak lebih baik dibandingkan tahun 2018 (tahun dasar perhitungan). Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Komoditas pemicu penurunan NTPT yaitu komoditas sapi potong, permintaan yang berkurang dan pasokan yang banyak menyebabkan penurunan harga. Selain itu juga, peningkatan indeks yang dibayar peternak lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang diterima peternak akibat harga beras yang melonjak.

NTN pada triwulan I 2024 sebesar 110,24, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tetapi meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan NTN disebabkan oleh penurunan indeks pada kelompok penyusun NTN yaitu penangkapan laut (khususnya ikan teri, ikan tongkol, ikan kembung, dan cumi-cumi). Penurunan harga komoditas ini disebabkan karena ketersediaan pasokan yang banyak akibat musim.



Selain itu juga, peningkatan indeks yang dibayar nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang diterima nelayan akibat harga beras yang melonjak.

NTPi pada triwulan I 2024 sebesar 97,35, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tetapi meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Berbeda halnya dengan capaian NTP subsektor perikanan tangkap (NTN) yang mencapai nilai di atas 100. Capaian NPTi Lampung di bawah 100 konsisten terjadi sejak triwulan III 2023 hingga periode pelaporan. Komoditas pemicu penurunan NTPi adalah udang payau. Selain itu juga, peningkatan indeks yang dibayar nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks yang diterima nelayan akibat harga beras yang melonjak.

Tabel 1.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 – Triwulan I 2024

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2020				2021				2022				2023				2024		Perubahan %q _q	Perubahan %y _o y
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I			
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	97,63	93,15	95,10	96,87	98,55	101,10	103,67	104,63	108,53	107,26	104,03	101,40	103,96	107,01	112,31	117,65	123,19	4,71%	18,50%	
Tanaman Pangan	98,66	94,83	94,96	93,22	92,61	92,22	94,68	95,31	97,89	96,31	95,54	95,09	98,74	99,57	104,91	111,55	115,08	3,17%	16,55%	
Hortikultura	99,77	97,13	97,01	100,04	102,75	98,10	97,31	104,06	100,70	109,87	123,64	110,25	109,04	109,68	117,19	133,28	137,12	2,88%	25,75%	
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,98	88,35	92,62	99,10	103,99	110,90	114,48	115,70	123,09	120,12	111,16	107,46	110,68	117,03	123,62	128,06	138,57	8,21%	25,20%	
Peternakan	100,59	99,29	101,73	100,62	100,05	102,83	104,70	103,24	104,71	104,96	102,70	100,16	98,81	100,57	101,02	100,08	98,56	-1,52%	-0,26%	
Perikanan Tangkap	102,53	100,79	102,28	103,51	104,82	105,99	107,22	108,68	110,60	111,91	76,48	106,03	108,44	111,29	112,32	113,09	112,32	-0,69%	3,57%	
Perikanan Budidaya	102,26	101,46	101,72	102,65	102,76	103,86	103,39	102,57	102,83	102,76	102,06	101,94	99,58	100,17	102,10	103,09	101,16	-1,87%	1,59%	

Sumber: BPS (diolah)

Perhitungan NTP mencakup total pengeluaran rumah tangga petani termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Oleh karena itu, digunakan indikator Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang merupakan rasio antara indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks yang Dibayar Petani yang hanya meliputi biaya produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Perkembangan NTUP Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.10. Pada triwulan I 2024, NTUP Lampung tercatat sebesar 123,19, meningkat sebesar 4,71 persen (*q_q*) dan meningkat sebesar 18,50 persen (*y_oy*). Peningkatan NTUP terbesar secara triwulanan berasal dari subsektor NTPR, yakni sebesar 8,21 persen (*q_q*). Sementara itu, peningkatan NTUP terbesar secara tahunan berasal dari subsektor NTPH yakni sebesar 25,75 persen (*y_oy*).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai dengan kewenangan tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa benih atau bibit

tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya memfasilitasi petani dalam mendapatkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan asuransi usaha, fasilitas sosial dari program pemerintah maupun swasta, serta akses terkait kepastian ketersediaan pupuk, baik yang digunakan pada sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik yang bersubsidi maupun non subsidi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk sebuah program yang diberi nama Kartu Petani Berjaya (KPB). Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi penjaminan ketersediaan benih, bibit dan pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya, ketersediaan teknologi pertanian, permodalan, manajemen risiko usaha tani, penentuan jadwal tanam, dan penyaluran air irigasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini antara lain *supplier*,



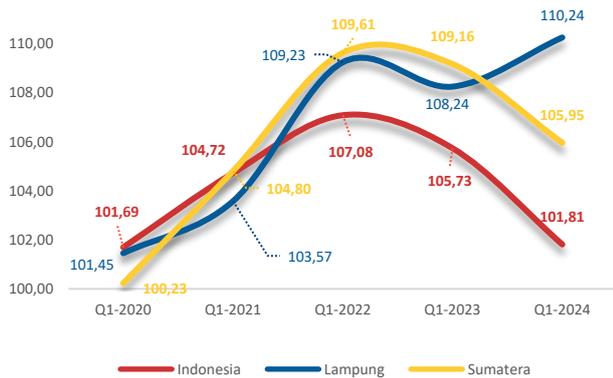


distributor, perbankan, petani, pembeli, dan Pemerintah Provinsi. Program KPB akan terus disempurnakan di berbagai aspek dengan harapan bahwa NTP Provinsi Lampung akan dapat melampaui capaian NTP Nasional dalam beberapa tahun mendatang.

1.2.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada triwulan I 2024, rata-rata NTN Lampung tercatat sebesar 110,24. Nilai tersebut berada di atas rata-rata NTN untuk regional Sumatera, yang tercatat sebesar 105,95 serta di atas rata-rata NTN Nasional, yang tercatat sebesar 101,81 sebagaimana tampak pada grafik 1.28.

Grafik 1.28. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024

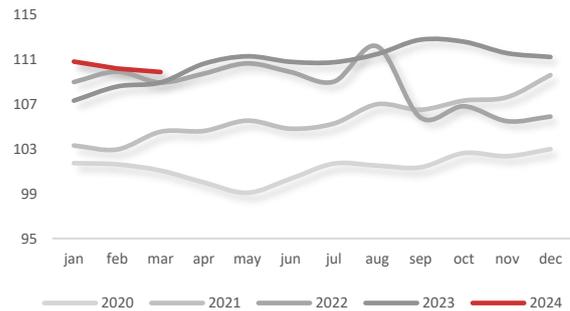


Sumber: BPS (diolah)

Pergerakan NTN pada triwulan I berfluktuasi. Provinsi Lampung, nasional, dan Sumatera memiliki rata-rata NTN diatas 100, yang menandakan bahwa nelayan mengalami surplus atau keuntungan Angka ini mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli nelayan lebih baik dibandingkan dengan tahun

2018, yang merupakan tahun dasar perhitungan. NTN terendah terjadi pada triwulan I 2020, kemudian mengalami peningkatan untuk triwulan I tahun 2021 dan 2022, namun kembali mengalami penurunan di triwulan I tahun 2023. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung berhasil meningkat pada triwulan I 2023, namun NTP nasional dan rata-rata provinsi di regional Sumatera mengalami penurunan.

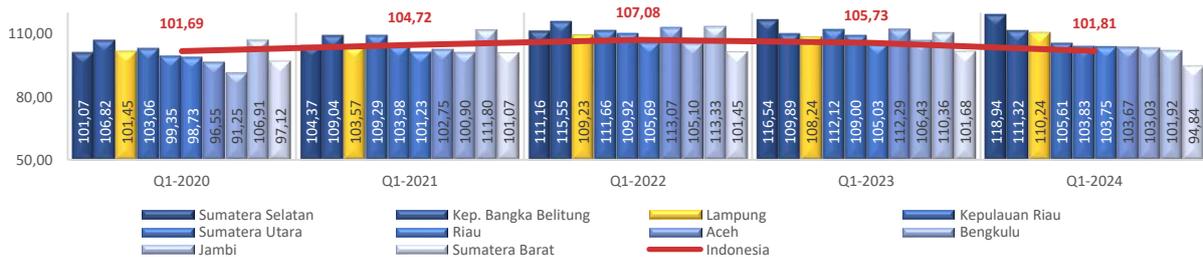
Grafik 1.29. Perkembangan NTN Lampung Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada Triwulan I 2023, Jika dibandingkan dengan NTN provinsi lain di regional Sumatera, NTN Lampung sebesar 110,24 menempati posisi tertinggi ketiga dari 10 Provinsi setelah Sumatera Selatan (116,91) dan Kepulauan Bangka Belitung (111,31), sebagaimana tampak pada grafik 1.29. Capaian NTN ketiga Provinsi tersebut juga berada di atas rata-rata NTN nasional. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terdapat peningkatan NTN di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung masing-masing sebesar 1,85 persen (yoy), 2,05 persen (yoy), dan 1,30 persen (yoy). Di sisi lain, NTN Provinsi lainnya di regional Sumatera mengalami kontraksi.

Grafik 1.30. NTN Regional Sumatera Triwulan I 2020 – Triwulan I 2024 (persen)



Sumber: BPS (diolah)



NTN Lampung triwulan I 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.30. Pada triwulan I 2024, NTN Lampung mengalami kenaikan sebesar 1,85 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, NTN Lampung mengalami penurunan sebesar 1,34 persen (*qtq*).

Penurunan NTN Lampung triwulan I 2024 dibandingkan dengan triwulan IV 2023 karena penurunan harga komoditas cumi-cumi akibat ketersediaan pasokan yang banyak akibat musim.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menggalakkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) untuk mempermudah keterjangkauan akses bahan bakar. Saat ini, beberapa SPBN telah beroperasi, seperti SPBN Lempasing yang terletak di kawasan TPI Lempasing, SPBN Kalianda di Kalianda, SPBN Labuhan Maringgai di Labuhan Maringgai, dan SPBN Kota Agung yang berlokasi di Kota Agung. Selain itu, terdapat SPBN Dente Telandas, Kuala Penet, dan Muara Pilu, dan Pesisir Barat yang sedang dalam tahap pembangunan.

Selain itu, seiring dengan perkembangan era digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Program e-KPB. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha bagi petani dalam arti yang luas (termasuk masyarakat kelautan dan perikanan) dengan tujuan mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya”. Salah satu menu layanan bagi nelayan pada Program e-KPB adalah bantuan premi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB).

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mendorong implementasi program kegiatan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah penetapan lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pulau Pasaran. Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang merupakan bantuan dari KKP. Fasilitas tersebut meliputi rumah pengering higienis, gudang beku portabel, sentra kuliner, kios, dan balai pertemuan nelayan. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk mendukung dan memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.



Boks 1.1

Peluang Investasi Regional Lampung



Bakung Waste To Energy



Bakung Waste to Energy (WtE) saat ini digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir yang terletak di Kota Bandar Lampung. Memiliki luas area sebesar 14,1 Ha dimana 90% nya dipenuhi oleh sampah. Lahan ini dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan berlokasi di Teluk Betung Barat. Jarak tempuh ke Gerbang Tol Lematang 19 Km yang merupakan bagian dari Jalan Toll Trans Sumatera. Jarak ke Bandara Internasional Raden Intan II 30 Km. Jarak ke PLTU Tarahan sebagai calon pembeli potensial Produk *Refused Derived Fuel* (RDF) yakni 18 Km. Limbah padat perkotaan yang di produksi mencapai 800-1.000 ton per hari. Area proyek seluas 14,1 Ha dengan status *clear and clean* area untuk pembangunan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF.



-Keunggulan-

- Insentif dalam perizinan usaha;
- Jaminan Pemerintah terhadap Proyek KPBU;
- Dukungan kelayakan pembiayaan proyek (VGF, APBN, APBD);
- Status lahan *clear and clean*;
- Dukungan regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan;
- Kelayakan penjualan RDF di atas harga produktif;
- Terjaminnya pasokan limbah.



-Skema Bisnis-

- Produk RDF dijual dengan Kendaraan Proyek Khusus atau BUP (Badan Usaha Pelaksana)
- Produk RDF dijual oleh penanggung jawab (PJPK) melalui Dinas Lingkungan Hidup



-Kelayakan Finansial-

- Estimasi Nilai Investasi : Rp 577,5 Miliar
- *Payback Period* : 8,3 Tahun
- *Internal Rate of Return* : 22,73%
- WACC : 10,48%

“Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI



ANALISIS FISKAL REGIONAL

BAB II



BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1. PELAKSANAAN APBN

Di tengah berbagai tantangan perekonomian yang berlanjut pada tahun 2024, kebijakan fiskal yang adaptif diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko global yang diantaranya bersumber dari meningkatnya tensi geopolitik, perubahan iklim, adanya potensi pandemi berikutnya, dan disrupsi sebagai dampak digitalisasi. APBN Tahun 2024 berfokus pada optimalisasi fungsi distribusi dan stabilisasi melalui pengendalian harga, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Di samping itu melalui pengoptimalan fungsi alokasi, APBN juga berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, mengakselerasi

pembangunan infrastruktur dan mendorong nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi. Selanjutnya, untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, optimalisasi pendapatan dilakukan dengan menjaga iklim investasi dan peningkatan kualitas belanja guna mendukung reformasi struktural dan sebagai *fiscal buffer*.

Pada APBN Tahun 2024 Provinsi Lampung, Pagu Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp31.688,26 miliar, sedikit menurun dari alokasi Belanja Negara pada tahun 2023 sebesar 1,52 persen (*yoy*). Penurunan alokasi Belanja Negara khususnya pada alokasi Belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos.

Tabel 2.1 I-Account APBN di Provinsi Lampung Realisasi Triwulan I 2024 (dalam miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2023			T.A. 2024			% Growth 2023-2024	
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	10.229,84	2.257,62	22,07	11.180,55	2.150,95	19,24	9,29	(4,73)
1. Pendapatan Perpajakan	9.267,37	1.947,37	21,01	10.165,05	1.718,11	16,90	9,69	(11,77)
a. Pajak Dalam Negeri	8.054,66	1.603,78	19,91	8.843,16	1.540,64	17,42	9,79	(3,94)
i. Pajak Penghasilan	3.557,99	777,06	21,84	3.958,15	805,90	20,36	11,25	3,71
ii. Pajak Pertambahan Nilai	4.180,11	795,32	19,03	4.576,70	702,91	15,36	9,49	(11,62)
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	160,43	3,51	2,19	153,56	(7,15)	(4,66)	(4,28)	(303,93)
v. Cukai	2,93	0,15	4,99	2,25	2,58	114,91	(23,31)	1.666,99
vi. Pajak Lainnya	153,20	27,74	18,11	152,50	36,40	23,87	(0,46)	31,24
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.212,71	343,60	28,33	1.321,89	177,47	13,43	9,00	(48,35)
i. Bea Masuk	285,08	108,36	38,01	548,86	123,83	22,56	92,53	14,28
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	927,63	235,23	25,36	773,03	53,63	6,94	(16,67)	(77,20)
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	962,47	310,25	32,23	1.015,49	432,84	42,62	5,51	39,51
a. PNPB Lainnya	477,33	265,09	55,54	418,12	229,77	54,95	(12,40)	(13,33)
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	485,14	45,16	9,31	597,37	203,07	33,99	23,13	349,72
3. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	32.176,19	7.109,45	22,10	31.688,26	7.626,33	24,07	(1,52)	7,27
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	10.586,76	1.534,49	14,49	9.428,45	2.399,63	25,45	(10,94)	56,38
a. Belanja Pegawai	3.828,89	742,84	19,40	3.995,87	1.058,54	26,49	4,36	42,50
b. Belanja Barang	5.060,35	625,48	12,36	4.257,57	1.176,60	27,64	(15,86)	88,11
c. Belanja Modal	1.659,35	162,08	9,77	1.138,15	144,13	12,66	(31,41)	(11,07)
d. Bantuan Sosial	38,18	4,09	10,72	36,86	20,35	55,21	(3,44)	397,35
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	21.589,43	5.574,96	25,82	22.259,81	5.226,71	23,48	3,11	(6,25)
a. Dana Transfer Umum (DTU)	13.649,87	3.622,81	26,54	14.264,93	3.593,95	25,19	4,51	(0,80)
i. Dana Alokasi Umum	12.701,28	3.509,65	27,63	13.662,11	3.520,37	25,77	7,56	0,31
ii. Dana Bagi Hasil	948,59	113,16	11,93	602,81	73,58	12,21	(36,45)	(34,98)
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	5.379,97	1.578,89	29,35	5.580,33	985,70	17,66	3,72	(37,57)
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.232,35	-	-	1.453,58	-	-	-	17,95
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.147,62	1.578,89	38,07	4.126,75	985,70	23,89	(0,50)	(37,57)
c. Dana Otsus, DIY, IF	255,96	-	-	147,69	10,66	7,22	(42,30)	-
i. Insentif Fiskal	255,96	-	-	147,69	10,66	7,22	(42,30)	-
d. Dana Desa	2.303,63	373,26	16,20	2.266,86	636,40	28,07	(1,60)	70,50
i. Dana Desa	2.303,63	373,26	16,20	2.266,86	636,40	28,07	(1,60)	70,50
C. SURPLUS (DEFISIT)	(21.946,35)	(4.851,82)	22,11	(20.507,71)	(5.475,39)	26,70	(6,56)	12,85
D. PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	(21.946,35)	(4.851,82)	22,11	(20.507,71)	(5.475,39)	26,70	(6,56)	12,85

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, SIKRI, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)



Di sisi lain, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp11,18 triliun meningkat 9,29 persen (yoy) yang bersumber dari target Penerimaan Perpajakan dan PNBPN yang meningkat secara berturut-turut 9,69 persen dan 5,51 persen (yoy). Peningkatan target ini mempertimbangkan prospek perekonomian ke depan dan menjaga daya beli masyarakat namun tetap optimal dalam mendukung Belanja Negara.

Sampai dengan Triwulan I-2024 Capaian Pendapatan Negara secara nominal terealisasi sebesar Rp2,15 atau 19,29 persen dari target. Capaian ini secara tahunan sedikit terkontraksi 4,73 persen (yoy) yang utamanya disebabkan karena perubahan harga komoditas pada gilirannya berdampak pada kinerja Penerimaan negara. Fluktuasi harga komoditas ini terjadi sejak tahun 2023 dan masih berlanjut hingga Triwulan I, meskipun telah berangsur membaik.

Sementara, dari Belanja Negara yang dialokasikan, telah terserap 24,07 persen dari pagu atau secara nominal Rp7,62 triliun. Secara tahunan, penyerapan Belanja Negara menunjukkan percepatan didukung oleh pelaksanaan agenda strategis nasional dan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk Tunjangan Hari Raya sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat penyerapan realisasi terhadap pagu pada Triwulan I-2024 lebih besar dari Triwulan I-2023.

2.1.1. Pendapatan Negara

Sampai dengan Triwulan I-2024, Pendapatan Negara telah terkumpul Rp2,15 triliun atau setara dengan 19,24 persen dari target yakni Rp11,18 triliun. Secara kumulatif, pendapatan negara terkontraksi 4,73 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh penerimaan Bea Keluar yang menurun tajam akibat moderasi harga komoditas di pasar global. Di sisi lain, kinerja Perpajakan Dalam Negeri sedikit terkoreksi dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan negatif sebesar 3,94 persen, akibat penurunan penerimaan PPN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 39,51 persen (yoy). Besaran realisasi PNBPN sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp 0,43 triliun atau 42,62 persen dari

target. Realisasi yang positif ini turut didukung oleh kualitas pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan Penerimaan Perpajakan di Lampung dengan target sebesar Rp10,16 triliun. Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Maret 2024 sebesar 1,7 triliun ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Maret 2024 (miliar rupiah)

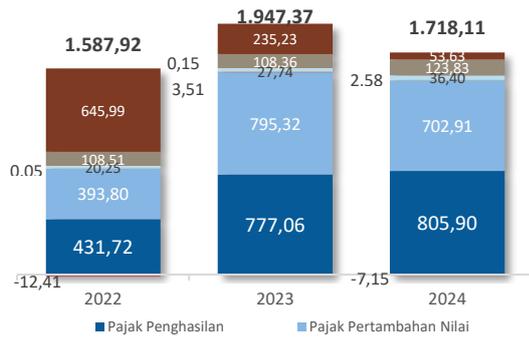
Uraian	2024		
	PAGU	REALISASI	%REAL
A. Pajak Dalam Negeri	8.843,16	1.540,64	17,42
Pajak Penghasilan	3.958,15	805,90	20,36
Pajak Pertambahan Nilai	4.576,70	702,91	15,36
Pajak Bumi dan Bangunan	153,56	(7,15)	(4,66)
Cukai	2,25	2,58	114,91
Pajak Lainnya	152,50	36,40	23,87
B. Pajak Perdagangan Internasional	1.321,89	177,47	13,43
Bea Masuk	548,86	123,83	22,56
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	773,03	53,63	6,94
Total	10.165,05	1.718,11	16,90

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar.

Capaian Penerimaan Perpajakan berdasarkan target APBN 2024 adalah sebesar 16,90 persen. Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar 17,42 persen dari target, sementara untuk Capaian Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional adalah 13,43 persen dari target.

Grafik 2.1 menunjukkan tren komponen realisasi Penerimaan Perpajakan pada tiga tahun terakhir. Penerimaan Perpajakan sejak tahun 2022-2024 masih didominasi oleh penerimaan PPN dan PPh yang jumlahnya cukup fluktuatif sampai dengan akhir Maret 2024. Sementara penerimaan Bea Masuk yang menjadi kontributor terbesar ketiga, realisasinya mengalami peningkatan. Di sisi lain, penerimaan Bea Keluar menunjukkan kontraksi di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penerimaan Bea Keluar atau pungutan ekspor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas di pasar global, khususnya CPO yang menopang ekspor dari Lampung. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan harga CPO yang menyebabkan harga referensi pengenaan Bea Keluar menjadi lebih tinggi. Penurunan Bea Keluar pada triwulan I-2024 disebabkan turunnya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) dan dampak penurunan permintaan global.

Grafik 2.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN (data diolah)

Selanjutnya, berfokus pada triwulan I-2024, realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh negatif sebesar 11,77 persen (yoy) dengan kontribusi 16,90 persen dari target tahun 2024 atau secara nominal sebesar Rp1,71 triliun. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang mengalami kontraksi hingga 3,94 persen. Meski demikian sebagian besar komponen penerimaan Perpajakan Dalam Negeri menunjukkan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga solid dan terus berlanjut tumbuh. Sementara, dari sisi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terkontraksi cukup dalam sebesar 48,35 persen (yoy). Capaian Realisasi dan Pertumbuhan pada setiap komponen Penerimaan Perpajakan ditunjukkan sebagaimana Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Triwulan I 2024 (miliar rupiah, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri bersumber dari Pajak Penghasilan (PPH) yang terkumpul senilai Rp805,9 miliar atau sebesar 20,36

persen dari target awal APBN 2024. Penerimaan Pajak Penghasilan mendominasi capaian dengan proporsi 52 persen. Realisasi PPh tumbuh 3,71 persen (yoy) utamanya berasal dari pertumbuhan penerimaan PPh 21 sebesar 24,89 persen (yoy) yang menyumbang secara nominal Rp352,52 miliar. Peningkatan pada sektor Administrasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta aktivitas keuangan dan asuransi. Pertumbuhan juga ditunjukkan pada penerimaan PPh 23 yang tumbuh 24,20 persen (yoy) atau secara nominal menyumbang Rp48,71 miliar. Sedangkan PPh 25/29 Badan terkontraksi cukup dalam sebesar 20,72 persen (yoy). Selanjutnya, untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kontraksi 303,93 persen (yoy) disebabkan belum masuknya masa pembayaran PBB sektor P5L yang jatuh temponya dimulai pada semester II tahun 2024. Di sisi lain, Pajak Lainnya di Lampung tercatat tumbuh 31,24 persen (yoy).

Di samping itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga turut menjadi kontributor terbesar kedua Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung dengan kontribusi sebesar 46 persen dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Total penerimaan PPN triwulan I-2024 sebesar Rp702,9 miliar atau tercapai 15,36 persen dari target APBN 2024. Penerimaan PPN terkontraksi sebesar 11,62 persen (yoy) utamanya berasal dari penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri disebabkan oleh pengaruh iklim yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi pada sub sektor: industri pati ubi kayu, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan industri gula pasir.

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional masih tercatat tumbuh negatif sebesar 48,35 persen (yoy). Secara persentase ketercapaian terhadap target APBN Tahun 2024 sebesar Rp1.321,89 miliar, capaian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai 13,43 persen atau terkumpul Rp177,47 miliar.

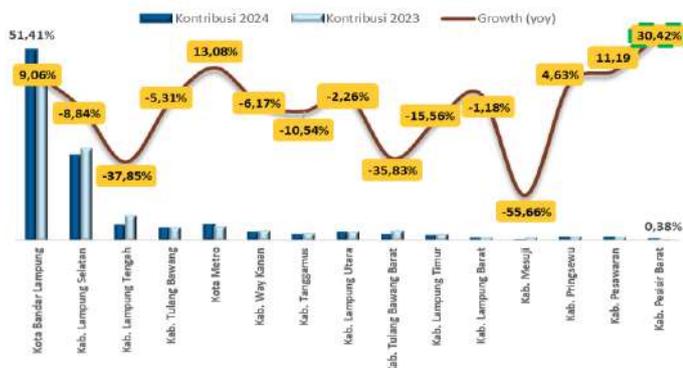
Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp123,83 miliar atau 22,56 persen dari target, berhasil tumbuh 14,28 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan importasi beras untuk menjaga cadangan pangan pokok dan stabilitas harga pangan di Lampung sebagai dampak

perubahan iklim yang berpengaruh pada produktivitas beras dalam negeri.

Sementara itu, penurunan terjadi pada penerimaan yang bersumber dari Bea Keluar sebesar 77,20 persen (*yoy*) dengan realisasi sebesar Rp53,63 miliar atau 6,94 persen dari target APBN 2024. Penurunan ini utamanya terjadi akibat moderasi harga referensi CPO beserta turunannya di pasar global, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung.

Dari sisi penerimaan negara berupa Cukai, terdapat pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 1.666,99 persen (*yoy*). Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp2,58 miliar atau mencapai 114,91 persen dari target APBN 2024 yang ditetapkan. Pertumbuhan signifikan ini diantaranya berasal oleh penerimaan atas denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Grafik 2.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota Triwulan I 2024



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

Selanjutnya, melihat kontribusi penerimaan pajak dalam negeri, berdasarkan Grafik 2.3, apabila dilihat dari sebaran wilayahnya, Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan sumber penerimaan pajak yang dominan mencapai 51,41 persen dari total penerimaan Pajak Dalam Negeri yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak di Lampung. Selain mengalami peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak pemerintah pusat secara nominal di Bandar Lampung turut tumbuh 9,06 persen (*yoy*), yang utamanya karena Kota Bandar Lampung merupakan

ibukota dan sebagai sentra perekonomian di Provinsi Lampung, sehingga terdapat banyak perkantoran, pusat hiburan, dan perbelanjaan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah di lainnya. Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Barat meskipun memiliki kontribusi terendah kedua se-Provinsi Lampung yaitu sebesar 0,50 persen dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri tetapi mampu meningkatkan penerimaannya hingga 30,42 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 30,42 persen meskipun memiliki kontribusi terendah kedua se-Provinsi Lampung yaitu sebesar 0,50 persen (*yoy*) dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Capaian positif ini didukung oleh pertumbuhan realisasi PPH. Sedangkan, pertumbuhan terendah terdapat pada Kabupaten Mesuji.

Grafik 2.4 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Triwulan I 2024 (persen)

Sektor	Kontribusi Jan-Mar 2024 (%)	Pertumbuhan Jan-Mar 2024 (%)
Industri Pengolahan	28,65%	(0,22)
Perdagangan Besar dan Eceran	19,63%	(0,08) (0,10)
Administrasi Pemerintahan	15,33%	0,32 0,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,43%	0,03 0,77
Transportasi dan Pergudangan	7,90%	0,32 0,12
Sektor Lainnya	17,06%	(0,01) (0,03)
TOTAL	100%	growth Jan-Mar 24 growth Jan-Mar 23

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan sektor pajak sebagaimana pada Grafik 2.4, Industri Pengolahan masih menjadi sektor utama dalam menyumbang penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung dengan kontribusi 28,65 persen. Sektor ini mengalami kontraksi sebesar 22,21 persen (*yoy*) terutama akibat penurunan kegiatan ekonomi pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*).

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan sektor terbesar kedua dengan kontribusi 19,63 persen dari total Pajak Dalam Negeri, terkontraksi sebesar 9,22 persen dikarenakan adanya penurunan kegiatan ekonomi pada perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*)

atau kontrak. Sementara itu, Sektor Administrasi Pemerintahan mencatat pertumbuhan sebesar 31,72 persen (*yoy*) dengan kontribusi sebesar 15,33 persen dari total penerimaan, dipicu oleh peningkatan pembayaran dari Pemerintah Daerah terkait dengan pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22.

Sementara itu, kinerja kumulatif penerimaan pajak dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tercatat tumbuh dari tahun sebelumnya sebesar 2,75 persen dengan kontribusi sebesar 11,43 persen dari total penerimaan, dipengaruhi oleh peningkatan pada kegiatan ekonomi pada Bank Sentral. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan tumbuh positif sebesar 31,83 persen dengan kontribusi sebesar 7,90 persen dari total penerimaan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi pada sektor pengangkutan dan pergudangan.

Secara keseluruhan kinerja Penerimaan Pajak di Lampung sampai dengan 31 Maret 2024, menunjukkan kinerja yang cukup tangguh di tengah fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada produktivitas sektor utama yang perekonomian provinsi Lampung. Capaian tersebut didukung oleh upaya pemerintah melalui penyempurnaan layanan dan regulasi di bidang perpajakan dan kerja sama masyarakat dalam membangun negara melalui kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan.

2.1.1.2. Analisis Tax Ratio

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 2.4 menyajikan perhitungan *tax ratio* s.d. 31 Maret 2024 di Lampung.

Tabel 2.3 *Tax Ratio* Penerimaan Pajak 2022-2024 di Lampung (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024
Pajak Dalam Negeri	833,42	1.603,78	1.540,64
Pajak Perdagangan Internasional	754,50	343,60	177,47
Penerimaan Perpajakan	1.587,92	1.947,37	1.718,11
PDRB s.d Triwulan I	95.503,39	105.565,02	112.091,01
Tax Ratio	1,66%	1,84%	1,53%

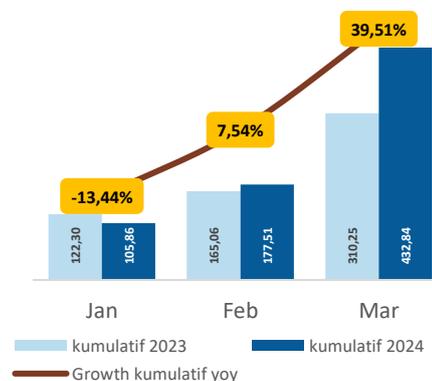
Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut diperoleh informasi bahwa *tax ratio* pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret 2024 di Lampung sebesar 1,53 persen, menurun dibandingkan dengan *tax ratio* s.d. Maret 2023 yang sebesar 1,84 persen. Menurunnya angka *tax ratio* ini terjadi seiring dengan realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang terkoreksi cukup dalam akibat penurunan harga CPO yang merupakan komoditas utama ekspor di Lampung, sehingga berpengaruh signifikan pada penurunan realisasi Bea Keluar. Namun di sisi lain, Penerimaan Pajak Dalam Negeri berbanding terbalik dengan peningkatan PDRB yang mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Perpajakan tidak sejalan dengan aktivitas ekonomi Provinsi Lampung.

2.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp432,84 miliar, dengan capaian 42,62 persen dari target APBN 2024. Kinerja positif ini juga selaras dengan pertumbuhan kumulatif yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,51 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

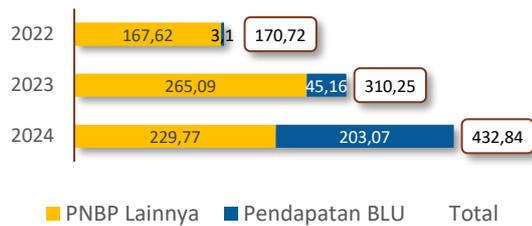
Grafik 2.5 Pertumbuhan Kumulatif PNBP Triwulan I 2024 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Pada triwulan I tahun 2024, tercatat peningkatan signifikan dalam realisasi PNBP bulan Maret. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengesahan pendapatan yang diterima Satker Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi berupa pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan.

Grafik 2.6 Tren PNBP Provinsi Lampung Tahun Triwulan I 2022-2024 (miliar rupiah)



Sampai dengan akhir Maret 2024, komponen PNBP Lainnya berkontribusi 53,08 persen dari total PNBP. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp229,77 miliar atau 54,95 persen dari target. Realisasi PNBP Lainnya utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sebagian besar merupakan penerimaan Satker Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Selain itu, penerimaan PNBP Lainnya disumbang oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan khususnya Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan Internasional sebagai pintu utama keluar masuknya barang/jasa ke Kota Bandar Lampung, serta Pendapatan atas Uang Pengganti Tipikor pada Satker Kejaksaan Negeri.

Selanjutnya, PNBP yang disumbang dari pendapatan BLU mencatat realisasi sebesar Rp203,07 miliar atau 33,39 persen dari target APBN yang tumbuh signifikan 349,72 persen (yoy). Capaian ini sebagian besar didukung oleh Pendapatan jasa layanan Pendidikan yang diberikan oleh Satker BLU, dengan pendapatan tertinggi berasal dari Universitas Lampung. Selain itu, Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit Bhayangkara juga turut menyumbang PNBP di Lampung melalui penerimaan atas layanan kesehatan. Pertumbuhan BLU mencerminkan semakin baiknya kinerja keuangan BLU yang dapat meningkatkan ruang fiskal bagi BLU untuk melakukan belanja yang semakin efektif dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1.4. Prognosis/Outlook Pendapatan Negara

Proyeksi Pendapatan Negara di Lampung sampai dengan akhir tahun 2024 ditunjukkan pada tabel 2.4. Melihat capaian kinerja Pendapatan Negara sampai dengan Triwulan I-2024, proyeksi Penerimaan yang berasal dari Perpajakan dan PNBP

diperkirakan akan terus tumbuh dan melampaui target pada akhir tahun 2024 yakni mencapai 102,52 persen dari target APBN dengan proyeksi capaian Rp11,46 triliun seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi yang meningkatkan konsumsi dan memperhatikan harga komoditas CPO yang akan perlahan membaik serta semakin optimalnya penerimaan atas layanan PNBP kepada masyarakat.

Tabel 2.4. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2024 Provinsi Lampung (miliar rupiah)

Triwulan	Pajak	PNPB	Total
Realisasi Q1	1.718,11	432,85	2.150,96
Proyeksi Q2	2.355,87	266,25	2.622,12
Proyeksi Q3	2.857,71	324,22	3.181,93
Proyeksi Q4	3.247,40	260,09	3.507,49
Total	10.179,09	1.283,41	11.462,50

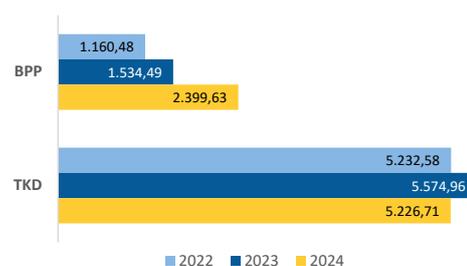
Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN (data diolah)

2.1.2. Belanja Negara

Pada tahun 2024 alokasi Belanja Negara di Lampung sebesar Rp31.688,26 miliar, sedikit menurun 1,52 persen (yoy). Alokasi ini terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.428,25 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp22.259,81 miliar. Sampai dengan akhir 31 Maret 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp7.626,33 miliar atau 24,07 persen dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 7,27 persen (yoy).

Realisasi Belanja Negara didominasi oleh penyaluran TKD dengan kontribusi 68,76 persen dari total Belanja Negara atau secara nominal Rp5.226,71 miliar. Sementara, untuk realisasi BPP memiliki kontribusi 31,46 persen atau secara nominal Rp2.399,63 miliar. Realisasi komponen Belanja Negara periode Triwulan I 2022 s.d. 2024 ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7 Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan I 2022 – 2024 (miliar rupiah)



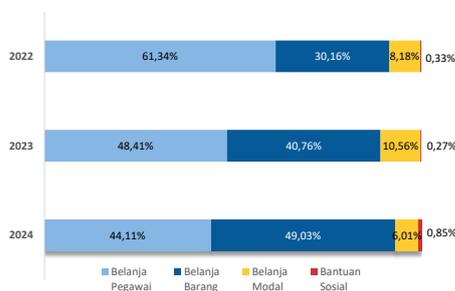
Sumber: OM-SPAN (diolah)

2.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Hingga 31 Maret 2024, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp2.399,63 miliar atau 25,45 persen dari pagu. Realisasi ini membukukan pertumbuhan yang signifikan yakni 56,38 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai.

Melihat kontribusi dari jenis BPP terhadap total realisasi BPP, pada Triwulan I-2022, komponen Belanja Pegawai mendominasi realisasi BPP. Namun, pada periode Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 kontribusi Belanja Pegawai menurun seiring peningkatan realisasi pada Belanja Barang. Hingga pada Triwulan I-2024, realisasi Belanja Barang memiliki kontribusi terbesar yakni 49,03 persen dari total realisasi BPP, diikuti oleh Belanja Pegawai (44,11 persen), Belanja Modal (6,01 persen), dan Bantuan Sosial (0,85 persen). Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja s.d. Maret 2024 disajikan sebagaimana grafik 2.8.

Grafik 2.8. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan I 2022 – 2024 (miliar rupiah)



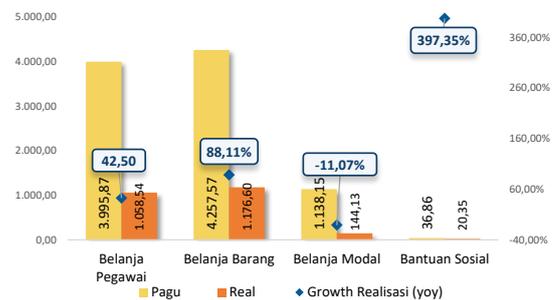
Sumber: OM-SPAN (data diolah)

2.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja

Melihat kinerja BPP sampai dengan 31 Maret 2024 per jenis belanja, Belanja Barang yang merupakan komponen terbesar BPP mencatatkan realisasi Rp1.176,60 miliar atau 27,64 persen dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 88,11 persen (yoy). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan Februari diantaranya untuk membiayai pengadaan logistik, barang/jasa dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara, pembayaran honor Badan AdHoc termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pengawasan pelaksanaan pemilu.

Hal ini menunjukkan bahwa APBN ikut berperan penting dalam mendukung pesta demokrasi dan menjaga stabilitas politik yang ke depannya dapat menjadi investasi integrasi nasional dalam jangka panjang. Selain itu, Belanja Barang juga dimanfaatkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Layanan Umum (BLU), pemeliharaan aset pemerintah, serta Belanja Barang untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Pertumbuhan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik 2.9.

Grafik 2.9 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA (data diolah)

Selanjutnya, Belanja Pegawai yang merupakan komponen terbesar kedua mencatatkan realisasi sebesar Rp1.058,54 miliar atau 26,49 persen dari pagu dengan pertumbuhan 42,50 persen (yoy), yang diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai dipengaruhi oleh adanya kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan pada tahun 2024 dan peningkatan pembayaran THR dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pemberian 100 persen untuk tunjangan kinerja untuk ASN Pusat dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN Daerah serta kenaikan dasar perhitungan yakni gaji pokok dan biaya pensiunan sebesar 12 persen. Alokasi Belanja Pegawai yang merupakan bagian instrumen APBN juga sebagai upaya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi yang dilakukan oleh ASN dan juga bentuk apresiasi pemerintah kepada ASN atas kinerja, kontribusi, dan pelayanan publik yang diberikan.

Apabila melihat kinerja berdasarkan pertumbuhan realisasi tertinggi secara tahunan, Belanja Bantuan Sosial memiliki pertumbuhan yang signifikan yakni

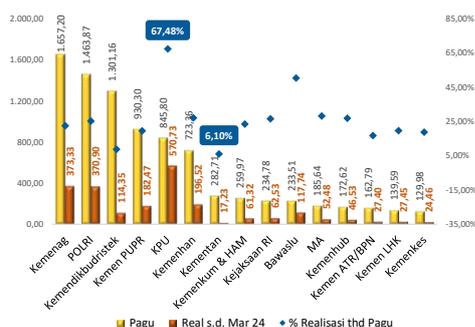


mencapai 397,35 persen (*yoy*) atau secara nominal terealisasi Rp20,35 miliar atau 55,21 persen dari pagu. Hal ini didukung oleh adanya percepatan waktu penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi berupa Kartu Indonesia Pintar. Bantuan Sosial Pendidikan di Lampung s.d. 31 Maret 2024 ini telah disalurkan melalui Satuan Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal tercatat mengalami penurunan secara tahunan sebesar 11,07 persen (*yoy*), atau secara nominal terealisasi Rp144,13 miliar, 12,66 persen dari pagu. Penurunan realisasi ini seiring dengan penurunan alokasi pagu Belanja Modal di Tahun 2024 yang cukup tinggi sebesar 31,41 persen (*yoy*) khususnya pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Penurunan alokasi ini disebabkan karena di tahun 2023 terdapat tambahan pagu untuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah serta alokasi pendanaan Proyek Strategis Nasional yang belum terdapat pada pagu sampai akhir Triwulan I-2024. Namun demikian, apabila dilihat dari tingkat serapan Belanja Modal menunjukkan akselerasi Belanja Modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Belanja Modal antara lain juga dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional berupa jalan dan jembatan, serta pembangunan prasarana jaringan sumber daya air yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2.1.2.3. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Grafik 2.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: SINTESA (data diolah)

Capaian kinerja BPP pada Triwulan I-2024 tentunya tidak terlepas dari kinerja lima belas Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang berkontribusi sebesar 92,52 persen dari total pagu BPP Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Kementerian Agama memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung TA 2024 mencapai Rp1.657,20 miliar yang didominasi oleh Belanja Pegawai yang salah satunya dialokasikan untuk membayar Gaji dan Tunjangan PPPK. Selanjutnya, POLRI merupakan urutan kedua dari lima belas K/L dengan pagu terbesar dengan total alokasi Rp1.463,87 miliar, diikuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total alokasi Rp1.301,16 miliar di urutan ketiga.

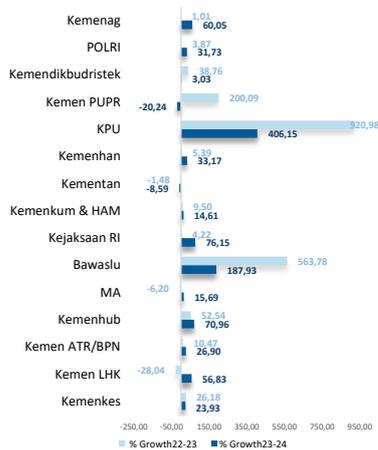
Melihat kinerja lima belas K/L dengan pagu terbesar berdasarkan tingkat penyerapan terhadap pagu pada Triwulan I-2023, persentase realisasi tertinggi terdapat pada Komisi Pemilihan Umum sebesar 67,48 persen dari pagu. Hal ini utamanya disumbang oleh penyerapan Belanja Barang yang mendominasi total alokasi pagu pada Komisi Pemilihan Umum, yang dimanfaatkan mendukung penyelenggaraan Pemilu pada Bulan Februari 2024 yang dilaksanakan serentak secara nasional serta persiapan pemilu kepala daerah. Di sisi lain, tingkat serapan yang belum optimal terdapat pada Kementerian Pertanian yang hanya mencapai 6,10 persen dari pagu. Hal ini disebabkan antara lain karena penyerapan Belanja Barang dalam bentuk Belanja Bantuan Pemerintah masih dalam tahap persiapan pelaksanaan lelang atas optimalisasi lahan. Selain itu, pembangunan laboratorium kesehatan hewan baru akan direncanakan lelang konstruksi pada bulan April dan pengadaan alat laboratorium baru terlaksana ketika proses konstruksi selesai.

Lebih lanjut, apabila dilihat dari persentase pertumbuhan realisasi BPP dari 15 K/L dengan Pagu terbesar di Provinsi Lampung, tingkat pertumbuhan terbesar terjadi pada Satker Komisi Pemilihan Umum dengan persentase 406,15 persen (*yoy*). Kemudian diikuti oleh Satker Badan Pengawasan Pemilu dengan peningkatan 187,93 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja yang melanjutkan



peningkatan signifikan dari tahun 2023 pada Satker KPU juga seiring dengan peningkatan alokasi belanja untuk pelaksanaan pemilu. Grafik 2.11 menunjukkan pertumbuhan realisasi belanja pada periode Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 pada lima belas K/L dengan alokasi pagu terbesar.

Grafik 2.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar Tahun 2024 (persen)



Sumber: SINTESA (data diolah)

Pertumbuhan realisasi belanja Triwulan I juga tercatat pada Kementerian Perhubungan (70,96 persen), Kejaksaan RI (76,15 persen) Kementerian Agama (60,05 persen), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (56,83 persen), Kementerian Pertahanan (33,17 persen), Kepolisian RI (31,37 persen), Mahkamah Agung (15,69 persen), Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional (26,90 persen), Kementerian Kesehatan (23,93 persen), Kementerian Hukum dan HAM (14,61 persen), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (3,03 persen). Sementara, penurunan realisasi Belanja tercatat pada dua K/L yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (20,24 persen) dan Kementerian Pertanian (8,59 persen).

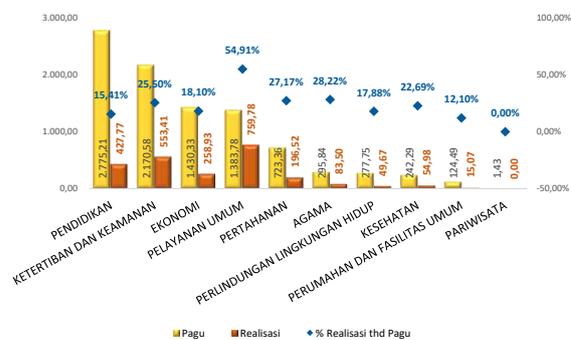
2.1.2.4. Berdasarkan Fungsi

Sebaran BPP berdasarkan Fungsi ditunjukkan sebagaimana pada Grafik 2.12. Alokasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pendidikan dengan porsi 29,45 persen dari total APBN di Provinsi Lampung Tahun 2024, secara urut diikuti oleh fungsi Ketertiban dan Keamanan (23,03 persen), Ekonomi (15,18 persen), Pelayanan Umum (14,68 persen), Pertahanan (7,67 persen), Agama (3,14 persen),

Pelindungan Lingkungan Hidup (2,95 persen), Kesehatan (2,57 persen), Perumahan dan Fasilitas Umum (1,32 persen), dan Pariwisata (0,02 persen). Alokasi terbesar pada Fungsi Pendidikan terdapat pada Sub Fungsi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya. Alokasi Belanja pada fungsi pendidikan ini sejalan dengan visi APBN Tahun 2024 nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sebagai fondasi untuk menuju Indonesia Maju.

Sampai dengan 31 Maret 2024, persentase penyerapan pada Fungsi Pendidikan mencapai 15,41 persen dari total pagu, yang diantaranya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana, dan penyelenggaraan pendidikan, serta tata kelola kelembagaan publik Bidang Pendidikan. Alokasi belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan telah terserap 25,50 persen dari total pagu, yang diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparat Hukum, modernisasi almatsus dan sarana dan prasarana POLRI, penegakan dan pelayanan hukum, dan program lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Grafik 2.12. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2024 (miliar Rp, persen)

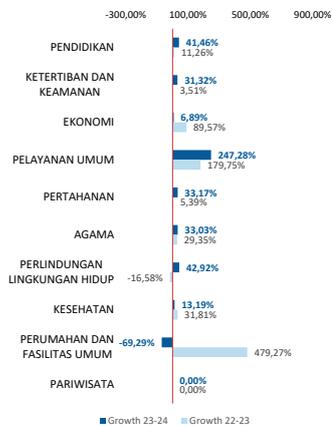


Sumber: SINTESA (data diolah)

Selanjutnya, belanja pada Fungsi Ekonomi telah terserap 18,10 persen dari total pagu, yang diantaranya dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan tingkat inflasi, antisipasi perubahan iklim, peningkatan kualitas SDM dan ketenagakerjaan, pengembangan sektor riil, hingga pembangunan konektivitas untuk memperlancar arus barang dan jasa. Fungsi Pelayanan Umum memiliki persentase penyerapan terbesar mencapai 54,91 persen dari total pagu. Di sisi lain, belanja

pada Fungsi Pariwisata dengan alokasi pagu terendah, belum terdapat serapan belanja pada Triwulan I.

Grafik 2.13 Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA (data diolah)

Selanjutnya, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja, Fungsi Pelayanan Umum melanjutkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun lalu hingga 247,28 persen (yoy), termasuk di dalamnya merupakan realisasi belanja untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari Fungsi Pendidikan dengan pertumbuhan 41,46 persen (yoy) yang antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Guru/PNS/PPPK serta operasional penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, realisasi belanja pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami pertumbuhan negatif disebabkan karena alokasi pagu yang mengalami penurunan dari tahun 2023, serta terdapat pagu yang masih terblokir untuk pemberian bantuan ke masyarakat berupa infrastruktur air minum yang direncanakan terealisasi pada triwulan berikutnya.

2.1.2.5. Belanja Pemerintah Pusat Per kapita

Perhitungan BPP Per Kapita dilakukan menggunakan realisasi BPP sampai dengan Maret 2022-2024 dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan yang diperoleh dari portal resmi BPS. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk di provinsi Lampung pada tahun 2024 mencapai 9,42 juta jiwa, angka ini naik 1,13 persen (yoy) dari jumlah penduduk pada tahun 2023.

Pada periode Triwulan I-2024, BPP Per Kapita di Lampung mencapai sebesar Rp254.794 atau meningkat cukup tinggi yakni 54,63 persen (yoy) seiring dengan realisasi BPP yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat peningkatan belanja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada setiap penduduk. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan I tahun 2022 s.d. 2024 ditunjukkan pada grafik 2.14.

Grafik 2.14 Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan-I 2023 (rupiah, jiwa)

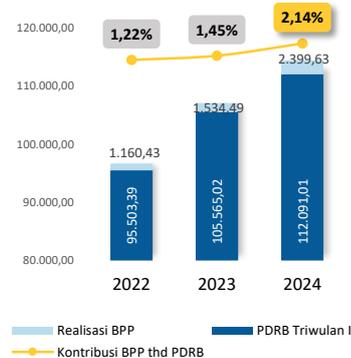


Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung (diolah)

2.1.2.6. Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Realisasi BPP di Lampung sampai dengan 31 Maret 2024 memberikan kontribusi terhadap PDRB Triwulan I sebesar 2,14 persen atau naik 0,69 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi ini mencerminkan belanja yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan turut menyumbang PDRB Lampung melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Peningkatan kontribusi ini dipicu oleh peningkatan belanja pemerintah pada periode Triwulan I-2024 melalui komponen Belanja Barang yang secara tahunan tumbuh tinggi yakni 88,11 persen (yoy) diikuti oleh Belanja Pegawai yang tumbuh 42,50 persen (yoy).

Grafik 2.15. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2022 – 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN, SINTESA, BPS Provinsi Lampung (diolah)

2.1.3. Transfer ke Daerah

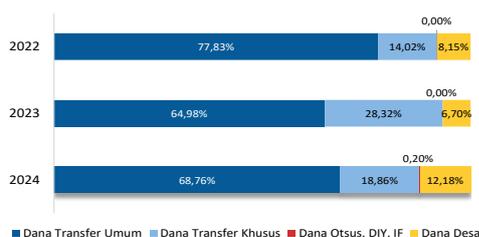
Kebijakan TKD pada Tahun 2024 menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui optimalisasi penggunaan TKD pada sektor-sektor prioritas dan produktif seperti perluasan kebijakan *earmarking* sesuai dengan prioritas nasional, serta perbaikan tata kelola TKD yang berkelanjutan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian di daerah.

Alokasi TKD pada tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp22.259,81 miliar, meningkat 3,11 persen (*yoy*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. DTU terdiri dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara DTK terdiri dari Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik.

Peningkatan alokasi TKD utamanya berasal dari peningkatan DTU alokasi berupa DAU sebesar 7,56 persen dan DTK berupa DAK Fisik sebesar 17,95 persen. Sementara, kinerja penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2024 secara nominal telah tersalurkan sebesar Rp5.226,71 miliar atau 23,48 persen dari pagu, tercatat tumbuh negatif 6,25 persen (*yoy*). Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh penurunan penyaluran DTK dan DBH.

Selama tiga tahun terakhir, Penyaluran DTU masih mendominasi penyaluran TKD di Provinsi Lampung, meskipun secara proporsi menurun di tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Distribusi penyaluran TKD Triwulan I pada tahun 2022 s.d. 2023 ditunjukkan sebagaimana Grafik 2.16.

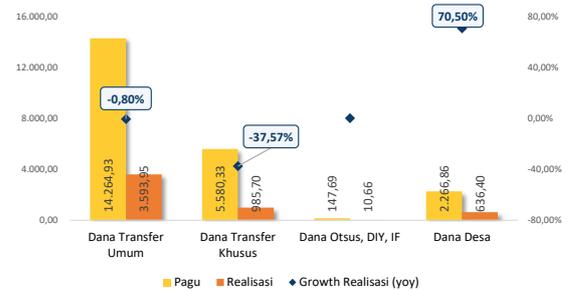
Grafik 2.16 Distribusi Penyaluran TKD Triwulan I 2022 – 2024 per Jenis (miliar rupiah, persen)



Sumber: SIMTRADA, SINTESA (diolah)

Pada Triwulan I-2024, penyaluran DTU memiliki porsi 68,76 persen dari total penyaluran TKD, diikuti oleh DTK 18,86 persen, Dana Desa 12,18 persen, dan Dana Insentif Fiskal 0,20 persen. Penyaluran DTU utamanya bersumber dari komponen DAU, sedangkan DTK didominasi oleh DAK Non Fisik.

Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Penyaluran TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Triwulan I-2024 (miliar rupiah)



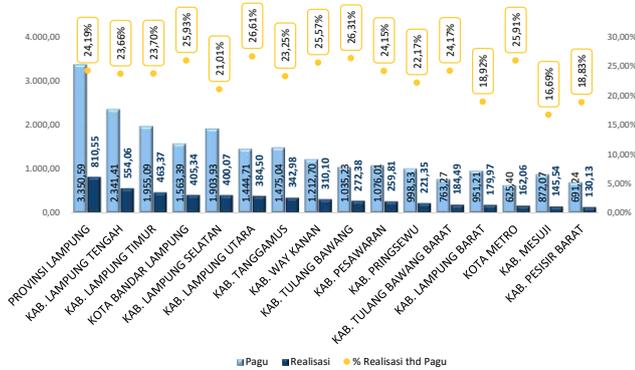
Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2024, penyaluran DTU yang mendominasi TKD secara nominal tersalur Rp3.593,95 miliar atau 25,19 persen dari pagu, tercatat sedikit terkontraksi 0,80 persen (*yoy*), utamanya disumbang oleh penurunan penyaluran komponen DBH. Selain penyaluran DTU, kontraksi juga tercatat pada penyaluran DTK sebesar 37,57 persen (*yoy*), secara nominal tersalur Rp985,70 miliar atau 17,66 persen dari pagu, utamanya karena penurunan penyaluran komponen DAK Non Fisik. Penyaluran DTK sampai dengan 31 Maret 2023 hanya terdiri dari penyaluran komponen DAK Non Fisik, sedangkan untuk komponen DAK Fisik belum terdapat penyaluran. Selanjutnya, Dana Insentif Fiskal telah tersalur sebesar Rp10,66 miliar atau 7,22 persen dari pagu, penyaluran ini tercatat meningkat dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat penyaluran Insentif Fiskal. Di sisi lain, Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp636,40 miliar atau 28,7 persen, dimana angka penyaluran ini meningkat signifikan yakni 70,50 persen (*yoy*).

Kinerja penyaluran TKD secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen syarat salur yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran TKD di tingkat pusat. Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD pada masing-masing pemerintah daerah, dapat dilihat melalui persentase penyaluran TKD pada

masing-masing pemerintah daerah serta pertumbuhannya sebagaimana disajikan pada grafik 2.17.

Grafik 2.17. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD Triwulan I-2024 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen)

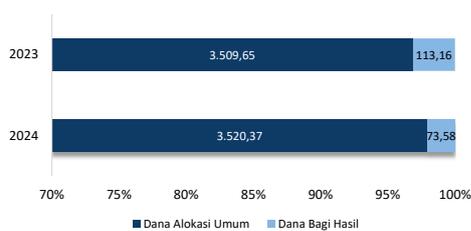


Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Berdasarkan grafik tersebut, sampai dengan 31 Maret 2023, Lampung Utara merupakan pemerintah daerah dengan persentase penyaluran TKD terbesar yakni 26,61 persen dari pagu didukung oleh realisasi DBH dan Dana Desa yang cukup baik. Sementara Mesuji merupakan pemerintah daerah dengan persentase penyaluran terendah yakni 16,69 persen dari pagu dipengaruhi oleh penyaluran DAK Non Fisik yang masih kurang optimal.

2.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 2.18 Komponen Penyaluran DTU Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen)

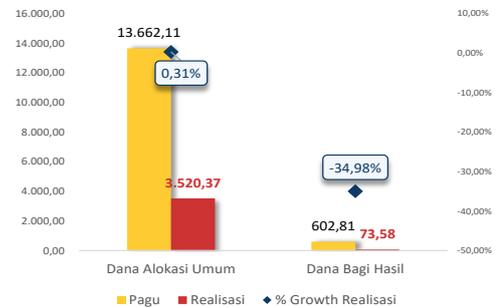


Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Alokasi DTU Tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp14.264,93 miliar, meningkat 4,51 persen (yoy) dari alokasi tahun 2023. Sampai dengan 31 Maret 2024, DTU telah tersalur sebesar Rp3.593,95 miliar atau 25,19 persen dari pagu, yang terdiri dari komponen DAU dan DBH. Angka penyaluran ini sedikit terkontraksi 0,80 persen (yoy), utamanya karena penurunan penyaluran komponen DBH. Penyaluran komponen DAU mendominasi penyaluran DTU yakni sebesar 97,95 persen.

Sedangkan komponen DBH menyumbang kontribusi terhadap penyaluran DTU dengan porsi yang minim, yakni 2,05 persen.

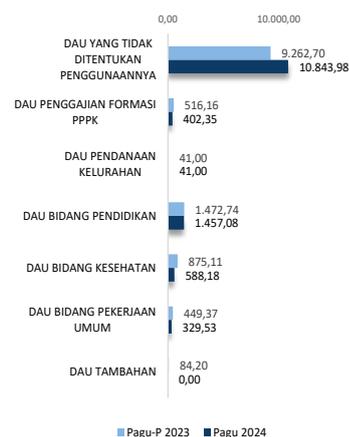
Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTU Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Pada Tahun 2024, Alokasi DAU di Provinsi Lampung sebesar Rp13.662,11 miliar, meningkat 7,56 persen (yoy), yang terdiri dari dua jenis DAU yakni DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya terbagi ke dalam beberapa bidang antara lain DAU Penggajian Formasi PPPK, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, dan DAU Bidang Pekerjaan Umum. Rincian alokasi DAU per jenis sebagaimana pada Grafik 2.19.

Grafik 2.19 Pagu DAU Per Jenis Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

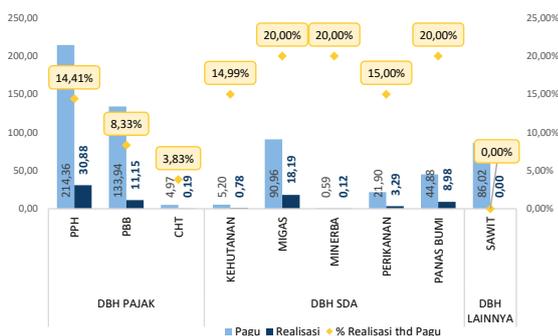
Sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2024, DAU yang telah disalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp3.520,37 miliar, atau 25,77 persen dari pagu, tercatat mengalami sedikit peningkatan yakni 0,31 persen (yoy). DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya telah tersalur tepat waktu pada

setiap bulannya dengan total nominal salur Rp3,518.87 miliar, yang di dalamnya termasuk potongan DAU pada pemda Tulang Bawang Barat untuk pembayaran kembali pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka PEN untuk pemerintah daerah Tahun 2021. Selanjutnya, untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya, secara nominal telah tersalur Rp1,5 miliar yang seluruhnya merupakan DAU Pendanaan Kelurahan pada Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Way Kanan.

Selanjutnya, untuk Komponen DBH memiliki alokasi sebesar Rp602,81 miliar, menurun 36,45 persen (yoy) yang terdiri dari alokasi DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya. Perhitungan alokasi DBH TA 2024 dilakukan berdasarkan data tahun 2023 yang di proyeksikan sampai semester II, dengan perhitungan alokasi formula dan alokasi kinerja.

Jumlah DBH yang telah disalurkan selama Triwulan I sebesar Rp73,58 miliar, atau 12,21 persen. Jumlah penyaluran ini terkontraksi 34,98 persen (yoy) dipengaruhi penurunan realisasi seluruh jenis DBH, juga seiring penurunan pagu dari tahun 2023. Rincian pagu, realisasi, dan pertumbuhan penyaluran DBH dijelaskan pada Grafik 2.20 berikut.

Grafik 2.20 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)



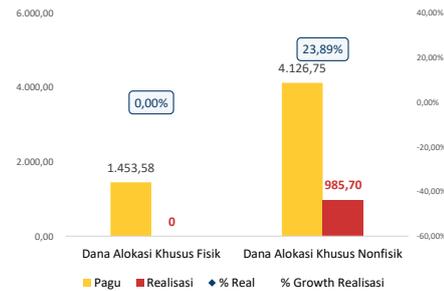
Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

Alokasi DBH Pajak memiliki porsi terbesar dari total alokasi DBH di Provinsi Lampung. Sampai dengan 31 Maret 2024, DBH PPh telah tersalur Rp30,88 miliar atau 14,41 persen dari pagu. DBH PBB telah tersalur Rp11,15 miliar atau 8,33 persen dari pagu. Sementara dari sektor SDA, nominal penyaluran

terbesar berasal dari DBH Migas sebesar Rp18,19 miliar atau 15 persen dari pagu. DBH Panas Bumi tersalur Rp8,98 miliar atau 20 persen dari pagu. Untuk DBH yang sifatnya *earmarked* diantaranya DBH CHT, DBH Kehutanan Dana Reboisasi, dan DBH Sawit penyalurannya masih perlu dioptimalkan.

2.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

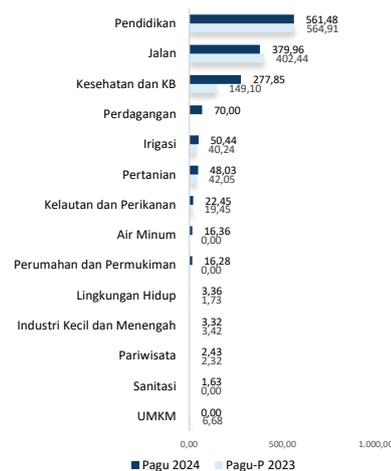
Grafik 2.21 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTK Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Dalam APBN Provinsi Lampung TA 2024, alokasi DTK mencapai sebesar Rp5.80,33 miliar, meningkat 3,72 persen (yoy), yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi DTK secara nominal mencapai Rp5,27 triliun dengan penyaluran sebesar 97,93 persen dari pagu, terkontraksi 5,47 persen (yoy) dibanding tahun lalu utamanya karena penurunan penyaluran komponen DAK Non Fisik.

Grafik 2.22 Alokasi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2023 dan 2024 (miliar, Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Alokasi DAK Fisik TA 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp1.453,58 miliar, meningkat 17,95 persen (yoy). Peningkatan alokasi pagu DAK Fisik

spesifiknya pada Bidang Kesehatan dan KB, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata. Rincian alokasi DAK Fisik per Bidang disajikan sebagaimana Grafik 2.22.

Sampai dengan 31 Maret 2024, belum terdapat penyaluran DAK Fisik pada seluruh pemda di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena saat ini pemerintah daerah dalam proses penyiapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, yang di antaranya tahapan penetapan kontrak pengadaan barang dan jasa. Rentang waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lambat dilakukan sampai dengan bulan Juli. Untuk mendorong penyaluran DAK Fisik, Kanwil DJPb dan seluruh KPPN di Provinsi Lampung secara aktif menjalin koordinasi dan komunikasi antar level dengan pemerintah daerah, serta melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik kepada seluruh pemda di wilayah Lampung.

Selanjutnya, untuk Komponen DAK Non Fisik, alokasi pagu Tahun 2024 di Provinsi Lampung secara total sebesar Rp4.126,75 miliar atau sedikit menurun 0,5 persen (*yoy*) dari alokasi Tahun 2023. Jenis DAK Non Fisik di Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis yang ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2024 (miliar, Rp)

Jenis	Pagu	Realisasi	% Real thd Pagu	Realisasi 2023	% Growth Realisasi (<i>yoy</i>)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	1.714,42	0,00	0,00	510,20	(100,00)
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	17,62	0,00	0,00	4,10	(100,00)
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	35,92	0,00	0,00	12,86	(100,00)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.651,86	803,06	48,62	781,35	2,78
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	411,79	59,66	14,49	143,67	(58,48)
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	93,45	31,91	34,15	44,54	(28,35)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5,78	2,68	46,41	4,08	(34,18)
Dana Pelayanan Kepariwisata	2,20	1,10	50,00	0,00	0,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	123,68	60,52	48,94	55,40	9,25
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	41,05	19,41	47,29	16,61	16,87
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5,50	2,75	50,00	2,75	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6,32	2,55	40,36	2,82	(9,58)
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	8,01	1,20	14,95	0,51	133,36
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1,72	0,86	50,00	0,00	0,00
Total	4.126,75	985,70	23,89	1.578,89	(37,57)

Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2024, DAK Non Fisik di Provinsi Lampung telah tersalur Rp985,70 miliar

atau 23,89 persen dari pagu. Angka penyaluran ini tercatat menurun secara tahunan sebesar 37,57 persen (*yoy*). Penurunan ini dipengaruhi beberapa jenis DAK Non Fisik yang belum terdapat penyaluran diantaranya Dana Tunjangan Profesi Guru ASN-D, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN-D, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN-D. Penyaluran Dana Tunjangan Guru ASN-D dilakukan berdasarkan rekomendasi penyaluran yang disampaikan oleh Kemendikbud berdasarkan kelengkapan dokumen syarat salur yang disampaikan oleh pemda. Untuk triwulan I, penyaluran Dana Tunjangan Guru ASN-D dilaksanakan paling cepat pada Bulan Maret sebesar 30 persen dari alokasi.

Selain itu, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak juga kian mencatatkan penurunan secara tahunan. Namun di sisi lain, peningkatan ditunjukkan pada penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan, didukung oleh perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan Kemendikbudristek.

2.1.3.3. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal

Alokasi Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2024 sebesar Rp147,69 miliar, yang seluruhnya merupakan Penghargaan atas kinerja tahun sebelumnya yang diberikan kepada 11 pemda di wilayah Provinsi Lampung. Kriteria yang digunakan untuk alokasi Insentif Fiskal TA 2024 atas kinerja tahun berjalan merupakan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah, diantaranya: pengendalian inflasi daerah; penggunaan Produk Dalam Negeri penurunan angka kemiskinan ekstrem; penurunan tingkat prevalensi stunting; dan percepatan belanja APBD.

Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 tercatat menurun 42,30 persen (*yoy*), dikarenakan belum terdapat tambahan alokasi Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan dan Insentif Fiskal untuk daerah tertinggal atas kinerja tahun sebelumnya. Sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi penyaluran Insentif Fiskal sebesar Rp10,66 miliar, atau 7,22 persen dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya dimana belum terdapat



penyaluran. Angka realisasi tersebut merupakan Insentif Fiskal yang disalurkan kepada pemda Tulang Bawang pada Maret 2024. Capaian ini dipengaruhi oleh koordinasi yang terus dibangun kepada pemda penerima Insentif Fiskal terkait penggunaan dana dan pemenuhan dokumen syarat salur. Rincian pagu dan realisasi Insentif Fiskal di Provinsi Lampung per 31 Maret 2024 disajikan sebagaimana Grafik 2.23

Grafik 2.23 Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2024 per 31 Maret 2024 (miliar Rp)



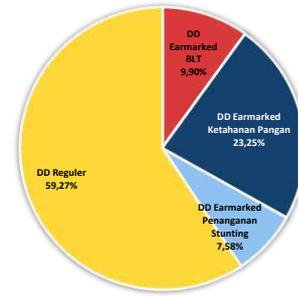
Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

2.1.3.4. Dana Desa

Pada tahun 2024, pagu Dana Desa terbagi atas dana desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*), yang masing-masing disalurkan dalam dua tahap. Dana Desa *earmarked* merupakan Dana Desa dengan prioritas utama yang ditujukan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, Dana Desa *non-earmarked* merupakan Dana Desa yang ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal pada BUMDes.

Pagu Dana Desa Tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp2.266,86 miliar, menurun 1,60 persen (*yoy*). Alokasi ini terdiri dari Dana Desa Reguler sebesar Rp1.343,56 miliar, Dana Desa *Earmarked* Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp224,51 miliar, Dana Desa *Earmarked* Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar Rp527,04 miliar, dan Dana Desa *Earmarked* Program Pencegahan dan Penanganan Stunting sebesar Rp171,72 miliar.

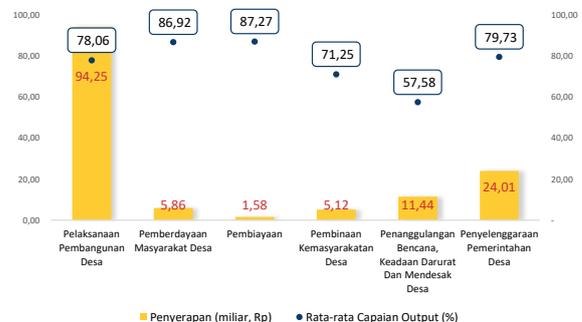
Grafik 2.24 Distribusi Pagu Dana Desa *Earmarked* dan *Non-Earmarked* Tahun 2024 (miliar Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2024, Dana Desa yang telah tersalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp636,39 miliar yang terdiri dari Penyaluran Dana Desa *Earmarked* Tahap I sebesar Rp313,13 miliar dan kepada 2.384 desa dan Dana Desa Reguler Tahap I sebesar Rp323,26 miliar kepada 2.381 desa. Angka penyaluran ini mencatat peningkatan yang signifikan yakni 70,50 persen (*yoy*), yang dipengaruhi oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa yang semula dilakukan tiga tahap menjadi dua tahap, pemberian *reward* berupa persentase penyaluran Dana Desa *Non Earmarked* Tahap I yang lebih besar untuk Desa yang berstatus Mandiri, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan paling lambat pada Bulan Juni, sehingga masih terdapat ketersediaan waktu bagi pemda yang masih memiliki desa belum salur Tahap I untuk mengajukan dokumen syarat salur ke KPPN.

Grafik 2.25. *Clustering* Penyerapan Dana Desa Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN, data sementara diakses 28 Mei 2024 (diolah)

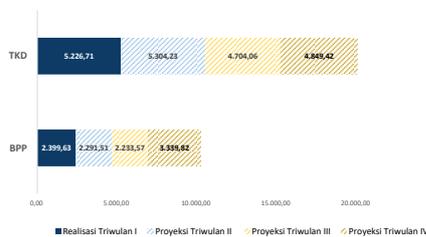
Dari total Dana Desa yang telah tersalur, nominal dana yang telah terserap dan dilaporkan oleh pemda adalah sebesar Rp142,26 miliar. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tercatat memiliki



nominal penyerapan tertinggi sebesar Rp94,25 miliar, diantaranya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana infrastruktur dan transportasi desa, seperti pembangunan jalan usaha tani, prasarana jalan dan jembatan desa, hingga fasilitas penunjang kesehatan desa seperti gedung posyandu dan mobil ambulance. Sementara, apabila dicermati dari rata-rata persentase capaian output, Bidang Pembiayaan memiliki rata-rata persentase tertinggi yakni 86,92 persen, diantaranya dimanfaatkan untuk penyertaan modal BUMDes.

2.1.4. Prognosis/Outlook Belanja Negara

Grafik 2.26 Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2024 (miliar, Rp)



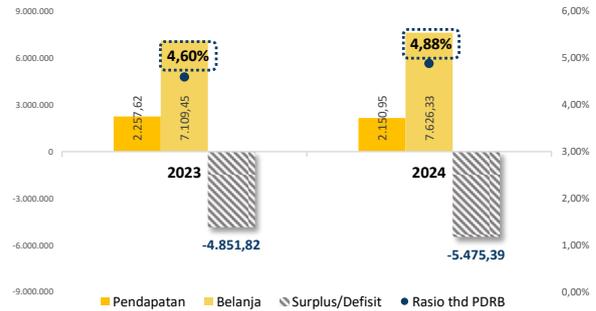
Sumber: OM-SPAN, Halaman III DIPA, ALCo (diolah)

Proyeksi realisasi Belanja Negara diperoleh dari penjumlahan proyeksi BPP dan TKD. Perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan *data series* selama lima tahun terakhir. Proyeksi BPP dilakukan berdasarkan proyeksi Halaman III DIPA Satuan Kerja, sementara untuk proyeksi TKD dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata eksponensial.

Pada Triwulan II, Belanja Negara diproyeksikan terealisasi sebesar Rp7.595,74 miliar yang terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp5.304,23 miliar dan proyeksi TKD Rp2.291,51 miliar. Hingga akhir tahun, dengan memperhitungkan realisasi pada Triwulan I, realisasi Belanja Negara proyeksikan sebesar Rp30.348,94 miliar atau 95,77 persen dari pagu. Angka proyeksi tersebut terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp10.264,53 miliar dan proyeksi TKD sebesar Rp20.084,42 miliar. Pada Triwulan IV Belanja Negara diproyeksikan masih memiliki tren penyaluran yang lebih tinggi didorong oleh optimalisasi anggaran dan pelaksanaan Langkah-langkah Akhir Tahun.

2.1.5. Surplus/Defisit APBN

Grafik 2.27 Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2023-2024 (miliar, Rp)



Sumber: OM-SPAN (diolah)

Pada Triwulan I, posisi APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp5.475,39 miliar, atau secara tahunan melebar 12,85 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Melebarnya defisit ini dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Negara yang tumbuh, namun di sisi Penerimaan Negara mengalami kontraksi.

Rasio defisit APBN terhadap PDRB triwulan I sebesar 4,88 persen. Rasio ini meningkat dari Triwulan I-2023 yang tercatat sebesar 4,60 persen, seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Negara untuk mendukung program strategis nasional dan penurunan pada sisi Pendapatan Negara yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas dan produktivitas perekonomian.

2.1.6. Capaian Output Sektoral

Tabel 2.6 Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	27,28	4,55	16,68	0,25	Lembaga
Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM-21)	3,33	0,27	8,25	148,00	orang
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM-21)	1,89	1,14	60,46	11,00	Model
Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	11,46	0,01	0,09	370,00	Lembaga
Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	6,40	1,28	20,00	11.931	Orang
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	2,42	1,78	73,52	6.879	Orang

Sumber: OM-SPAN (diolah)

Belanja Negara untuk Bidang Kesehatan dialokasikan dalam rangka menjamin

terselenggaranya layanan kesehatan yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara merata dan berkeadilan. Akses layanan dasar Kesehatan yang merata terus Berikut merupakan rincian Belanja Negara di Bidang Kesehatan Triwulan I-2024 disajikan sebagaimana Tabel 2.6.

Selain itu, alokasi belanja pada Bidang Pendidikan juga menjadi prioritas dalam APBN 2024 dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia maju. Realisasi belanja pada Bidang Pendidikan pada Triwulan I-2024 telah menghasilkan beberapa output strategis di antaranya sebagaimana pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	185,56	4,99	2,69	34.137	Orang
Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	92,41	4,20	4,54	1.354	Orang
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	90,59	1,87	2,06	348	Orang
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	45,11	3,91	8,67	415	Orang
Penerima BOS	59,63	18,14	30,42	21.347	Orang
Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	120,00	21,14	17,61	5.305	Orang
Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	36,80	20,33	55,26	2.298	Orang

Sumber: OM-SPAN (diolah)

Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur Triwulan I-2024 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan	67,14	38,18	56,87	6,00	km
Jalan Strategis (ProPN)	115,95	22,54	19,44	1,62	km
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	111,39	22,51	20,21	129,34	km
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	36,50	4,08	11,17	53,00	km
Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	73,21	12,36	16,89	424,26	km
Embung yang dioperasikan dan dipelihara	10,11	2,31	22,83	28,76	unit

Sumber: OM-SPAN (diolah)

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Lampung juga terus didorong di antaranya untuk membangun konektivitas wilayah, peningkatan jaringan sumber daya air mendukung sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, serta menstimulasi sektor properti. Realisasi belanja negara di Bidang Infrastruktur pada Triwulan I-2024 dimanfaatkan untuk beberapa output strategis sebagaimana Tabel 2.8.

2.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Berdasarkan capaian Pendapatan Negara yang cukup tangguh dan penyerapan Belanja Negara yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Maret 2024 berjalan adaptif dalam merespons tantangan perekonomian, mendukung program prioritas nasional, serta menjadi *buffer* dalam mengantisipasi berbagai risiko global yang berdampak pada level regional. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya dihadapkan sejumlah kendala dan tantangan, antara lain terkait:

1. Pelaksanaan Pendapatan Negara, diantaranya:
 - a. Kinerja sektor Industri Pengolahan yang menyumbang kontribusi cukup dominan dari total penerimaan pajak, mengalami kontraksi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan kegiatan ekonomi pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit.
 - b. Devisa impor mengalami penurunan yang disebabkan karena penurunan devisa importasi Minyak Mentah dan penurunan devisa bungkil dan residu.
2. Pelaksanaan Belanja Negara, diantaranya:
 - a. Adanya potensi deviasi RPD halaman III DIPA untuk belanja pegawai triwulan I, yang disebabkan PP THR untuk tahun 2024 terbit setelah batas akhir pengajuan revisi Halaman III DIPA di triwulan I 2024, sehingga banyak satker mengalokasikan THR Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen mengikuti PP THR tahun lalu.
 - b. Kinerja penyaluran TKD masih perlu dioptimalkan khususnya pada komponen

TKD yang sifatnya *earmarked* seperti DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

- c. Perubahan peraturan terkait proses penyaluran Dana Desa mampu meningkatkan kecepatan tingkat salur Dana Desa, sementara rendahnya penyaluran TKD berupa DTK/DTU didominasi utamanya akibat keterlambatan dalam pemenuhan dokumen salur oleh pemda, perubahan pejabat penandatanganan dokumen salur, dan keterlambatan juknis yang pada akhirnya memperlambat proses berikutnya.
- d. Pada wilayah tertentu, seperti Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, permasalahan jaringan internet masih menjadi kendala krusial yang dihadapi dalam melakukan entri/upload data di aplikasi OMSPAN-TKD sehingga menghambat proses penyaluran di KPPN.
- e. Selain itu, persoalan di internal Kemenkeu yang menghambat proses penyaluran TKD di KPPN pada triwulan I TA 2024 adalah penerbitan rekomendasi penyaluran yang terbit menjelang batas akhir penyaluran di KPPN dan kewajiban KPPN membuat RPD nya.

Dalam merespons kendala dan tantangan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan, terkait:

1. Penerimaan Negara, yakni memberikan insentif-insentif pajak dan fasilitasi bea masuk kepada industri lokal yang mendukung diversifikasi pasar dan hilirisasi untuk menstimulasi sektor riil agar bangkit kembali.
2. Belanja Negara, yakni:
 - a. Perlu adanya relaksasi IKPA untuk indikator deviasi halaman III DIPA periode bulan Maret-April 2024 dalam hal terjadi deviasi yang lebar akibat alokasi pembayaran THR yang lebih rendah.
 - b. Kinerja Penyaluran TKD, dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan peraturan proses salur TKD oleh Kemenkeu dalam hal ini DJPK dengan mengurangi tahapan salur

sebagaimana perubahan aturan tahapan salur Dana Desa, mempercepat proses penerbitan rekomendasi salur oleh DJPK, serta fasilitasi penerbitan RPD oleh KPPN melalui aplikasi OMSPAN-TKD yang terintegrasi dengan data rencana salur.

- c. Perlunya perbaikan sistem monitoring pada OMSPAN-TKD yang dapat memberi akses bagi KPPN dalam melakukan monitoring secara cepat atas kesalahan data yang dilakukan oleh pemda/desa sehingga koordinasi dan komunikasi antara KPPN dan pemda dapat dilakukan lebih dini.

2.2. PELAKSANAAN APBD

APBD tahun 2024 menargetkan pendapatan agregat regional Lampung yang naik 1,76 persen menjadi Rp32.262,05 miliar dibanding tahun 2023. Hal ini seiring dengan peningkatan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai sumber utama pendapatan daerah di regional Lampung. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan naik 3,90 persen, demikian pula Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan naik 2,47 persen. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 3,65 persen di angka Rp8.125,39 miliar dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah turun 4,01 persen menjadi Rp199,58 miliar. Meski PAD ditargetkan turun namun target Retribusi Daerah naik 356,95 persen terkait adanya pengaturan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah dimana tahun sebelumnya dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, APBD tahun 2024 mengalokasikan Belanja sebesar Rp32.343,51 miliar yang sedikit menurun dari alokasi Belanja Daerah tahun 2023 sebesar 0,05 persen (yoy). Penurunan alokasi Belanja Daerah khususnya terjadi pada Belanja Modal, beberapa komponen Belanja Operasi berupa Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Subsidi, serta komponen Belanja Transfer yang berupa Belanja Bantuan Keuangan.

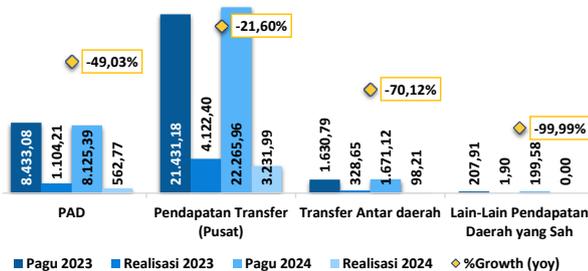
Tabel 2.9. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2023			TA 2024			%Growth (2023-2024)	
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	31.702,97	5.557,16	17,53	32.262,05	3.892,98	12,07	1,76	(29,95)
PAD	8.433,08	1.103,82	13,09	8.125,39	560,36	6,90	(3,65)	(49,23)
Pendapatan Transfer (Pusat)	21.431,18	4.122,40	19,24	22.265,96	3.231,99	14,52	3,90	(21,60)
Transfer Antar daerah	1.630,79	328,65	20,15	1.671,12	98,21	5,88	2,47	(70,12)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	207,91	2,28	1,10	199,58	2,4107	1,21	(4,01)	5,54
BELANJA DAERAH	32.358,72	3.418,48	10,56	32.343,51	3.804,51	11,76	(0,05)	11,29
Belanja Operasi	22.600,15	2.644,72	11,70	22.965,31	2.950,47	12,85	1,62	11,56
Belanja Pegawai	11.791,05	1.859,37	15,77	12.679,89	1.944,75	15,34	7,54	4,59
Belanja Barang dan Jasa	8.858,81	750,64	8,47	8.216,82	855,87	10,42	(7,25)	14,02
Belanja Bunga	53,52	13,70	25,60	45,49	10,11	22,23	(15,02)	(26,19)
Belanja Subsidi	6,95	0,00	-	4,73	0,00	-	(31,85)	-
Belanja Hibah	1.837,55	20,47	1,11	1.991,11	139,15	6,99	8,36	579,91
Belanja Bantuan Sosial	52,26	0,54	1,04	27,27	0,58	2,14	(47,82)	7,60
Belanja Modal	4.497,65	205,74	4,57	4.041,42	334,16	8,27	(10,14)	62,41
Belanja Modal	4.497,65	205,74	4,57	4.041,42	334,16	8,27	(10,14)	62,41
Belanja Tidak Terduga	79,11	7,01	8,86	124,16	3,20	2,58	56,94	(54,33)
Belanja Tidak Terduga	79,11	7,01	8,86	124,16	3,20	2,58	56,94	(54,33)
Belanja Transfer	5.181,81	561,01	10,83	5.212,61	516,68	9,91	0,59	(7,90)
Belanja Bagi Hasil	1.747,66	421,20	24,10	1.853,24	387,51	20,91	6,04	(8,00)
Belanja Bantuan Keuangan	3.434,15	139,82	4,07	3.359,37	129,17	3,85	(2,18)	(7,62)
SURPLUS/ (DEFISIT)	-655,75	2.138,67	(326,14)	-81,46	88,47	(108,61)	(87,58)	(95,86)
PEMBIAYAAN	655,75	-49,90	(7,61)	81,45	167,03	205,08	(87,58)	(434,71)
Penerimaan Pembiayaan	1.008,92	11,43	1,13	483,58	179,44	37,11	(52,07)	1.469,81
Pengeluaran Pembiayaan	353,17	61,33	17,37	402,13	12,41	3,09	13,86	(79,77)
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SiKPA)	0,00	2.088,77	-0,01	255,50	900,00	(87,77)		

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1. Pendapatan Daerah

Grifik 2.28. Perkembangan Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah (miliar rupiah) Triwulan I 2023 dan 2024



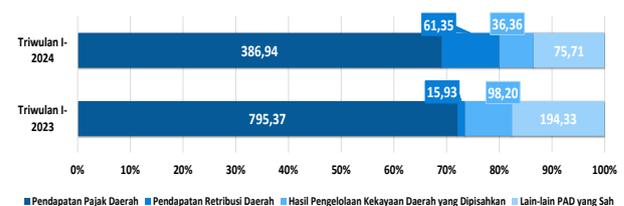
Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Hingga 31 Maret 2024, realisasi pendapatan daerah regional Lampung tercatat sebesar Rp3.892,98 miliar atau 12,07 persen dari target APBD, terkonsentrasi 29,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi ini disebabkan oleh turunnya penerimaan pendapatan di hampir seluruh komponen pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah berhasil tumbuh 5,54 persen (yoy) namun dengan *share* yang hanya sebesar 0,06 persen terhadap Pendapatan Daerah belum mampu mendorong pertumbuhan

keseluruhan realisasi. Perbandingan pagu dan realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I 2023 dan 2024 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 2.28.

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grifik 2.29. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Hingga 31 Maret 2024 PAD Lampung tercatat sebesar Rp560,36 miliar atau 6,90 persen dari target, tumbuh negatif 49,23 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Kontraksi ini terjadi seiring dengan penurunan pada kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah (turun 51,35 persen, yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (turun 62,98 persen, yoy), dan Lain-lain PAD yang Sah (turun 61,04 persen, yoy). Sementara itu pendapatan dari Retribusi Daerah berhasil tumbuh signifikan hingga 285,15 persen (yoy). Perbandingan

komposisi PAD secara total pada regional Lampung Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 dapat dilihat pada grafik 2.29.

Sebagaimana tergambar dalam grafik, kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD maupun total Pendapatan Daerah Triwulan I-2024 meningkat seiring dengan pertumbuhan kinerja realisasinya. Retribusi Daerah mampu menyumbang 10,95 persen pada PAD setelah di Triwulan I-2023 hanya berkontribusi sebesar 1,44 persen. Sedangkan kontribusi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD semakin menurun sejalan dengan penurunan kinerja realisasinya. Meski demikian, penerimaan Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang utama PAD di regional Lampung yaitu sebesar 69,05 persen.

2.2.1.1.1. Pajak Daerah

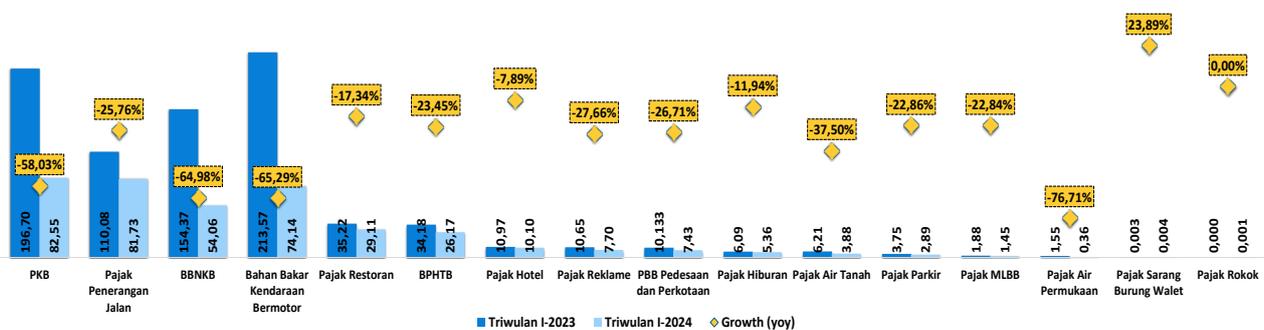
Realisasi pendapatan Pajak Daerah regional Lampung pada 31 Maret 2024 kembali termoderasi dan hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp386,94 miliar atau 4,76 persen dari target. Dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 69,05 persen atau turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,06 persen, Pajak Daerah masih menjadi sumber utama PAD. Hampir seluruh komponen pendapatan Pajak Daerah pada Triwulan I-2024 terkontraksi kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang berhasil tumbuh 23,89 persen (yoy). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bahkan mengalami kontraksi terdalam hingga 76,71 persen (yoy).

Meski mengalami penurunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih menjadi tumpuan utama pendapatan Pajak Daerah di regional Lampung dan menduduki peringkat 3 jenis pajak terbesar di regional Lampung dengan kontribusi terhadap pendapatan Pajak Daerah masing-masing mencapai 21,33 persen (Pajak Kendaraan Bermotor), 21,12 persen (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan 19,16 persen (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Dengan dukungan adanya peningkatan mutu layanan pembayaran Pajak Daerah, seperti penyediaan *platform* pembayaran digital serta pemanfaatan e-SamDes yang merupakan inovasi layanan Pemerintah Provinsi Lampung berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan dapat meningkatkan capaian target pajak Daerah di regional Lampung.

Di samping hal tersebut, mulai tahun 2024 ini, terdapat tambahan sumber pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Alat Berat (PAB) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan tarif sebesar 0,2 persen dari nilai jual alat berat (NJAB). Adanya tambahan pendapatan dari pajak daerah PAB ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menaikkan PAD Lampung dari sektor Pajak Daerah. Perbandingan realisasi per jenis Pajak Daerah Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik 2.30. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



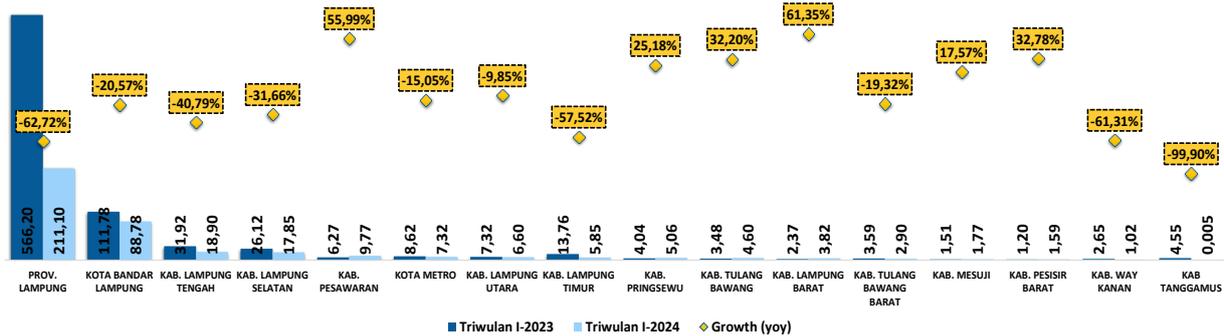
Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)



Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp211,10 miliar atau 6,31 persen dari target. Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp88,78 miliar atau 16,04 persen. Sedangkan tingkat ketercapaian target tertinggi dicatatkan oleh

Kabupaten Lampung Barat dengan capaian sebesar 23,70 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Lampung Barat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 61,35 persen. Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya Triwulan I-2024 dapat dilihat pada grafik 2.31.

Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

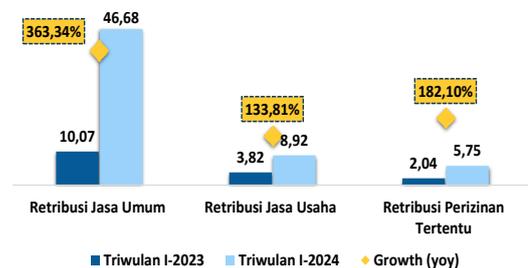


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah Triwulan I-2024 regional Lampung tumbuh signifikan hingga 285,15 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023. Secara nominal realisasi Retribusi Daerah regional Lampung Triwulan I-2024 mencapai Rp61,35 miliar atau 7,54 persen dari target APBD 2024. Penyumbang Retribusi terbesar berasal dari Retribusi Jasa Umum yang menyumbang 70,08 persen dari keseluruhan realisasi Retribusi Daerah. Pertumbuhan pendapatan atas Retribusi Daerah yang tumbuh signifikan salah satunya sebagai dampak pengaturan pencatatan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah dimana tahun sebelumnya dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbandingan realisasi per jenis Retribusi Daerah Triwulan I 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.32.

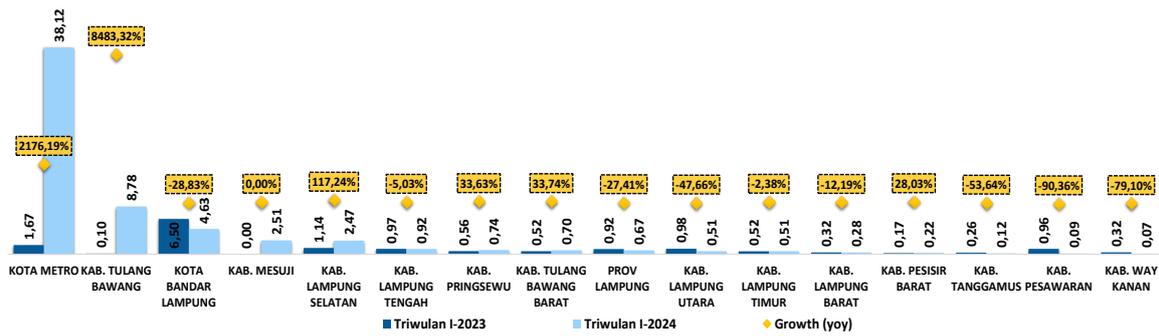
Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Pemerintah Daerah dengan realisasi penerimaan retribusi Daerah terbesar adalah Kota Metro yaitu sebesar Rp38,12 miliar atau berkontribusi sebesar 62,13 persen dari total realisasi Retribusi Daerah di regional Lampung. Sedangkan Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar dibanding target yaitu sebesar 12,98 persen. Perbandingan realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.33.

Grifik 2.33. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.1.3. Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Tabel 2.10. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan I-2023	Triwulan I-2024
Pendapatan Pajak Daerah	795,37	386,94
Pendapatan Retribusi Daerah	15,93	61,35
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	811,29	448,30
PDRB Triwulan I (ADHB)	105.565,02	112.091,01
<i>Local Tax Ratio</i> (Persen)	0,77%	0,40%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Rasio Pajak Daerah merupakan rasio antara pajak daerah (total pajak daerah dan retribusi daerah/PDRD) dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). *Local Tax Ratio* digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perpajakan dalam perekonomian di daerah. Berikut adalah perbandingan *Local Tax Ratio* Regional Lampung Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 yang disajikan dalam tabel 2.10.

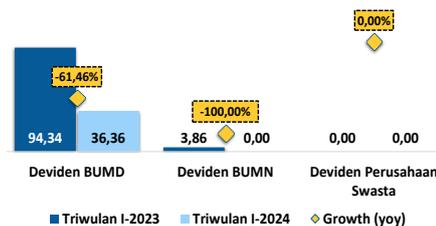
Rasio pajak daerah di Regional Lampung pada Triwulan I-2024 masih jauh dari ideal (kurang dari 3 persen), yaitu sebesar 0,40 persen, kembali termoderasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini berbanding lurus dengan kinerja PDRD yang tumbuh negatif mencapai 44,74 persen (*yoy*) namun berbanding terbalik dengan peningkatan PDRB sebesar 6,18 persen (*yoy*). Hal ini menandakan bahwa kontribusi PDRD terhadap peningkatan PDRB masih cukup rendah. Lebih lanjut, rendahnya *Local Tax Ratio* mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PDRD khususnya Retribusi Daerah yang belum dioptimalkan sehingga realisasinya masih jauh dari target. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan yang salah satunya melalui pengawasan terhadap pelaporan serta pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, untuk menghindari

potensi penerimaan yang tidak terpungut sehingga menjadi penghambat akselerasi rasio pajak daerah.

Selain itu, dilihat dari sisi distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, terdapat ketidakseimbangan porsi dan kontribusi lapangan usaha dengan penerimaan pajak. Sektor pertanian berperan besar dalam menggerakkan ekonomi Lampung yaitu sebesar 23,78 persen, namun sumbangsih sektor pertanian pada penerimaan pajak dan retribusi daerah amat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan industrialisasi berbasis hilirisasi sektor pertanian. Kontribusi industri pengolahan pada PDRB Lampung menempati urutan kedua terbesar setelah pertanian yaitu sebesar 18,92 persen.

2.2.1.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Grifik 2.34. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

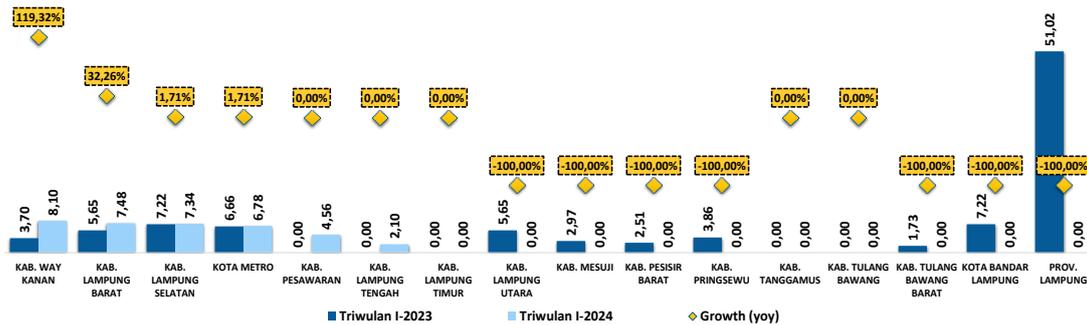
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seluruh Pemerintah Daerah di regional Lampung pada Triwulan I-2024 tumbuh negatif 62,98 persen (*yoy*) atau hanya terealisasi sebesar Rp36,36 miliar. Realisasi ini juga masih jauh dari target APBD 2024 yaitu hanya mencapai 5,20 persen dan seluruhnya berasal dari deviden atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD). Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Triwulan I-2024 dan Triwulan I-2024 di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.34.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar secara nominal dicapai oleh Kabupaten Way Kanan dengan realisasi sebesar Rp8,10 miliar.

Selain itu, Kab. Way Kanan juga mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 119,32 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Pencapaian sekaligus mencatatkan kinerja pencapaian target tertinggi yang bahkan telah melebihi target yaitu Rp119,32 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.35.

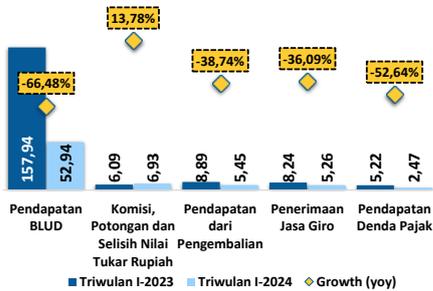
Grafik 2.35. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.1.5. Lain-Lain PAD yang Sah

Grafik 2.36. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



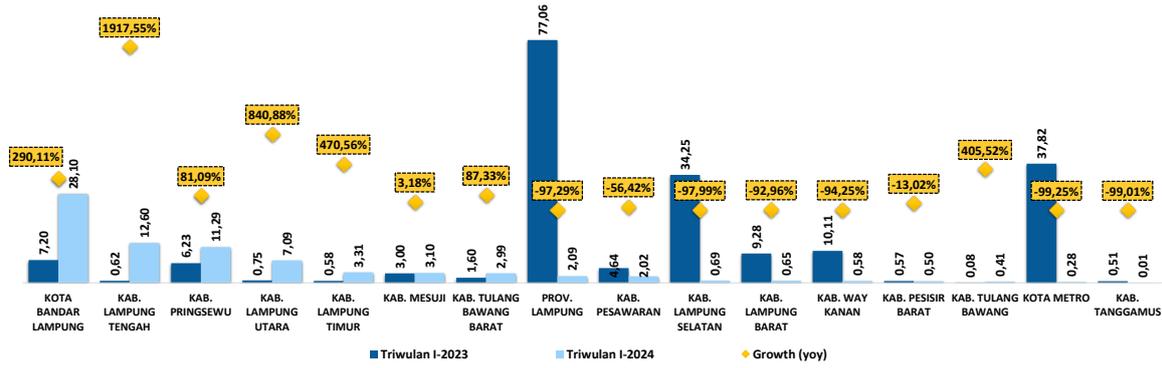
Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Total realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADyS) di regional Lampung dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun meski beberapa jenis LLPADyS juga menunjukkan pertumbuhan. Realisasi penerimaan dari LLPADyS pada Triwulan I-2024 berkontraksi 61,04 persen (yoy). Kondisi ini sekaligus menurunkan kontribusinya terhadap PAD menjadi hanya 13,51 persen. Porsi terbesar (69,92 persen) pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan

BLUD yang mencapai Rp52,94 miliar yang meski realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa Pemda telah mengalihkan pencatatan Pendapatan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah. Beberapa komponen LLPADyS juga mengalami pertumbuhan antara lain Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi. Grafik 2.36 berikut menggambarkan perkembangan realisasi LLPADyS Triwulan I tahun 2023 dan 2024 pada 5 jenis LLPADyS dengan kontribusi tertinggi di regional Lampung.

Dilihat secara spasial, realisasi Lain-lain PAD yang sah tertinggi secara nominal dicapai Kota Bandar Lampung dengan realisasi sebesar Rp28,10 miliar. Realisasi lain-lain PAD yang sah masing-masing Pemda di regional Lampung Triwulan I 2023 dan Triwulan I-2024 sebagaimana grafik 2.37.

Grafik 2.37. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pada total target pendapatan seluruh pemerintah daerah di regional Lampung tahun 2024, porsi terbesar dimiliki oleh pendapatan transfer yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) dan Transfer Antar Daerah yaitu sebesar 74,20 persen. Dari nilai tersebut, kontribusi Transfer Pemerintah Pusat sendiri mencapai 69,60 persen yang mengindikasikan masih cukup tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kebijakan TKD sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal di daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah diharapkan semakin kreatif dalam menciptakan pembiayaan alternatif ataupun mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini disebabkan Pemerintah Pusat beberapa tahun terakhir cenderung secara bertahap mengurangi alokasi dana transfer terutama komponen yang menggunakan alokasi perhitungan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan melakukan redesign seperti halnya kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai tahun 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*).

Realisasi Pendapatan Transfer total secara nominal pada Triwulan I-2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, baik pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun pada Pendapatan Transfer Antar Daerah. Hingga 31 Maret 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di regional Lampung tercatat

sebesar Rp3.231,99 miliar atau 14,52 persen dari pagu, turun 21,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga masih menjadi kontributor utama yaitu sebesar 83,02 terhadap total Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Angka ketergantungan ini kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 74,18 persen.

Terdapat perbedaan realisasi antara TKD (APBN) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (APBD) dikarenakan adanya perbedaan penggunaan aplikasi oleh Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang belum terinterkoneksi sehingga terjadi *lag* data dalam penyajian informasi keuangan daerah. Pada dasarnya, TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat secara keseluruhan menjadi pendapatan daerah pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan I-2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.38.

Grafik 2.38. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



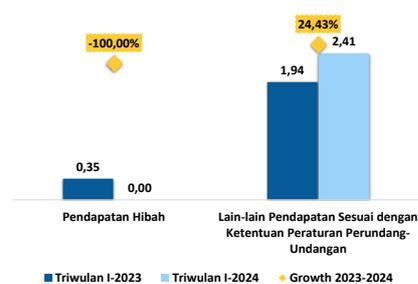
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh negatif dipengaruhi oleh turunnya

realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi keduanya mengalami penurunan secara nominal tidak lepas dari alokasi yang juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut, turunnya realisasi penyaluran DBH terjadi hampir di seluruh jenis DBH terutama SDA Minyak Bumi dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pembayaran DBH CHT yang terkoreksi merupakan dampak adanya penurunan penerimaan CHT tahun 2023 Provinsi Lampung dibanding tahun 2022 akibat pemesanan pita cukai yang rendah seiring produksi sigaret yang menurun. Penurunan produksi sigaret salah satunya disebabkan terdapat pabrik rokok besar di Lampung yang berhenti beroperasi.

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 2.39. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

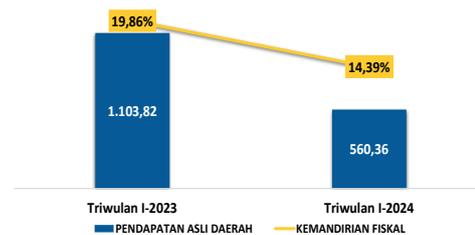
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hingga 31 Maret 2024, realisasi LLPDyS tercatat sebesar Rp2,41 miliar, tumbuh 5,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Realisasi ini hanya berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berupa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta Pendapatan Lain-lainnya. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tumbuh sangat signifikan sebesar 521,28 persen. Dana Kapitasi ini merupakan pendapatan FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dimana Dana Kapitasi dimaksud seluruhnya tercatat pada Kabupaten

Pesisir Barat yang belum menerapkan pengelolaan BLUD pada FKTP di wilayahnya.

Hingga Triwulan I-2024 belum terdapat realisasi atas Pendapatan Hibah dan Dana Darurat. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Triwulan I-2023 dan 2024 tergambar dalam grafik 2.39.

2.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Grafik 2.40. Perkembangan Realisasi PAD (miliar rupiah) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

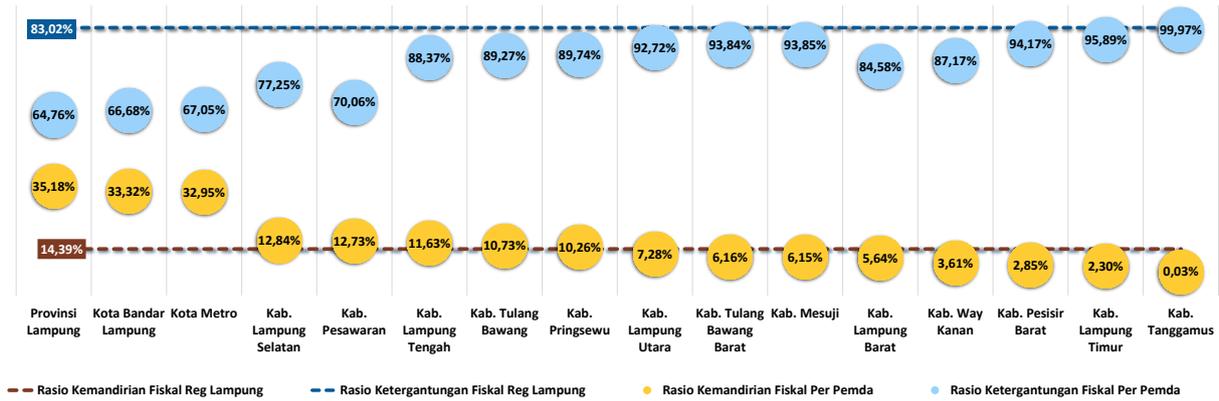


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Rasio kemandirian fiskal daerah regional Lampung secara agregat pada Triwulan I-2024 mengalami penurunan dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan melemahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.40.

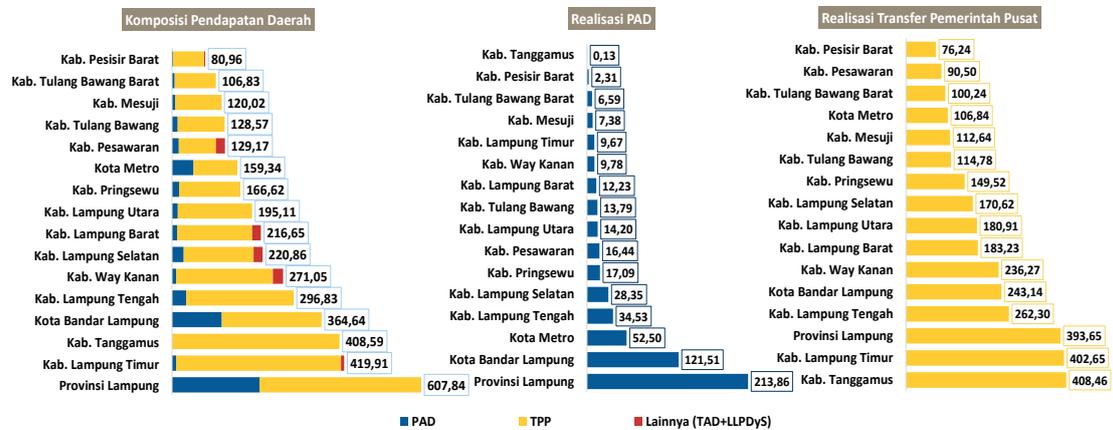
Lebih lanjut, berdasarkan perbandingan PAD terhadap total Pendapatan Daerah secara spasial, rasio kemandirian tertinggi dicapai Provinsi Lampung yaitu sebesar 35,18 persen, sedangkan kemandirian terendah adalah Kabupaten Tanggamus 0,03 persen. Sejalan dengan hal tersebut, angka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat tertinggi dialami Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 99,97 persen, sedangkan angka ketergantungan terhadap Transfer Pemerintah Pusat terendah sebesar 64,76 persen tercatat pada Provinsi Lampung. Rasio kemandirian daerah Triwulan I-2024 dan komposisi realisasi pendapatan masing-masing Pemda di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.41 dan 2.42.

Grifik 2.41. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2024 (persen)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Grifik 2.42. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.5. Prognosis/Outlook Pendapatan

Ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama 8 tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini juga tidak lepas dari adanya pelambatan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi perlahan tumbuh positif seiring dengan program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah dan meredanya pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun 2024, berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu selama 8 tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan target, serta ketercapaian realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I-2024, realisasi pendapatan diproyeksikan di angka 92,24 persen dengan realisasi sekitar Rp29.758,88 miliar atau tumbuh 0,08 persen dibandingkan dengan realisasi tahun

2023. Lebih lanjut, realisasi pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan mampu melebihi target penerimaan mengingat pertumbuhan positif Pajak Daerah yang tetap hingga terjaga hingga 2 tahun terakhir yang juga selalu melebihi target. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah hingga akhir tahun 2024 juga diproyeksikan meningkat signifikan hingga 7,61 persen di angka Rp719,78 miliar seiring dengan peningkatan target Pendapatan Retribusi Daerah sebagai dampak pengaturan pencatatan pendapatan BLUD menjadi bagian dari Retribusi Daerah dimana tahun sebelumnya dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Sejalan dengan kondisi tersebut, Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan tumbuh negatif 0,12 persen dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp1.310,04 miliar.

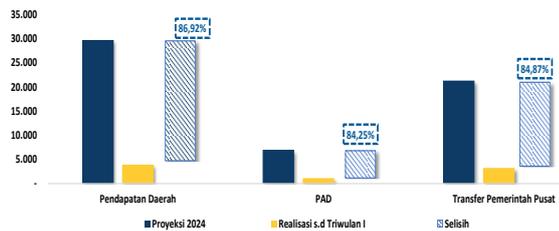
Tabel 2.11. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Terhadap Target								Proyeksi Realisasi s.d. akhir tahun 2024		Growth (yoy)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%	(miliar rupiah)	
Pendapatan Daerah	94,62	100,54	95,51	96,21	87,77	94,08	97,32	92,03	92,24	29.758,88	0,08
PAD	94,92	100,25	85,70	89,07	80,53	89,40	97,82	86,61	86,30	7.012,33	0,15
Pajak Daerah	90,13	97,38	88,35	95,35	78,03	90,93	110,55	102,91	102,01	4.829,80	0,09
Retribusi Daerah	63,38	47,53	68,75	83,47	52,55	45,99	58,94	54,84	88,41	719,78	7,61
HPKD yg Dipisahkan	109,15	95,63	100,09	97,59	88,50	68,92	32,25	25,07	23,15	161,72	0,25
Lain-Lain PAD yang Sah	115,99	118,63	78,68	75,07	90,51	93,57	87,53	70,78	69,28	1.301,04	(0,12)
Transfer Pemerintah Pusat	95,29	92,84	93,19	90,57	82,89	97,97	99,52	95,94	95,92	21.357,51	0,05
Transfer Antar Daerah	68,90	72,00	80,98	92,37	73,91	67,87	83,07	79,30	81,07	1.354,75	0,13
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	142,54	359,93	176,27	273,94	258,59	84,09	38,83	11,01	17,18	34,29	(0,004)

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Turunnya alokasi Hibah ke Daerah pada komponen penyaluran TKD yang sangat signifikan juga mengakibatkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terutama dari komponen Hibah diproyeksikan terkontraksi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga diproyeksikan naik seiring dengan meningkatnya alokasi TKD secara total untuk regional Lampung. Proyeksi ketercapaian Pendapatan sampai dengan akhir tahun 2024 disajikan pada tabel 2.11 dan grafik 2.43.

Grafik 2.43. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.6. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Kinerja realisasi Pendapatan Daerah hingga 31 Maret 2024 secara umum belum berjalan ideal. Turunnya realisasi Pendapatan Daerah sebesar 29,95 persen (yoy) tidak sejalan dengan peningkatan targetnya pada APBD 2024. Beberapa rekomendasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah di regional Lampung berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

a. Meskipun beberapa kemudahan pembayaran pajak daerah telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah di regional Lampung, pada Triwulan I-2024 terjadi penurunan signifikan pada pendapatan Pajak Daerah yang merupakan kontributor utama PAD. Oleh karena itu, upaya intensifikasi pajak daerah perlu ditingkatkan,

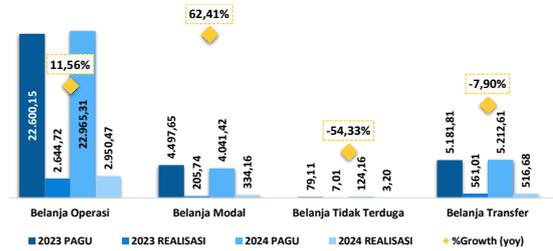
terutama dalam hal kepatuhan para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

- Diperlukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah seperti penyediaan *platform* pembayaran *digital payment*, *parking meter* dan lainnya yang dapat menekan biaya pemungutan dan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi.
- Sebagai bagian dari Pendapatan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD dapat lebih di dorong antara lain dengan:
 - optimalisasi pengelolaan aset BLUD seperti gedung dan fasilitas kesehatan. Pemungutan biaya layanan yang wajar dan terukur dapat menjadi kontributor utama dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah,
 - mendorong BLUD untuk menyediakan layanan unggulan yang berkualitas tinggi sehingga dapat menarik minat masyarakat dan bahkan dari luar daerah serta menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan,
 - mengembangkan kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan atau pengelolaan aset,
 - mendorong BLUD untuk berinovasi dalam menciptakan sumber pendapatan baru sebagai langkah proaktif seperti dengan pemanfaatan teknologi, pengembangan produk atau layanan baru, dan diversifikasi pendapatan.

- d. Terjadi penurunan pada komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, terutama yang bersumber dari dividen atas penyertaan modal pada BUMD. Oleh karena itu, evaluasi terhadap investasi permanen Pemda pada BUMD perlu dilakukan secara berkelanjutan agar hasil investasi sesuai dengan harapan. Langkah ini akan memitigasi risiko BUMD membebani keuangan daerah dan mempersempit celah fiskal. Selain itu, pembinaan terhadap BUMD juga dapat dilakukan melalui penguatan struktur organisasi dan manajemen perusahaan, perluasan usaha di bidang produktif berbasis potensi unggulan daerah, serta peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana BUMD.
- e. Sebagai sumber utama Pendapatan Daerah di regional Lampung, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat perlu diakselerasi. Kepatuhan Pemda dalam menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan secara tepat waktu dapat lebih ditingkatkan.

2.2.2. Belanja Daerah

Grafik 2.44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

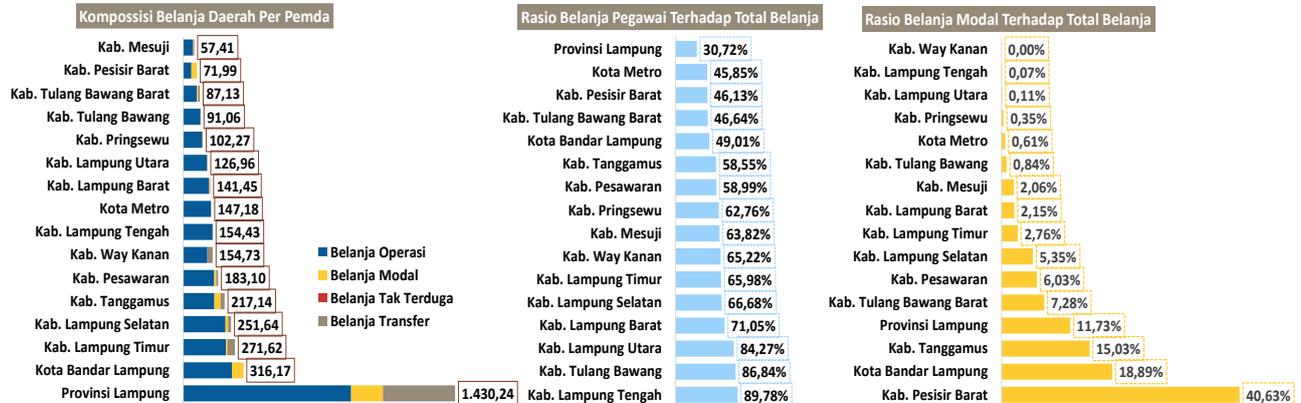


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sampai dengan 31 Maret 2024, Belanja Daerah regional Lampung telah terealisasi sebesar Rp3.804,51 miliar, nilai ini mencapai 11,76 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,29 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan pagu, realisasi, dan pertumbuhan realisasi belanja per jenis belanja Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 dapat dilihat grafik 2.44.

2.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 2.45. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar rupiah), Rasio Belanja Pegawai (persen), dan Rasio Belanja Modal (persen) Triwulan I-2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Belanja Daerah berdasarkan jenis diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan jenis belanja, agregat realisasi Belanja Daerah Lampung masih didominasi oleh belanja operasi dengan kontribusi terhadap total realisasi belanja pada Triwulan I-2024 adalah sebesar 77,55 persen, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 77,37 persen. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 2.45.

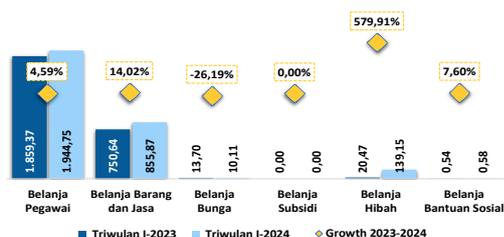
2.2.2.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada 31 Maret 2024 tercatat naik 11,46 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan nominal realisasi sebesar Rp2.950,47 miliar atau 12,85 persen dari pagu. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan realisasi di hampir seluruh komponen Belanja Operasi kecuali Belanja Bunga yang turun 26,19 persen.

Komponen Belanja Pegawai masih mendominasi Belanja Operasi dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp1.944,75 miliar atau 15,34 persen dari pagu. Meski secara nominal tumbuh 4,59 persen (yoy), andil komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi pada Triwulan I-2024 lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. *Share* komponen Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi pada Triwulan I-2024 sebesar 65,91 persen, sedangkan pada Triwulan I-2023 mencapai 70,30 persen. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dalam kurun waktu 5 tahun sejak ditetapkannya UU-HKPD dimaksud Pemerintah Daerah harus dapat melakukan penyesuaian alokasi Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD.

Hingga 31 Maret 2024, Belanja Barang dan Jasa secara nominal mencatatkan realisasi sebesar Rp855,87 miliar, tumbuh 14,62 persen (yoy). Pertumbuhan ini sekaligus meningkatkan kontribusi Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Operasi menjadi 29,01 persen atau lebih tinggi 0,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Grafik 2.46. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Belanja Bantuan Sosial juga tumbuh 7,60 persen (yoy) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp139,15 miliar atau 6,99 persen dari pagu. Begitu pula dengan Belanja Hibah yang tumbuh sangat signifikan hingga 579,91 persen dan mencatatkan realisasi sebesar Rp130,15 miliar atau 6,99 persen. Pertumbuhan ini terutama disebabkan naiknya Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai persiapan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, pemda dengan rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Tengah dengan rasio sebesar 89,78 persen. Sedangkan rasio terendah pada Provinsi Lampung yaitu sebesar 30,72 persen. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.46.

2.2.2.1.2. Belanja Modal

Meski mengalami penurunan pagu, realisasi Belanja Modal Daerah regional Lampung hingga 31 Maret 2024 menunjukkan kinerja positif, tumbuh 62,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Secara nominal Belanja Modal mencatatkan realisasi sebesar Rp332,16 miliar atau 8,27 persen dari alokasi pagu 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan di hampir seluruh komponen Belanja Modal terutama Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang memberikan kontribusi terbesar. Meski demikian Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset lainnya, serta Belanja Modal BLUD mengalami penurunan bahkan beberapa belum terealisasi. Rincian realisasi Belanja Modal Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 sebagaimana grafik 2.47.

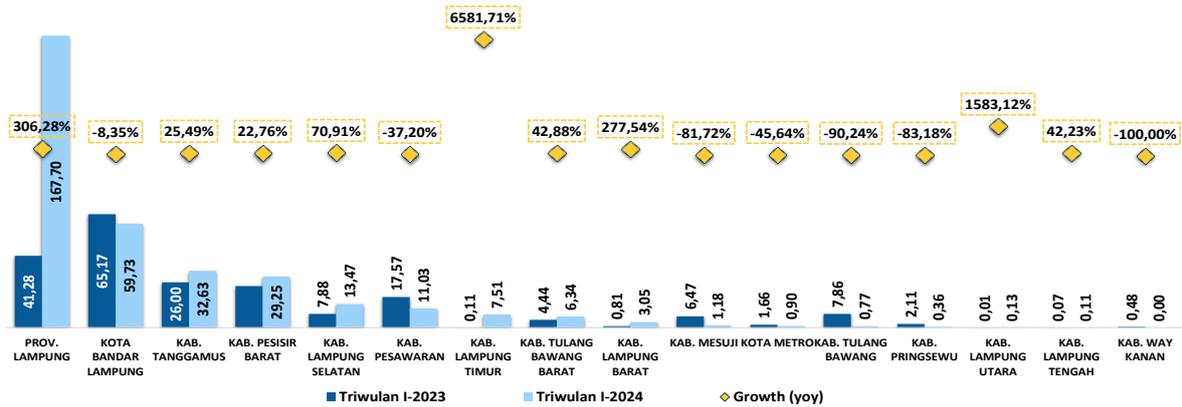
Grafik 2.47. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Realisasi Belanja Modal secara spasial di regional Lampung menunjukkan Pemerintah provinsi Lampung sebagai penyumbang terbesar dalam peningkatan realisasi Belanja Modal yaitu sebesar Rp167,70 miliar atau 50,19 persen dari keseluruhan Belanja Modal regional Lampung. Sedangkan pertumbuhan tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Timur. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 dapat dilihat pada grafik 2.48.

Grafik 2.48. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Triwulan I Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

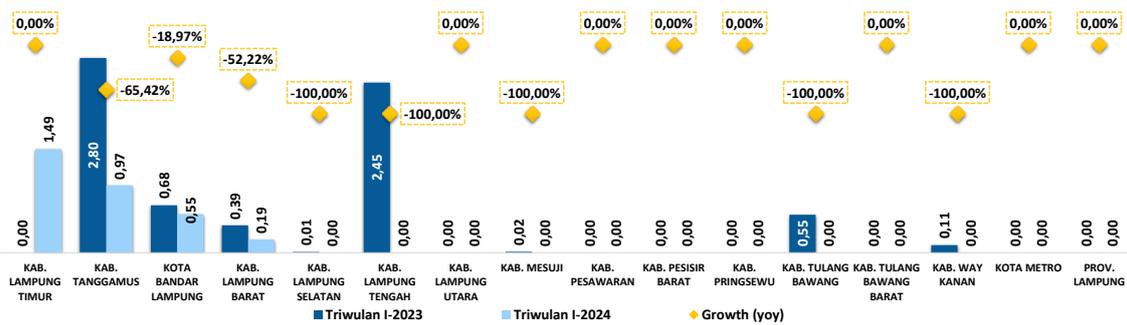
Lebih lanjut, Rasio realisasi Belanja Modal terhadap Belanja tertinggi pada Kabupaten Pesisir Barat, yang mana realisasi belanja modalnya menyumbang 40,63 persen dari keseluruhan Belanja. Sementara itu, rasio terendah pada Kab. Way Kanan dimana belum terdapat realisasi Belanja Modal hingga 31 Maret 2024. Perbandingan realisasi Belanja Modal

sampai dengan 2021-2023 di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 2.48.

2.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga regional Lampung hingga akhir Triwulan I-2024 tercatat sebesar Rp3,20 miliar atau terealisasi sebesar 2,58 persen dari alokasi.

Grafik 2.49. Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Realisasi ini turun 54,33 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023. Realisasi Belanja Tidak Terduga hingga akhir Triwulan I-2024 baru terealisasi di 4 Pemda yaitu Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp1,49 miliar, Kabupaten Tanggamus sebesar Rp0,97 miliar, Kota Bandar Lampung Rp0,55 miliar, serta kab. Lampung Barat sebesar Rp0,19 miliar. Realisasi Belanja Tidak Terduga masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan I-2023 dan Triwulan I-2024 dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 2.49.

2.2.2.1.4. Belanja Transfer

Kinerja realisasi Belanja transfer hingga 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp516,68 miliar atau tercapai

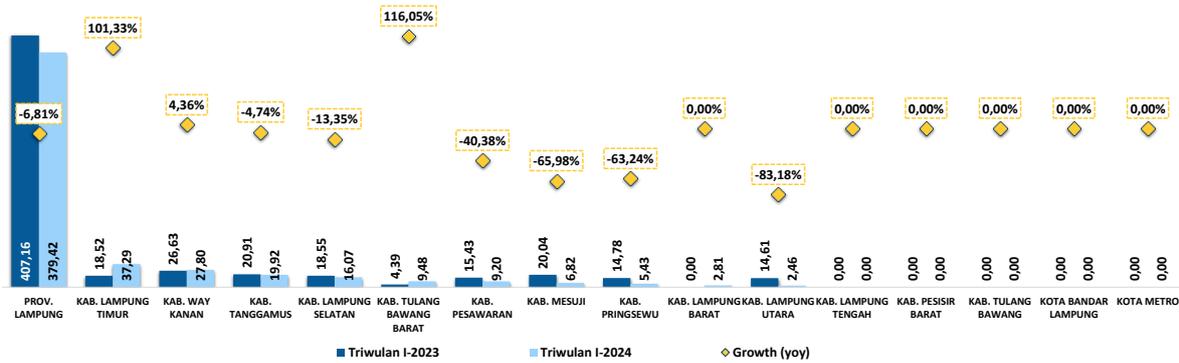
9,91 persen dari pagu, berkontraksi 7,90 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari semua komponen Belanja Transfer, yaitu Transfer Bagi Hasil (-8,00 persen, yoy), dan Transfer bantuan Keuangan (-7,02 persen, yoy). Realisasi Belanja Transfer terbesar berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp386,84 miliar atau sebesar 74,87 persen dari keseluruhan Belanja Transfer serta Belanja Bantuan Keuangan ke Desa yang terealisasi sebesar Rp117,16 miliar atau 22,68 persen dari keseluruhan Belanja Transfer.



Secara spasial, Realisasi Belanja Transfer Pemprov Lampung Triwulan I-2024 terkontraksi 6,81 persen dengan hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp379,42 miliar yang seluruhnya merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa. Beberapa Pemda masih belum mencatatkan realisasi Belanja

Transfer yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kota bandar Lampung, serta Kota metro. Realisasi Belanja Transfer masing-masing Pemda lingkup regional Lampung Triwulan I tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.50.

Grafik 2.50. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 (miliar rupiah)

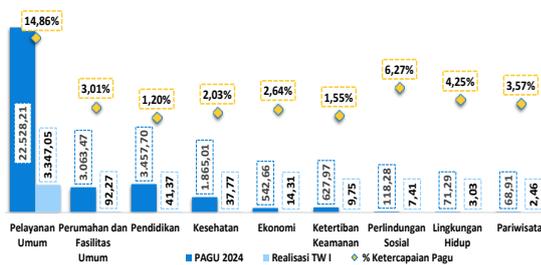


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.2. Berdasarkan Fungsi

Realisasi belanja regional Lampung berdasarkan fungsi terdistribusi sebagaimana grafik 2.51. Secara nominal, realisasi belanja tertinggi pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp3.347,05 miliar atau tercapai 14,86 persen dari pagu yang juga mencatatkan ketercapaian terhadap pagu tertinggi dibandingkan dengan ketercapaian fungsi lainnya. Kontribusi realisasi fungsi pariwisata menjadi yang terendah, hanya sebesar Rp2,46 miliar atau 3,57 persen dari keseluruhan realisasi belanja.

Grafik 2.51. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) (diolah)

Alokasi belanja fungsi Pelayanan Umum tahun 2024 meningkat, termasuk di dalamnya Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (Bawaslu dan KPU) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di 16 pemerintah daerah regional Lampung sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD)

yang telah ditandatangani pada tahun 2023. Anggaran Pilkada regional Lampung 2024 bersumber dari APBD Provinsi Lampung dan APBD 15 kabupaten/kota dengan skema pendanaan berbagi biaya (*cost sharing*) dengan APBN. NPHD pendanaan Pilkada 2024 dicairkan dalam dua tahap yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40 persen dan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen. Hibah dari Pemerintah daerah dimaksud oleh KPU dan Bawaslu dimintakan pengesahannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kemudian dilakukan revisi ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga menambah pagu belanja APBN.

Sementara itu, realisasi tertinggi Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dialokasikan untuk program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Realisasi fungsi Pendidikan pada Triwulan I-2024 utamanya dialokasikan untuk kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar serta Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota menjadi fokus utama pada realisasi belanja Fungsi Kesehatan Triwulan I-2024.

2.2.2.3. Berdasarkan Urusan

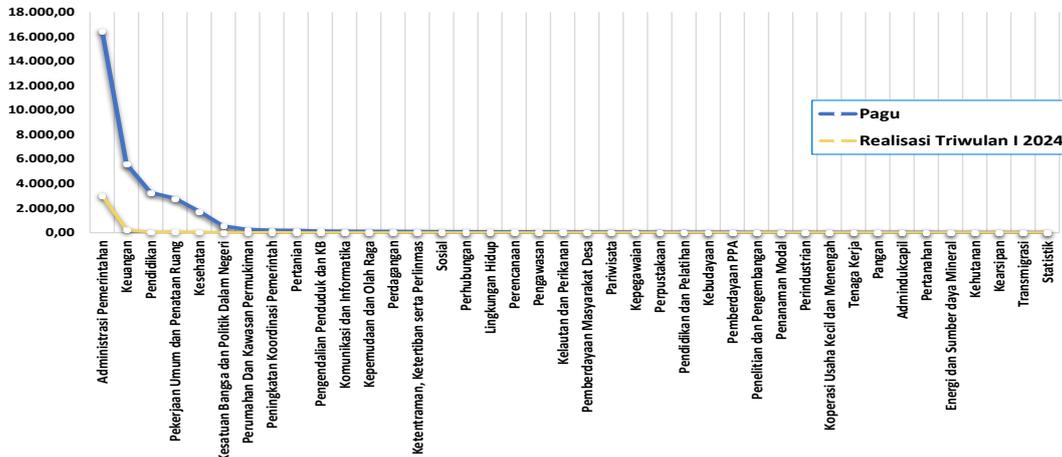




Berdasarkan urusan, Realisasi Belanja regional Lampung tahun 2024 tertinggi dialokasikan untuk Belanja Urusan Administrasi Pemerintahan yaitu sebesar Rp3.053,25 miliar atau 85,88 persen dari keseluruhan belanja diikuti Urusan Keuangan (7,11 persen) dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(2,55 persen). Sedangkan realisasi belanja urusan pertanian, sebagai sektor unggulan di Lampung hanya berkontribusi sebesar 0,04 persen terhadap realisasi belanja. Realisasi belanja berdasarkan urusan regional Lampung Triwulan I-2024 dapat dilihat pada grafik 2.52.

Grifik 2.52. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2024 (miliar rupiah)



Sumber: Direktorat APK (diolah)

2.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Salah satu komponen PDRB Pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). PK-P Provinsi sendiri mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi, PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi, serta PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan. Berikut adalah tabel Kontribusi Daerah terhadap PDRB regional Lampung dalam periode Triwulan I tahun 2023-2024.

Tabel 2.12. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Komponen	Triwulan I-2023	Triwulan I-2024
Belanja Daerah (miliar rupiah)	3.418,48	3.804,51
PDRB Triwulan I ADHB (miliar rupiah)	105.565,02	112.091,01
Ratio (Persen)	3,24%	3,39%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Pada Triwulan I-2023, PDRB (Pengeluaran ADHB) Provinsi Lampung mencapai Rp105,565,02 miliar dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp6.383,49 miliar atau berkontribusi sebesar 5,69 persen dari keseluruhan PDRB, lebih tinggi 0,64 persen dibanding distribusi

PK-P pada Triwulan I-2023. Lebih lanjut, pengeluaran Belanja Daerah Lampung pada tahun Triwulan I-2024 sebesar Rp3.804,51 miliar atau sebesar 3,39 persen dari total PDRB. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, kontribusi Belanja daerah terhadap PDRB mengalami lebih tinggi 0,15 persen.

2.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah per kapita) akan menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya kesejahteraan.

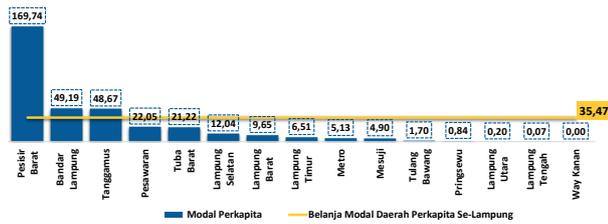
Grifik 2.53. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2024 (juta rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)



Grafik 2.54. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2024 (ribu rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah Triwulan I-2024 dan jumlah penduduk Lampung 2024 (data BPS), rasio belanja per kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung tertinggi adalah di Kota Metro dengan belanja per kapita sebesar Rp837.655,67 dengan jumlah penduduk 175.710 jiwa. Sedangkan rasio Belanja per kapita terendah terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan belanja per kapita sebesar Rp101.259,80 dengan Jumlah penduduk 1.525.090 jiwa. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di regional Lampung. Sementara itu belanja per kapita agregat se-Provinsi Lampung sebesar Rp 403.893,68 dengan populasi sebesar 9.419.580 jiwa yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Kemudian, rasio belanja modal per kapita akan menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

Rasio belanja modal per kapita agregat Lampung pada Triwulan I-2024 hanya sebesar Rp35.474,60. Sedangkan yang memiliki rasio belanja modal per kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung tertinggi adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar Rp169.740,71 dengan jumlah penduduk paling sedikit di regional Lampung yaitu 172.320. Sementara itu, rasio Belanja Modal per kapita terendah di regional Lampung adalah Kab. Way

Kanan karena hingga Triwulan I-2024 belum mencatatkan realisasi Belanja Modal.

Realisasi Belanja Daerah per Kapita dan Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2.53 dan grafik 2.54.

2.2.2.6. Prognosis/Outlook Belanja Daerah

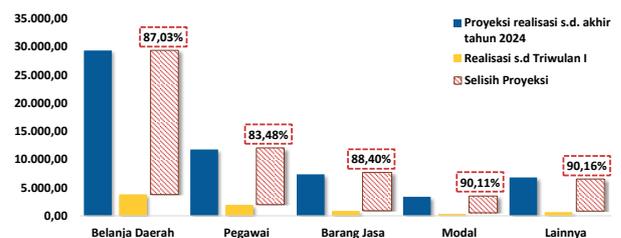
Proyeksi ketercapaian Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.13 dan grafik 2.55.

Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d Akhir Tahun 2024

BELANJA	Persentase Ketercapaian terhadap Pagu								Proyeksi Realisasi Hingga Akhir Tahun 2024			Growth (yoy)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PAGU 2024	%	(miliar Rp)	
Belanja Daerah	92,71	98,05	92,07	92,34	86,89	92,89	95,26	90,20	32.343,51	90,70	29.336,42	0,07
Belanja Pegawai	87,46	93,68	94,25	93,49	90,31	92,56	94,50	90,12	12.679,89	92,82	11.769,54	0,11
Belanja Barang Jasa	92,06	112,22	95,61	95,24	83,92	93,23	96,80	91,62	8.216,82	89,81	7.379,29	0,03
Belanja Modal	92,29	101,87	87,17	78,86	67,27	96,39	87,85	89,26	4.041,42	83,59	3.378,32	(0,05)
Belanja Lainnya	106,33	90,87	90,36	98,62	97,28	91,26	100,44	89,24	7.405,38	91,95	6.809,27	0,13

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Grafik 2.55. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d Akhir Tahun 2024



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Ketercapaian realisasi belanja terhadap pagu selama 8 tahun terakhir sangat fluktuatif. Hal ini tidak lepas dari kebijakan belanja Pemerintah Daerah yang diterapkan setiap tahunnya. Berdasarkan tren ketercapaian realisasi pendapatan terhadap pagu APBD dalam 8 tahun terakhir, persentase komposisi dan pertumbuhan pagu, serta ketercapaian realisasi belanja sampai dengan triwulan I-2024, persentase ketercapaian realisasi belanja daerah regional Lampung diproyeksikan kembali meningkat di angka 90,70 persen mencapai Rp29.336,42 miliar. Lebih lanjut, realisasi belanja pegawai, seiring dengan adanya peningkatan pagu pada APBD 2024 diproyeksikan kembali akan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 92,82 persen setelah berkontraksi pada akhir tahun 2023. Begitu pula dengan Belanja Lainnya diproyeksikan meningkat dengan ketercapaian pagu sebesar 91,95 persen.

Peningkatan proyeksi Belanja Lainnya terutama pada komponen Belanja Subsidi sebagai dampak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 termasuk pada 16 pemerintah daerah di regional Lampung.

2.2.2.7. Rekomendasi Kebijakan Belanja

Realisasi Belanja Daerah regional Lampung hingga akhir Triwulan-I 2024 menunjukkan kinerja positif, meski alokasi pagu belanja pada tahun ini lebih rendah dibandingkan pada APBD 2023. Namun demikian berikut beberapa rekomendasi kebijakan dari sisi Belanja Daerah antara lain:

1. *Share* belanja daerah terbesar masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai 51,12 persen dari keseluruhan realisasi Belanja Daerah. Dalam APBD 2024, pagu Belanja Pegawai secara agregat masih di angka 39,20 persen. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian alokasi Belanja Pegawai maksimal 30 persen dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dalam kurun waktu 5 tahun sejak ditetapkannya UU HKPD tersebut.
2. Kebijakan belanja daerah sebaiknya lebih diarahkan pada belanja infrastruktur pelayanan publik. Dalam UU-HKPD, diatur bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik harus mencapai minimal 40 persen dari total belanja. Namun demikian, kebijakan *mandatory spending* sebaiknya tidak diterapkan secara seragam. Kebijakan *mandatory spending* sebaiknya diterapkan dengan variasi atau skema prorata sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
3. Meski secara nominal, kinerja realisasi Belanja Modal tumbuh positif hingga 62,41 persen, namun ketercapaian terhadap pagu masih tertahan di angka 8,27 persen. Akselerasi realisasi belanja modal perlu ditingkatkan guna memberi *multiplier effect* kepada pertumbuhan

ekonomi karena belanja modal merupakan belanja yang bersifat produktif.

2.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Pada Triwulan I-2024, realisasi APBD regional Lampung secara agregat mengalami surplus. Perkembangan surplus/defisit APBD dapat dilihat menggunakan tiga rasio yaitu surplus terhadap pendapatan, surplus terhadap realisasi dana transfer, surplus terhadap PDRB, dan SiLPA terhadap alokasi belanja. Berdasarkan perhitungan dapat dijelaskan bahwa:

- a. Rasio surplus APBD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk menutup belanja dalam kondisi pendapatan tertentu. Rasio pada Triwulan I-2024 sebesar 0,023 turun 0,36 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini memberi gambaran kinerja fiskal yang melemah karena kemampuan pendapatan untuk membiayai belanja yang menurun. Namun dengan meningkatnya capaian realisasi belanja dibanding tahun sebelumnya justru mengindikasikan kinerja pendapatan daerah untuk merealisasikan Belanja lebih optimal.
- b. Rasio surplus APBD terhadap dana transfer digunakan untuk mengetahui proporsi surplus terhadap salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dana transfer (dana transfer pemerintah pusat). Pada Triwulan I-2024, rasio ini mengalami turun 0,51 basis poin di angka 0,004. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat telah dimanfaatkan dengan lebih optimal.
- c. Rasio surplus APBD terhadap PDRB menggambarkan kesehatan ekonomi regional. Rasio pada Triwulan I-2024 sebesar 0,00079 atau lebih rendah 0,02 basis poin dibanding periode yang sama tahun 2023 yang disebabkan menurunnya surplus sebagai dampak naiknya realisasi belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan belanja pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lebih tinggi dibandingkan PAD

untuk meningkatkan kesehatan ekonomi regional.

- d. Rasio SiLPA terhadap alokasi belanja APBD mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah. Rasio SiLPA pada tahun Triwulan I-2024 di angka 0,067 atau turun 0,54 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini dapat diasumsikan penggunaan anggaran regional Lampung lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Periode	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Realisasi Dana	Surplus terhadap PDRB	SiLPA terhadap Realisasi Belanja
Triwulan I-2023	0,385	0,519	0,02026	0,611
Triwulan I-2024	0,023	0,004	0,00079	0,067

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Selanjutnya, keseimbangan umum pada postur APBD di regional Lampung Triwulan I-2024 sebagaimana tabel 2.15 menunjukkan nilai positif sebesar Rp88,47 miliar. Sementara itu, keseimbangan primer APBD di regional Lampung juga menunjukkan angka positif sebesar Rp98,58 miliar setelah mengeluarkan komponen bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah bersifat kontraktif yang mana belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya.

Tabel 2.15. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
Triwulan I-2023	5.557,16	3.418,48	13,70	2.138,67	2.152,37
Triwulan I-2024	3.892,98	3.804,51	10,11	88,47	98,58

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.4. Pembiayaan Daerah

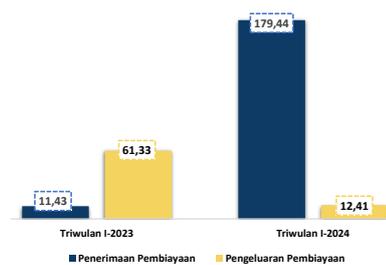
Pada Triwulan I-2024, pembiayaan netto naik signifikan hingga 434,17 persen (yoy). Hal ini dikarenakan penerimaan pembiayaan yang tumbuh sangat signifikan mencapai Rp179,44 miliar

sedangkan pengeluaran pembiayaan turun 70,77 persen di angka 12,41 miliar. Komponen penerimaan pembiayaan tumbuh seluruhnya berasal dari meningkatnya penggunaan SiLPA tahun lalu sebagai sumber pembiayaan terbesar pemerintah daerah yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, penghematan belanja, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan serta sisa belanja lainnya.

Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan Triwulan I-2024 turun 79,77 persen di angka Rp12,41 miliar yang seluruhnya digunakan untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pembiayaan Daerah Regional Lampung Triwulan I tahun 2023 dan 2024 sebagaimana grafik 2.56.

Grafik 2.56. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD

2.3.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Triwulan I-2024 Provinsi Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp2.711,64 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp7.210,55 miliar sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp4.498,91 miliar. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp167,03 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp4.331,88 miliar. Ringkasan *I-Account* Konsolidasi APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. I-Account Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung Triwulan I 2023-2024 (miliar rupiah)

Uraian	2023	2024		% Kontribusi	% Growth	
	Konsolidasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat			Konsolidasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	3.367,15	3.792,68	2.150,95	2.711,64	100,00	(19,47)
I. Penerimaan Perpajakan	2.758,67	448,30	1.718,11	2.166,40	79,89	(21,47)
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	604,70	112,07	432,84	544,91	20,10	(9,89)
III. Penerimaan Hibah	0,35	-	-	-	-	(100,00)
IV. Pendapatan Transfer	3,44	3.232,32	-	0,33	0,01	(90,39)
B. Belanja Negara	6.080,30	3.706,62	7.626,33	7.210,55	100,00	18,59
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	4.391,96	3.287,82	2.399,63	5.687,45	78,88	29,50
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	1.688,34	418,80	5.226,71	1.523,11	21,12	(9,79)
C. Surplus (Defisit) Anggaran	(2.713,15)	86,06	(5.475,39)	(4.498,91)	100,00	65,82
D. Pembiayaan	(49,90)	167,03	-	167,03	100,00	(434,71)
I. Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	(49,90)	167,03	-	167,03	100,00	(434,71)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(2.763,05)	253,09	(5.475,39)	(4.331,88)	100,00	56,78

Sumber: LKPP-TW, LKPKD-TW, ALCo Provinsi Lampung (diolah)

2.3.2. Pendapatan Konsolidasian

2.3.2.1. Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan negara konsolidasian Triwulan I-2024 membukukan realisasi sebesar Rp2.711,64 miliar, terkontraksi 19,47 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak konsolidasi yang termoderasi sebesar 21,47 persen (yoy). Komponen utama penyumbang pendapatan konsolidasian bersumber dari penerimaan perpajakan dengan kontribusi sebesar 79,89 persen dari total pendapatan di Lampung atau secara nominal mencapai Rp2.166,40 miliar, sedangkan PNBPN menyumbang kontribusi sebesar 20,10 persen atau secara nominal sebesar Rp544,91 miliar yang didominasi oleh PNBPN Pusat yang bersumber dari BLU dan PNBPN Lainnya. Sedangkan Pendapatan transfer yang terlihat masih memiliki kontribusi 20,10 persen yang merupakan Pendapatan Transfer Dana Desa yang telah dibukukan oleh pemda.

2.3.3. Belanja Konsolidasian

2.3.3.1. Proporsi dan Perbandingan

Belanja konsolidasian Lampung sebesar Rp7.210,55 miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah. Mencermati Proporsi realisasi belanja konsolidasian terbesar Triwulan I-2024, Belanja Pemerintah Pusat/Daerah mendominasi hingga 78,88 persen atau secara nominal sebesar Rp5.687,45 miliar, sedangkan proporsi Belanja Transfer mencapai 21,12 persen atau secara nominal Rp1.523,11 miliar yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat berupa Transfer ke Daerah yang belum dilakukan

pencatatan oleh pemda, sehingga belum tereliminasi.

Lebih lanjut, dilihat berdasarkan kontribusi per jenis belanja pemerintah pusat/daerah, realisasi belanja pegawai konsolidasian mencapai 52,80 persen dari total belanja, diikuti belanja barang sebesar 35,73 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal hanya berkontribusi 8,4 persen terhadap total belanja. Realisasi Belanja Negara Konsolidasian Triwulan I-2024 meningkat 18,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, didorong pertumbuhan realisasi Belanja baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.3.3.2. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 2.17. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2023-2024

Uraian	2023		2024	
	Konsolidasi	% Rasio	Konsolidasi	% Rasio
Belanja Operasi (pegawai+barang)	3.978,33	65,43	5.035,76	69,84
Total Belanja Konsolidasian	6.080,30		7.210,55	

Sumber: LKPP-TW, LKPKD-TW, ALCo Provinsi Lampung (diolah)

Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian menunjukkan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Lampung mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga triwulan I 2024 pemerintah masih berfokus pada kegiatan rutin pemerintah.

2.3.3.3. Belanja Perkapita Konsolidasi

Berdasarkan perhitungan tercatat bahwa Belanja Per Kapita di Lampung tahun 2024 sebesar Rp765.486. Artinya belanja pemerintah pusat dan

daerah di Provinsi Lampung yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada satu orang penduduk pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp Rp765.486. Angka ini mengalami peningkatan 17,26 persen (*yoy*) seiring dengan peningkatan realisasi pada belanja pusat dan pemerintah daerah masing-masing 7,27 persen (*yoy*) dan 19,83 persen (*yoy*).

Tabel 2.18. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2021-2023

Keterangan	2023	2024
Belanja Konsolidasi Triwulan I	Rp6.080,30	Rp7.210,55
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	9.314	9.420
Belanja Per Kapita	Rp652.814	Rp765.486

Sumber: LKPD-K, LKPP (diolah)

2.3.4. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian

Hingga 31 Maret 2024, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit Rp4.498,91 miliar. Angka defisit ini melebar cukup besar yakni 65,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 yang defisit sebesar Rp2.713,15 miliar. Melebarnya defisit anggaran terutama dipicu oleh adanya penurunan realisasi pendapatan konsolidasian, sementara realisasi belanja konsolidasian mengalami peningkatan.

Grafik 2.57. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian Triwulan I 2023 dan 2024 (miliar rupiah)



Sumber: LPDPK-TW, LKPP-TW, ALCo Provinsi Lampung (diolah)

2.4. ANALISIS NERACA PEMERINTAH PUSAT-TINGKAT WILAYAH

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPP merupakan konsolidasi keuangan negara dari seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, yang

disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.

Di level regional, Kanwil DJPb menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) secara periodik. LKPP-TW merupakan konsolidasi keuangan negara dari seluruh satuan kerja yang berada di lingkup suatu wilayah/provinsi atau disebut dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W). Adapun salah satu komponen LKPP-TW merupakan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2.4.1. Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas

Neraca Tingkat Wilayah per 31 Desember 2024 Provinsi Lampung membukukan total aset sebesar Rp79.110,41 miliar dengan total Kewajiban sebesar Rp375,28 miliar sehingga diperoleh nilai kekayaan bersih pemerintah atau Ekuitas sebesar Rp78.735,13 miliar. Rincian Neraca Tingkat Wilayah per 31 Desember 2024 Provinsi Lampung disajikan pada tabel 2.19.

Posisi aset pemerintah pusat di Provinsi Lampung per tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,11 persen (*yoy*). Peningkatan kelompok aset terbesar dikontribusikan oleh Aset Lancar dan Aset Lainnya. Kelompok Aset Lancar membukukan peningkatan sebesar 53,39 persen (*yoy*), dipengaruhi oleh kenaikan akun Persediaan sebesar 97,82 persen atau secara nominal naik menjadi Rp1.858,58 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Pemda pada Kementerian PUPR yang termasuk ke dalam nilai aset Persediaan. Di samping itu, terdapat peningkatan akun Kas dan Setara Kas sebesar 25,92 persen (*yoy*), atau secara nominal naik menjadi Rp899,31 miliar, juga berkontribusi mendorong peningkatan kelompok Aset Lancar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan posisi Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya.

Selanjutnya, untuk kelompok Aset Lainnya, menunjukkan peningkatan sebesar 67,19 persen, antara lain dipengaruhi oleh peningkatan Aset

Lainnya Bruto diantaranya Kas yang Dibatasi Penggunaannya, diiringi dengan penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, sehingga menghasilkan nilai bersih Aset Lainnya yang lebih tinggi. Sementara, untuk kelompok Aset Tetap yang

memiliki nilai signifikan terhadap total Aset mengalami sedikit penurunan sebesar 0,57 persen (yoy) seiring dengan sedikit penurunan pada akun Tanah.

Tabel 2.19. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2022 dan 2023 (miliar Rp, persen)

URAIAN	2022 (Audited)	2023 (Unaudited)	% Growth
1. ASET	78.241,81	79.110,41	1,11
1.2. Aset Lancar	2.136,57	3.277,19	53,39
1.2.1. Kas dan Setara Kas	714,20	899,31	25,92
1.2.2. Investasi Jangka Pendek	72,30	30,89	-57,27
1.2.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	44,35	3,80	-91,43
1.2.4. Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	0,04	0,02	-56,11
1.2.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	37,47	43,91	17,18
1.2.6. Piutang (Bruto)	647,78	766,20	18,28
1.2.6.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(319,09)	(325,53)	2,02
1.2.7. Persediaan	939,51	1.858,58	97,82
1.2.8. Persediaan yang Belum Diregister	-	0,0005	-
1.3. Investasi Jangka Panjang	-	-	-
1.4. Aset Tetap (Bersih)	75.866,86	75.433,73	-0,57
1.4.1. Aset Tetap (Bruto)	95.676,68	97.442,26	1,85
1.4.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(19.809,82)	(22.008,53)	11,10
1.5. Properti Investasi (Bersih)	-	0,93	-
1.5.1. Properti Investasi	-	1,11	-
1.5.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	(0,19)	-
1.6. Piutang Jangka Panjang	-	-	-
1.6.1. Piutang Jangka Panjang (Bruto)	7,52	0,21	-97,18
1.6.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(7,52)	(0,21)	-97,18
1.7. Aset Lainnya (Bersih)	238,38	398,56	67,19
1.7.1. Aset Lainnya (Bruto)	587,28	694,57	18,27
1.7.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(208,85)	(137,33)	-34,24
1.7.3. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(140,05)	(158,68)	13,30
JUMLAH ASET	78.241,81	79.110,41	1,11
2. KEWAJIBAN	143,11	375,28	162,23
2.1. Kewajiban Jangka Pendek	143,11	375,28	162,23
2.1.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	35,20	283,84	706,27
2.1.2. Utang Transfer	-	0,88	-
2.1.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	41,98	55,75	32,81
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka	59,55	34,24	-42,50
2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,07	0,0024	-96,47
2.1.6. Hibah Yg Belum Disahkan	5,91	-	-100,00
2.1.7. Uang Muka Dari KPPN	0,40	0,57	40,43
2.2. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
3. EKUITAS	78.098,70	78.735,13	0,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78.241,81	79.110,41	1,11

Sumber: SIKRI, LKPK-TW (diolah)

Dari sisi Kewajiban, tercatat mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 162,23 persen (yoy) yang seluruhnya bersumber dari Kelompok Kewajiban Jangka Pendek. Peningkatan akun Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kontributor terbesar dengan peningkatan 706,27 persen (yoy). Peningkatan Utang Kepada Pihak Ketiga ini dipengaruhi oleh transaksi Belanja menggunakan Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dimana atas pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan realisasi belanja atas pekerjaan tersebut diakui seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan namun belum dibayarkan, sehingga memunculkan akun utang jangka pendek.

Berdasarkan posisi Aset dan Kewajiban per 31 Desember 2023, maka Ekuitas yang dimiliki pemerintah pusat di Provinsi Lampung sebesar Rp78.735,13 miliar atau secara tahunan sedikit meningkat 0,81 persen (yoy) seiring dengan peningkatan Kewajiban. Ekuitas mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2.4.2. Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap

Aset tetap merupakan pos dalam Neraca yang memiliki nilai paling signifikan terhadap total aset. Per 31 Desember 2023, total aset tetap yang dikelola pemerintah pusat di Lampung mencapai Rp97.442,26 miliar dengan akumulasi penyusutan Rp22.008,53 miliar, sehingga nilai Aset Tetap bersih

tercatat Rp75.433,73 miliar atau secara kontribusi menyumbang 95 persen dari total aset. Meskipun nilai Aset Tetap bruto menunjukkan kenaikan sebesar 1,85 persen (*yoy*), namun secara netto nilai Aset Tetap menunjukkan penurunan sebesar 0,57 persen (*yoy*) seiring peningkatan penyusutan aset tetap. Rincian saldo Aset Tetap bruto per jenis aset ditunjukkan sebagaimana tabel 2.20.

Tabel 2.20. Rincian Saldo Aset Tetap Bruto berdasarkan Jenis Aset per 31 Desember 2023 dan 2024 (miliar Rp, persen)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2022 (Audited)	Saldo Per 31 Des 2023 (Unaudited)	% Growth
Tanah	49.616,92	49.604,78	-0,03
Peralatan dan Mesin	7.627,51	8.287,64	8,66
Gedung dan Bangunan	5.895,25	6.394,27	8,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.583,86	32.700,37	3,54
Aset Tetap Lainnya	143,36	129,68	-9,55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	809,78	325,52	-59,81
Total	95.676,68	97.442,26	1,85

Sumber: LKPK-TW (diolah)

Penambahan Aset Tetap pemerintah bersumber dari realisasi Belanja Modal pada periode berkenaan dan telah selesai proses pembangunannya. Sepanjang Tahun 2023, realisasi Belanja Modal di Provinsi Lampung mencapai Rp1.511,22 miliar. Rincian realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 ditunjukkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.21. Kontribusi Belanja Modal Per Jenis Tahun 2022 dan 2023 (miliar, Rp)

Jenis Belanja Modal	Realisasi 2022 (miliar, Rp)	% Kontribusi	Realisasi 2023 (miliar, Rp)	% Kontribusi
Tanah	5,56	0,31	8,52	0,56
Peralatan dan Mesin	191,15	10,79	184,99	12,24
Gedung dan Bangunan	426,52	24,08	286,57	18,96
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	953,92	53,86	814,51	53,90
Lainnya	12,91	0,73	44,02	2,91
Badan Layanan Umum (BLU)	180,95	10,22	172,61	11,42
Total Belanja Modal	1.771,01	100,00	1.511,22	100,00

Sumber: SINTESA (diolah)

Dari total realisasi Belanja Modal pada tahun 2023, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan aset jalan, irigasi, dan jaringan dengan kontribusi 53,90 persen dari total Belanja Modal, yang antara lain dimanfaatkan untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional serta pembangunan jaringan air. Kontribusi dominan selama dua tahun terakhir ini mencerminkan pembangunan infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air masih menjadi prioritas di Provinsi Lampung. Sementara, untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan gedung sarana

Pendidikan tinggi pada UIN Raden Intan Lampung dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Tabel 2.22. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2023 (miliar, Rp)

Uraian	2022	2023
Realisasi Belanja Modal (miliar, Rp)	1.771,01	1.511,22
Penambahan Nilai Aset Tetap Bruto dari Saldo Awal Tahun (miliar, Rp)	1.718,32	1.765,58
Rasio BM terhadap Penambahan Aset Tetap	1,03	0,86

Sumber: SINTESA, LKPK-TW (diolah)

Untuk mengukur seberapa besar kenaikan aset tetap terhadap realisasi Belanja Modal dapat digunakan Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap kenaikan aset tetap disajikan pada tabel xx. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap pada tahun 2023 adalah sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Aset Tetap bruto selama tahun 2023 bukan hanya bersumber dari realisasi Belanja Modal pada tahun berkenaan, mengingat proses pembangunan aset tetap sangat dimungkinkan untuk membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan. Kondisi tersebut juga seiring dengan rasio pada tahun 2022 yakni sebesar 1,03, dimana artinya realisasi Belanja Modal melebihi kenaikan Aset Tetap bruto pada tahun tersebut.

2.4.3. Realisasi dan Potensi PNPB dari BMN

Di Provinsi Lampung, PNPB yang bersumber dari Pengelolaan BMN memiliki tren peningkatan selama tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada grafik 2.58. Pada tahun 2023, PNPB Pengelolaan Aset ditargetkan mencapai Rp16,42 miliar. Sampai dengan akhir tahun, realisasi PNPB tahun 2023 mencapai Rp21,19 miliar yang terdiri atas pendapatan atas pemindahtanganan BMN, pendapatan sewa, rampasan kejaksaan, dan pendapatan pengelolaan BMN oleh Satker BLU.

Grafik 2.58. Tren Target dan Realisasi Pengelolaan BMN di Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 (miliar, Rp)



Sumber: Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu (diolah)

Sementara, pada 2024, target PNBPN Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp20,20 miliar atau meningkat 22,99 persen (yoy). Sampai dengan 31 Maret 2024, PNBPN Pengelolaan BMN telah terealisasi sebesar Rp6,6 miliar atau 32,67 persen dari target.

Di samping itu, terdapat beberapa potensi PNBPN Pengelolaan Aset di Provinsi Lampung, antara lain:

1. Pemanfaatan BMN berupa PLTS pada Perguruan Tinggi ITERA melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN, dimana terdapat dua potensi PNBPN bagi negara yaitu kontribusi tetap yang merupakan perhitungan dari penggunaan tanah negara dan *Profit Sharing* yang berasal dari pembagian keuntungan Mitra yang menjual listrik yang dihasilkan dari PLTS tersebut ke PLN.
2. Pemanfaatan BMN pada Satker Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tulang Bawang terkait pemanfaatan BMN berupa tanah, bangunan dan mesin untuk *pilot plant ethanol, high fructose syrup (HFS)*, dan *Dry Yeast Solid (DYS)*.
3. Potensi pemanfaatan BMN atas hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Objek SBSK target tahun 2024 Di Provinsi Lampung sebanyak 1.795 NUP berupa Tanah Bangunan Kantor, Bangunan Gedung Kantor, Tanah Rumah Negara, Bangunan Rumah Negara, Tanah Mess/Asrama, Bangunan Mess/Asrama, Tanah dan /atau Bangunan Pendidikan, Persidangan dan Tahanan.



Boks 2.1

Pemanfaatan Dana Desa



Success Story Desa Mekar Mulya

Desa Mekar Mulya yang terletak di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan memiliki 11 Dusun dengan luas wilayah 889 Ha yang terdiri atas pekarangan, perkebunan dan sawah. Sejak digulirkannya Dana Desa tahun 2015 hingga saat ini, Desa Mekar Mulya telah memanfaatkan Dana Desa di segala Sektor Bidang Pembangunan termasuk upaya penanganan stunting.

Pada tahun 2023, Desa Mekar Mulya menjadi salah satu Lokus Stunting di Kecamatan Palas dengan jumlah anak stunting sebanyak 32 anak (data 2021). Berkat kerjasama yang baik berbagai pihak yang didukung oleh seluruh warga desa serta adanya sinergi pendanaan melalui Dana Desa, tahun 2024 ini Desa Mekar Mulya telah berhasil mencapai predikat zero stunting. Capaian ini menjadi salah satu prestasi yang telah diapresiasi oleh Bupati Lampung Selatan dan Camat Palas dengan diraihnya Juara 1 Road Show Dalam Rangka Penurunan Stunting Kecamatan Palas Se- Kabupaten Lampung Selatan.

Beberapa kegiatan yang mendukung penanganan stunting melalui anggaran Dana Desa di Desa Mekar Mulya pada tahun 2023 antara lain penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Posyandu, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita, Penguatan Ketahanan Pangan (pemberian bibit alpukat dan program penggemukan sapi), Pengadaan insentif untuk Kader Kesehatan, Pengadaan kebutuhan medis serta Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Kegiatan program rutin Jumat bersihserentak di 11 dusun wilayah Desa Mekar Mulya



Pembagian 1500 bibit alpukat kepada 1460 rumah warga Desa Mekar Mulya



“Kegagalan Hanya Terjadi Ketika Kita Menyerah”

-B. J. Habibie-
Preseiden Republik Indonesia Ketiga

PROFILING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)



BAB III



BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: PROFILING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

3.1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020), UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Mengingat peran signifikan ini, Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program pemberdayaan UMKM yang bertujuan meningkatkan omset dan keuntungan, mengembangkan lini usaha, memperluas akses pembayaran, memperbanyak kanal penjualan, mendekati kepada pemberi modal, hingga mendukung ekspor ke luar negeri.

Pemerintah, melalui berbagai Kementerian dan Lembaga, telah meluncurkan sejumlah program untuk mendukung sektor UMKM. Dari sisi permintaan, terdapat kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan kebijakan belanja pemerintah yang memprioritaskan produk UMKM. Dari sisi penawaran, dukungan diberikan melalui bantuan pembiayaan, subsidi bunga, dukungan ekspor, dan insentif perpajakan. Selain pemerintah, berbagai pihak seperti Bank Indonesia, BUMN, dan perusahaan swasta juga aktif menyelenggarakan program pemberdayaan UMKM.

Pada lingkup Kementerian Keuangan, arahan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen Kementerian dalam pemberdayaan UMKM. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sebagai Unit Eselon I di Kementerian Keuangan, bersama dengan seluruh jajarannya baik di Kantor Pusat maupun di Daerah, turut berperan dalam upaya ini.

Dasar hukum pelaksanaan program pemberdayaan ini juga diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mengarahkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di seluruh jajaran DJPb.

Pemberdayaan UMKM oleh Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terhadap UMKM yang mendapatkan program pemberdayaan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemberdayaan UMKM, yang meliputi: *Profiling* UMKM; dan Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan UMKM.
2. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM, yang meliputi: Pendampingan usaha; dan Pembiayaan.
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, yang meliputi: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM; dan Pelaporan pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh DJPb, dimana diawali dengan tahapan *profiling* UMKM pada Triwulan I 2024.

3.2. KATEGORI UMKM

3.2.1. UMKM

Sejalan dengan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan, kriteria pelaku UMKM yang digunakan dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengikuti klasifikasi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar;
- Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 15 miliar; dan
- Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar hingga maksimal Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar hingga maksimal Rp 50 miliar.

Selain dari kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, terdapat satu kategori lain yang secara konsep dapat dipisahkan, yaitu usaha Ultra Mikro (UMi). Usaha Ultra Mikro merujuk pada usaha dengan skala mikro yang berada pada taraf yang sangat minim. Usaha ini biasanya beroperasi dengan modal yang sangat kecil, sering kali berbasis rumahan, dan cenderung memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Karakteristik utama dari usaha Ultra Mikro adalah bahwa mereka sering dianggap *non-bankable* oleh para penyedia pembiayaan seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Usaha Ultra Mikro biasanya dikelola oleh individu atau keluarga dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal, dikarenakan tidak memiliki dokumen keuangan yang lengkap atau jaminan yang memadai untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu, usaha ultra mikro tidak jarang bergantung pada sumber pembiayaan informal seperti pinjaman dari keluarga, teman, atau rentenir, yang sering kali mengenakan bunga tinggi. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh usaha Ultra Mikro termasuk akses terbatas ke pasar yang lebih luas, serta keterbatasan dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan.

Pada tahun 2023, Provinsi Lampung mencatat jumlah UMKM sebanyak 492.986 unit usaha, yang mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 44,53 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah UMKM di

Provinsi Lampung yang signifikan ini mencerminkan dinamika ekonomi regional yang menggairahkan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan sektor-sektor mikroekonomi. Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Adapun jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023 sebagaimana dalam tabel 3.1

Tabel 3.1. Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022 dan 2023

Kabupaten/ Kota	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Jumlah Usaha	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Lampung Barat	9.736	20.308	-	187	-	26	9.736	20.521
Tanggamus	4.214	27.798	-	2	-	1	4.214	27.801
Lampung Selatan	15.406	41.172	-	-	-	1	15.406	41.173
Lampung Timur	41.250	33.519	-	4	-	5	41.250	33.528
Lampung Tengah	60.841	60.841	-	4	-	3	60.841	60.848
Lampung Utara	27.407	28.655	-	1	-	-	27.407	28.656
Way Kanan	1.100	58.001	-	-	-	3	1.100	58.004
Tulang Bawang	35.612	31.880	-	494	-	54	35.612	32.428
Pesawaran	7.106	43.021	265	278	23	31	7.394	43.330
Pringsewu	24.779	45.246	-	401	-	36	24.779	45.683
Mesuji	8.676	16.238	-	177	-	18	8.676	16.433
Tulang Bawang Barat	7.547	23.479	-	249	-	22	7.547	23.750
Pesisir Barat	8.346	10.512	-	98	-	11	8.346	10.621
Bandar Lampung	4.460	30.934	-	2	-	4	4.460	30.940
Metro	16.640	18.917	26	305	23	48	16.689	19.270
Lampung	273.120	490.521	291	2.202	46	263	273.457	492.986

Sumber: BPS serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2024

Analisis data jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa kategori usaha di berbagai daerah. Secara keseluruhan, jumlah usaha mikro mengalami peningkatan yang sangat besar di banyak wilayah, terutama di kabupaten Way Kanan, Tanggamus, dan Pesawaran. Di Way Kanan, jumlah





usaha mikro melonjak dari 1.100 pada tahun 2022 menjadi 58.001 pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Tanggamus juga mencatat peningkatan drastis dari 4.214 menjadi 27.798 usaha mikro. Tren ini mencerminkan adanya dorongan besar dalam pengembangan usaha mikro di wilayah tersebut, kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal atau peningkatan akses ke pembiayaan dan sumber daya bagi pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota seperti Lampung Timur dan Tulang Bawang mengalami penurunan jumlah usaha mikro. Lampung Timur, misalnya, mengalami penurunan dari 41.250 usaha mikro pada tahun 2022 menjadi 33.519 pada tahun 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi pelaku usaha ke daerah lain, tantangan ekonomi lokal, atau perubahan dalam kebijakan lokal yang mempengaruhi keberlangsungan usaha mikro. Meski demikian, beberapa daerah tetap menunjukkan stabilitas atau peningkatan dalam kategori usaha kecil dan menengah, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan di tingkat mikro, usaha kecil dan menengah mungkin mendapatkan dukungan yang lebih baik atau lebih terfokus.

Selain itu, jumlah usaha kecil dan menengah secara keseluruhan juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun tidak seintensif usaha mikro. Misalnya, di Tulang Bawang, usaha kecil meningkat dari tidak ada pada tahun 2022 menjadi 494 pada tahun 2023, dan usaha menengah bertambah dari tidak ada menjadi 54. Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu juga mengalami peningkatan dalam jumlah usaha kecil dan menengah. Peningkatan ini mencerminkan bahwa ada pergeseran atau penambahan di sektor usaha yang lebih mapan, yang mungkin didorong oleh skala ekonomi pada usaha yang lebih baik, program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha skala kecil dan menengah, atau peningkatan akses ke pasar dan teknologi. Hal tersebut juga menandakan adanya diversifikasi ekonomi yang lebih baik di beberapa wilayah kota/kabupaten, yang memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

3.2.2. Klasterisasi UMKM Naik Kelas

Dalam upaya untuk memusatkan Program Layanan dan Program Pendukung yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, serta menyusun kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pelaku UMKM dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi UMKM: UMKM Rintisan, UMKM Siap Mandiri, dan UMKM Siap Ekspor.

Aspek yang digunakan dalam klasterisasi UMKM antara lain:

- a. kondisi keuangan usaha;
- b. kapasitas produksi;
- c. akses pemasaran atau jangkauan;
- d. perizinan dan sertifikasi usaha;
- e. kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. kualitas tenaga kerja;
- g. sistem logistik; dan / atau
- h. kesiapan untuk ekspor.

Klasterisasi UMKM Naik Kelas sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan dan KEP-112/PB/2023 adalah sebagai berikut:

- a. UMKM Rintisan, merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki rekening bank;
 - 2) Belum melakukan pencatatan usaha;
 - 3) Belum memisahkan keuangan pribadi dengan usaha;
 - 4) Belum mampu menyusun laporan keuangan usaha;
 - 5) Belum mampu mengakses pembiayaan dari lembaga formal;
 - 6) Belum menggunakan media pemasaran dan promosi secara online;
 - 7) Belum pernah mengikuti bazar atau pameran baik di dalam maupun luar negeri;
 - 8) Belum memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya; dan
 - 9) Produk belum berorientasi ekspor.
- b. UMKM Siap Mandiri, merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:



- 1) Memiliki rekening bank yang tercampur untuk transaksi pribadi dan usaha;
 - 2) Telah melakukan pencatatan usaha sederhana, tetapi belum mampu Menyusun laporan keuangan usaha;
 - 3) Telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
 - 4) Telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara online dengan jangkauan transaksi hingga ke luar kota;
 - 5) Pernah mengikuti bazar atau pameran dalam negeri;
 - 6) Sudah memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya;
 - 7) Produk belum berorientasi ekspor namun sudah mengetahui mengenai tata cara ekspor; dan
 - 8) Sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri tetapi belum mengimplementasikannya.
- c. UMKM Siap Ekspor, merupakan pelaku UMKM yang memiliki kriteria usaha sebagai berikut:
- 1) Memiliki rekening bank terpisah antara transaksi pribadi dan usaha;
 - 2) Telah melakukan pencatatan usaha dan mampu menyusun laporan keuangan usaha;
 - 3) Telah mampu mengakses pembiayaan usaha dari lembaga formal;
 - 4) Telah aktif menggunakan media pemasaran dan promosi secara online dengan jangkauan transaksi hingga ke luar negeri;
 - 5) Pernah mengikuti bazar atau pameran di luar negeri;
 - 6) Sudah memiliki NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya;
 - 7) Produk berorientasi ekspor;
 - 8) Sudah mengetahui tata cara ekspor dan siap melakukan ekspor; dan/atau
 - 9) Sudah mengetahui mengenai cara untuk terhubung dengan calon pembeli dari luar negeri dan secara aktif mengimplementasikannya

Peningkatan status UMKM, atau yang sering disebut sebagai "UMKM Naik Kelas," merujuk pada perjalanan perkembangan usaha dari tahap awal

merintis yang membutuhkan bimbingan, hingga tahap di mana usaha dapat berdiri sendiri, dan terus meningkatkan produktivitasnya hingga mampu bersaing di pasar internasional. Dalam konteks ini, UMKM Naik Kelas mencakup transisi dari kategori UMKM Rintisan menuju UMKM Siap Mandiri dan UMKM Siap Ekspor, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing usaha, sehingga mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar lokal maupun global.

Gambar 3.1. Ilustrasi Peningkatan Status UMKM



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2023 (diilustrasikan)

3.3. HASIL PROFILING UMKM

Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung akan diarahkan secara khusus kepada Usaha Mikro. Pemilihan fokus ini didasarkan pada peran penting Kantor Vertikal DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Dua jenis kredit ini secara signifikan dimanfaatkan oleh UMKM di tingkat Mikro dan Ultra Mikro.

Langkah ini diambil, dengan salah satu tujuannya, agar turut memperkuat ekosistem UMKM di area pembiayaan tersebut, sekaligus memberikan dukungan yang lebih terarah bagi sektor usaha yang biasanya berasal dari keluarga prasejahtera. Dengan memfokuskan pemberdayaan pada Usaha Mikro, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih langsung dan merata bagi para pelaku usaha rintisan di Lampung.

Upaya ini akan mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akses terhadap pembiayaan, serta peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM. Selain itu, akan diberikan pendampingan dan bimbingan teknis agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi lebih kompetitif



dalam pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung tidak hanya menjadi upaya untuk meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha kecil, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.

3.3.1. Proses *Profiling*

Proses *profiling* UMKM memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai karakteristik dan kondisi bisnis UMKM. Informasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Langkah-langkah yang dijalankan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung dan KPPN lingkup Provinsi Lampung dalam melakukan *profiling* UMKM meliputi beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan pertama adalah melalui wawancara langsung atau survei dengan para pelaku usaha.

Wawancara dan survei ini dilakukan dengan fokus untuk menggali informasi terkait dengan kebutuhan pemberdayaan yang dibutuhkan. Data dikumpulkan meliputi informasi tentang pelaku usaha, profil usaha, serta kondisi yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Proses wawancara dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya secara tatap muka dan daring (*video call* atau telepon). Pentingnya *profiling* UMKM juga tercermin dalam upaya perluasan dukungan pemerintah terhadap UMKM yang belum mendapatkan bantuan atau pemberdayaan dari pihak mana pun.

Selain itu, proses wawancara dan survei didokumentasikan dengan baik, yang mencakup rekapitulasi hasil yang akan digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi UMKM. Format wawancara dan survei mengacu pada standar yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan relevansi data *profiling* yang diperoleh.

Proses pemberdayaan UMKM di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung diselenggarakan secara simultan dan bersinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Lampung dengan empat KPPN lingkup DJPb Provinsi Lampung, yaitu KPPN Bandar Lampung, KPPN Metro, KPPN Kotabumi, dan KPPN Liwa. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan memedomani Petunjuk Teknis Pemberdayaan UMKM lingkup DJPb (KEP-112/PB/2023).

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM, telah dibentuk Tim Pemberdayaan UMKM DJPb lingkup Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung nomor KEP-60/WPB.08/2024 tentang Tim Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2024. Tim ini bertugas untuk memastikan koordinasi yang efektif dan implementasi yang efisien dari berbagai inisiatif pemberdayaan UMKM, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Lampung.

Sebagai langkah awal untuk memastikan pemberdayaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha UMKM, Kanwil DJPb Provinsi Lampung bersama KPPN di lingkup wilayah DJPb Provinsi Lampung melakukan persiapan berupa *profiling* calon UMKM yang akan diberdayakan serta identifikasi kebutuhan pemberdayaan mereka. *Profiling* UMKM dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik dan kondisi bisnis UMKM. Proses *profiling* ini sangat penting karena informasi yang diperoleh akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait kegiatan pemberdayaan UMKM yang sesuai untuk masing-masing pelaku usaha. Hasil *profiling* ini menjadi landasan untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat dan efektif bagi UMKM, serta membantu dalam membangun solusi yang sesuai dengan tantangan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha UMKM binaan ke depan.

Diawali dengan melakukan *Pra-Profiling*, Kanwil DJPb Provinsi Lampung bersama KPPN bekerja sama dengan komunitas/asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) Prima Indonesia Lampung untuk memberikan referensi UMKM yang berada di Bandar Lampung, Metro, Kotabumi, dan Liwa. Namun demikian, Kanwil tidak membatasi KPPN dalam memilih UMKM sebagai mitra binaannya, sehingga setiap KPPN memiliki fleksibilitas untuk



menentukan UMKM yang paling sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pemberdayaan yang telah ditetapkan.

Pelibatan komunitas ini dimaksudkan agar proses *profiling* lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Komunitas/asosiasi PMKM Prima Indonesia Lampung memiliki wawasan mendalam tentang pelaku UMKM di wilayah mereka dan dapat memberikan informasi yang akurat dan *up-to-date* mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM lokal. Dengan demikian, referensi dari komunitas ini membantu memastikan bahwa UMKM yang terpilih benar-benar memerlukan intervensi dan memiliki potensi untuk berkembang melalui program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Selain itu, kerja sama dengan komunitas/asosiasi juga memperkuat jaringan antara pemerintah dan pelaku usaha, menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Komunitas/asosiasi ini dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan UMKM, membantu menyampaikan kebutuhan dan umpan balik dari pelaku usaha kepada pihak yang berwenang, serta menyosialisasikan program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan UMKM di Provinsi Lampung.

Tabel 3.2. Daftar UMKM Peserta *Profiling* DJPb Lingkup Provinsi Lampung

No	Nama Usaha	Sektor Usaha	Uraian Jenis Usaha
1	JAMU (Belum ada merek)	Industri Pengolahan (Kuliner)	Rempah-rempah alami (siap minum dan racikan)
2	RADEN FOOD	Industri Pengolahan (Kuliner)	Minuman Kesehatan
3	Dapur Oniel	Industri Pengolahan (Kuliner)	Makanan Ringan & Berat
4	Cemku Cemmu	Industri Pengolahan (Kuliner)	Pengolahan Pisang
5	Mami Baba	Industri Pengolahan (Kuliner)	Pengolahan Aneka Makanan
6	Warung Tikungan M Yunus	Industri Pengolahan (Kuliner)	Jajanan Sehat
7	Kedai Ajobung	Industri Pengolahan (Kuliner)	Catering
8	Dapur Vania/Vania Cookies	Industri Pengolahan (Kuliner)	Kuliner
9	Cemilan Cepuluh	Industri Pengolahan (Kuliner)	Makanan Ringan/Snack/Cemilan
10	Kallista Cookies	Industri Pengolahan (Kuliner)	Aneka Kue
11	Aull Kitchen Food	Industri Pengolahan (Kuliner)	Kuliner
12	Ussy Banana Strudel	Industri Pengolahan (Kuliner)	Makanan
13	Crafter rajut	Industri Pengolahan (Kuliner)	Crafter rajut
14	Kue Tat Istimewa	Industri Pengolahan (Kuliner)	Bakery
15	Mie Ayam Dimsumol	Industri Pengolahan (Kuliner)	Mie Ayam dan Dimsum
16	Dapur Bude Iyah	Industri Pengolahan (Kuliner)	Dapur Bude Iyah
17	Kopi dan Keripik Pak Azrim	Perdagangan besar dan eceran	Kopi bubuk
18	Warung Teh Uli	Industri Pengolahan (Kuliner)	Kuliner
19	Toko Sajid	Perdagangan besar dan eceran	Usaha sembako/Kelontong
20	Warung Uci	Industri Pengolahan (Kuliner)	Kuliner

Sumber: DJPb Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, *profiling* dilaksanakan dengan metode wawancara kepada 20 pelaku UMKM, baik secara

daring maupun luring. Pelaku UMKM peserta *profiling* 10 diantaranya merupakan referensi PMKM Prima Indonesia Lampung dan 10 lainnya berasal dari inisiatif Tim Pemberdayaan UMKM lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Untuk mengetahui lebih rinci dari kondisi pelaku UMKM, Tim juga melakukan survei ke lokasi usaha UMKM terkait. Adapun 20 pelaku UMKM peserta *profiling* DJPb Lingkup Provinsi Lampung sebagaimana tabel 3.2.

3.3.2. Hasil *Profiling*

Dari 20 pelaku UMKM yang mengikuti *profiling*, diidentifikasi 17 diantaranya merupakan UMKM Rintisan sedangkan 3 lainnya yaitu Raden Food, Crafter Rajut, dan Aull Kitchen Food merupakan UMKM Siap Mandiri. Belum terdapat pelaku UMKM yang masuk dalam kategori UMKM Siap Ekspor.

3.3.2.1. Aspek Keuangan

Aspek keuangan menilai kepemilikan rekening, pencatatan transaksi usaha, dan akses pembiayaan. Dari 20 UMKM yang dinilai, terdapat 2 usaha, yaitu UMKM Dapur Bude Yah dan Kedai Ajobung, yang belum memiliki rekening bank. Mayoritas UMKM (70 persen atau 14 UMKM) telah memiliki rekening namun belum memisahkan keperluan pribadi dan transaksi usaha, sementara 20 persen telah memiliki rekening terpisah untuk transaksi usahanya.

Dalam hal pencatatan transaksi usaha, 50 persen dari UMKM telah melakukan pencatatan sederhana namun belum menyusun laporan keuangan. Sebanyak 45 persen (9 UMKM) belum melakukan pencatatan transaksi sama sekali, dan hanya 5 persen atau 1 UMKM, yaitu Aull Kitchen Food yang telah menyusun laporan keuangan tahunan.

Dari segi pembiayaan, 70 persen (14 UMKM) belum mampu mengakses pembiayaan dari lembaga formal, sedangkan 30 persen (6 UMKM) telah berhasil mengakses pembiayaan dari lembaga formal, seperti perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3.3.2.2. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran menilai bagaimana cara UMKM menjual produk yang dimiliki baik secara *offline*,



online, atau kombinasi keduanya. Sebagian besar UMKM telah memanfaatkan media sosial untuk melakukan penjualan secara online dimana 9 diantaranya berjualan baik *offline* maupun *online*. Media sosial yang paling banyak digunakan sebagai channel peninjakan produk adalah *WhatsApp* dan *Instagram*. Terdapat juga yang menggunakan *Go-Food*, *Facebook* bahkan *TikTok* dalam melakukan pemasaran. Di sisi lain, masih ada 6 UMKM yang hanya menjual melalui metode *offline*. Hal ini karena mereka belum mengetahui bagaimana penggunaan media sosial secara efektif dan rasa kekhawatiran adanya pembelian secara fiktif.

3.3.2.3. Aspek Legalitas Usaha

Dalam mengembangkan usaha, legalitas usaha adalah faktor utama yang harus dimiliki. Legalitas ini merupakan izin resmi yang diperoleh pelaku UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya. Legalitas penting karena merupakan bukti bahwa kegiatan usaha sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari 20 UMKM peserta *profiling*, 70 persen (15 UMKM) belum memiliki izin usaha, dan 12 UMKM di antaranya belum memiliki NPWP. Dari 5 UMKM yang telah memiliki legalitas usaha, 2 UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 1 UMKM memiliki NIB dan Sertifikasi Halal, 1 UMKM memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal, serta 1 UMKM memiliki NIB, PIRT, Sertifikasi Halal, sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

3.3.2.4. Aspek Kesiapan Ekspor

Seluruh UMKM peserta *profiling* belum siap melakukan ekspor. Namun, tiga di antaranya berminat dan telah mengetahui tata cara ekspor karena pernah mengikuti pelatihan, meskipun bukan melalui pendampingan rutin. Beberapa kendala yang menyebabkan ketidaksiapan pelaku UMKM dalam melakukan ekspor antara lain produk yang tidak cocok untuk ekspor, kualitas produksi yang belum memenuhi standar ekspor, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur ekspor.

Tabel 3.3 berikut adalah hasil klasifikasi UMKM yang telah dilakukan *profiling*.

Tabel 3.3. Hasil Klasifikasi *Profiling* UMKM

Nama Usaha	Klasifikasi UMKM
JAMU (Belum ada merek)	UMKM Rintisan
Ussy Banana Strudel	
Dapur Oniel	
Cemku Cemmu	
Mami Baba	
Warung Tikungan M Yunus	
Kedai Ajobung	
Dapur Vania/Vania Cookies	
Cemilan Cepuluh	
Kallista Cookies	
Kue Tat Istimewa	
Mie Ayam Dimsumol	
Dapur Bude Iyah	
Kopi dan Keripik Pak Azrim	
Warung Teh Uli	
Toko Sajid	UMKM Siap Mandiri
Warung Uci	
Crafter rajut	
RADEN FOOD	UMKM Siap Mandiri
Aull Kitchen Food	

Sumber: DJPb Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

3.3.3. Deskripsi UMKM yang mendapatkan pemberdayaan

Pemberdayaan UMKM oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan diberikan secara intensif kepada UMKM dalam klaster UMKM Rintisan dan UMKM Siap Mandiri. Namun, jumlah UMKM yang menerima pemberdayaan ini akan disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di Kanwil dan KPPN. Pemberdayaan intensif bertujuan untuk memantau perkembangan usaha, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, memberikan solusi, dan memastikan implementasi saran serta masukan oleh pelaku UMKM. Sementara itu, UMKM peserta *profiling* yang tidak mendapatkan pemberdayaan intensif akan tetap menerima pemberdayaan, meskipun secara insidental. Kriteria UMKM dipilih untuk mendapatkan Pemberdayaan antara lain:

- Pelaku UMKM merupakan Warga Negara Indonesia;
- Memiliki produk yang siap dijual;
- Produk yang dihasilkan bukan produk imitasi dan melanggar hak kekayaan intelektual; dan/atau
- Pelaku UMKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usaha.

Kriteria penting dalam pemilihan UMKM untuk program pemberdayaan dari Kanwil dan KPPN



adalah motivasi kuat untuk mengembangkan usaha. Motivasi ini diukur melalui rencana jangka menengah atau panjang dan partisipasi dalam pelatihan atau kegiatan pengembangan usaha. Semua UMKM yang mengikuti *profiling* telah menunjukkan keinginan untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan lainnya.

Berdasarkan hasil *profiling*, Tim Pemberdayaan UMKM lingkup Kanwil Provinsi Lampung telah memilih beberapa UMKM yang akan mendapatkan Pemberdayaan secara intensif yaitu:

a. *Kallista Cookies*

Gambar 3.2. Produk Kallista Cookies



Kallista Cookies, didirikan oleh Desy Hendrianti pada tahun 2013, berkembang dari hobi membuat kue untuk keluarga dan tetangga. Atas saran kerabat, Ibu Desy memulai usaha kuliner, memproduksi berbagai kue

seperti *chocolate cookies*, bolu, risoles, dan arem-arem. Kini, *Kallista Cookies* telah berkembang dan menerima pesanan dari berbagai kantor, baik swasta maupun pemerintah. Penjualan rata-rata *Kallista Cookies* mencapai Rp40 juta dalam setahun. Produk *Kallista Cookies* dijual secara *online*, terutama melalui platform *WhatsApp*. Ke depannya, UMKM ini sangat berharap untuk mendapatkan pendampingan guna memperoleh sertifikat halal dan pengembangan dalam strategi pemasaran.

b. Jamu Ibu Rina

Gambar 3.3. Produk Jamu Ibu Rina



Jamu Ibu Rina merupakan sebuah usaha yang menghususkan diri dalam penjualan jamu siap seduh yang dapat dinikmati secara praktis

di mana pun. Produk ini dihasilkan dari rempah-rempah pilihan yang dipilih secara khusus dan berkualitas tinggi, yang diyakini mampu memberikan manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Di tengah maraknya produk-produk kesehatan modern yang beredar di pasaran, jamu Ibu Rina berhasil mempertahankan posisinya dengan mengedepankan kualitas dan keaslian produknya.

Meskipun usaha ini baru dimulai tahun lalu, Ibu Rina telah mampu mencapai omset tahunan hampir Rp10 juta. Pembeli dapat melakukan pembayaran di depot jamu tersebut menggunakan tunai maupun QRIS. Saat ini, Ibu Rina tengah mengajukan permohonan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.

c. Crafter Rajut

Gambar 3.4. Produk Crafter Rajut



Crafter Rajut, yang berlokasi di Perum Sukarame, Bandar Lampung, adalah sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didirikan oleh Helen Putri pada bulan Maret 2020.

Crafter Rajut telah resmi terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun demikian, hingga saat ini, Crafter Rajut belum memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha, dan belum menyusun laporan keuangan yang formal. Namun, telah dilakukan pencatatan transaksi secara sederhana.

Saat ini, Crafter Rajut tengah mengajukan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan modal usahanya. Dalam upaya pemasaran dan penjualan produknya, Crafter Rajut memanfaatkan berbagai media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Shopee*, dan *TikTok*. Crafter Rajut juga memiliki keinginan untuk memperluas pasarannya ke luar negeri, namun belum memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses ekspor.

d. Mie Ayam Dimsumol

Berlokasi di Jalan Way Mesuji Pahoman, Bandar Lampung, Ade Vircanola Yusman memulai usaha menjual mie ayam dan dimsum pada bulan Oktober 2022. Sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) rintisan, Mie Ayam Dimsumol didirikan dengan modal yang

diperoleh melalui pinjaman dari sumber yang non-lembaga formal. Dari segi keuangan, Mie Ayam Dimsumol telah

Gambar 3.5. Mie Ayam Dimsumol



Ayam Dimsumol telah melakukan pemisahan antara rekening pribadi dan rekening usaha, meskipun belum mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Saat ini, pencatatan

transaksi usaha hanya terbatas pada arus kas masuk dan keluar.

Selain melakukan pemasaran secara offline, Mie Ayam Dimsumol juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan memasarkan produknya melalui platform marketplace Go Food. Meskipun demikian, Mie Ayam Dimsumol belum memperoleh legalitas usaha yang resmi dan juga belum memiliki sertifikasi halal untuk produknya.

e. Dapur Bude Yah

Gambar 3.6. Dapur Bude Yah



Usaha Dapur Bude Yah, yang berlokasi di Bumi Kedamaian, Bandar Lampung, didirikan oleh Ibu Sargiyah pada bulan Oktober 2020,

dengan bubur kacang hijau dan ketimus sebagai produk utamanya. Dengan modal awal sekitar 5 juta rupiah, omzet tahunan Dapur Bude Yah saat ini mencapai sekitar 20 juta rupiah. Sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) rintisan, Dapur Bude Yah belum membuka rekening bank dan juga belum melakukan pencatatan transaksi usaha secara formal. Produk dari Dapur Bude Yah saat ini hanya dipasarkan dan dijual secara *offline*. Selain itu, legalitas usaha dan sertifikasi halal juga belum dimiliki oleh Dapur Bude Yah.

f. Kue Tat Istimewa

Usaha Kue Tat Istimewa telah beroperasi sejak bulan Juni 2018 dan berlokasi di Jl. P. Emir M. Noer, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dimiliki bersama oleh Ahmad Bastari dan Ro Isatul Husna, usaha ini mengkhususkan diri dalam penjualan kue tradisional Lampung,

khususnya Kue Tat, dengan modal awal sebesar 3 juta rupiah. Saat ini, usaha ini berhasil menghasilkan omzet sekitar 36 juta rupiah per tahun.

Gambar 3.7. Kue Tat Istimewa



Dari segi keuangan, usaha Kue Tat Istimewa masih menggunakan rekening bank yang sama untuk keperluan pribadi dan transaksi usaha, serta belum melakukan pencatatan transaksi

usaha secara terpisah. Meskipun demikian, usaha ini menerima pembayaran melalui kas dan juga transfer bank. Promosi dan penjualan produk dilakukan secara offline, karena pemilik usaha berpendapat bahwa penjualan melalui platform marketplace dapat mengurangi keuntungan. Meskipun telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), usaha Kue Tat Istimewa belum memiliki legalitas usaha yang lengkap serta sertifikasi halal.

g. Toko M. Sajid

Toko M. Sajid, yang beralamat di Jalan Mawar, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, merupakan usaha yang bergerak di

Gambar 3.8. Toko M. Sajid



sektor warung sembako dan kelontong.

Berdiri sejak tahun 2015 dengan modal awal sebesar Rp2 juta, toko

ini kini telah mampu mencapai omzet bulanan sekitar Rp7 juta.

Meskipun demikian, pengelolaan keuangan toko ini belum mencakup pencatatan transaksi secara memadai dan masih menggunakan rekening pribadi untuk keperluan bisnis. Penjualan masih didominasi secara *offline*, meskipun sudah mulai merambah ke platform *marketplace* dan melakukan promosi melalui *WhatsApp*. Toko ini belum memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan penipuan. Ibu Rosmita, sebagai

pemilik toko, pernah mendapatkan pendampingan usaha dalam waktu singkat, namun belum ada pendampingan yang lebih lanjut terutama dalam hal pemasaran.

h. Warung Uci

Gambar 3.10. Warung Mba Uci



Warung Uci, yang terletak di Jalan Kenanga Sukung, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, adalah sebuah

usaha di sektor kuliner dan jasa katering. Dibangun oleh Ibu Suciyati pada tahun 2012 dengan modal sebesar 5 juta rupiah, warung ini strategis berlokasi di depan Rumah Sakit Handayani Kotabumi, menarik banyak pengunjung rumah sakit. Saat ini, Warung Uci memiliki empat karyawan dan menghasilkan omset bulanan sekitar 8 juta rupiah.

Meskipun demikian, pengelolaan keuangan Warung Uci masih belum mencakup pencatatan yang memadai, dan rekening bank untuk keperluan pribadi dan usaha belum dipisahkan, sehingga laba bersih tidak dapat diketahui secara pasti. Walaupun begitu, Warung Uci menerima pembayaran melalui transfer bank dan tunai. Pemasaran Warung Uci masih bergantung pada promosi secara personal melalui WhatsApp, karena Ibu Suciyati belum terbiasa dengan media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan marketplace. Selain itu, kekhawatiran terhadap kemungkinan penipuan juga menjadi alasan utama mengapa Warung Uci belum memanfaatkan platform digital lainnya untuk pemasaran.

i. Kopi dan Keripik Pak Arim

Usaha Kopi dan Kripik Pak Azrim, yang berlokasi di Jalan Raya Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, telah beroperasi sejak tahun 2015. Usaha ini bergerak dalam produksi kopi bubuk serta kripik singkong dan talas yang diolah dari hasil kebun sendiri menjadi produk kemasan. Usaha ini dikelola

Gambar 3.9. Kopi dan Keripik Pak Arim



oleh Pak Azrim dan istrinya, dengan modal awal kurang dari satu juta rupiah dan omzet tahunan sekitar Rp14,4 juta rupiah. Pak Azrim

telah memiliki rekening bank bersama untuk keperluan pribadi dan usaha, serta mencatat transaksi secara sederhana meskipun belum mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap. Usaha ini juga telah menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Metode penjualan saat ini dilakukan secara *offline* dengan menitipkan produk di warung-warung sekitar. Namun, usaha ini belum memiliki izin resmi dan produk belum berorientasi ekspor karena kemasan yang belum memadai.

j. Warung Teh Uli

Gambar 3.11. Warung teh Uli



Usaha Warung Teh Uli, yang berlokasi di Jalan Raden Intan, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, telah

beroperasi sejak tahun 2017. Dikelola oleh Ibu Mayasari bersama suami dan satu pegawai, usaha ini menawarkan berbagai hidangan seperti nasi uduk, nasi kuning, pecel, gorengan, dan es kelapa muda. Dengan modal awal sebesar empat juta rupiah, usaha ini menghasilkan omzet tahunan sekitar 200 juta rupiah. Ibu Mayasari menggunakan rekening bank bersama untuk keperluan pribadi dan usaha, serta mencatat transaksi secara sederhana, meskipun belum mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap. Penjualan dilakukan secara *online* melalui *WhatsApp* dan *Digipay*, serta secara *offline*. Usaha ini telah memiliki izin dari kelurahan, namun produk belum berorientasi ekspor karena dinilai kurang cocok untuk pasar tersebut.

“ Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan mengelola APBN secara baik dan bertanggung jawab ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS



BAB IV



BAB VI ANALISIS TEMATIK: EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

4.1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah seiring dengan peningkatan daya saing Indonesia. Namun, meski telah ada upaya, Indonesia masih tertinggal dalam daya saing infrastruktur dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan penopang perkembangan kota seiring dengan urbanisasi.

Dalam APBN 2024, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, prioritas pada pelayanan dasar, dukungan terhadap pembangunan IKN, pemerataan akses TIK, dan pemberdayaan melalui skema KPBU.

Konektivitas, baik fisik maupun digital, menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Manfaatnya termasuk pengembangan perdagangan internasional, pertumbuhan bisnis, peningkatan akses ke layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas hidup, mobilitas dan integrasi regional, serta kemajuan teknologi dan inovasi.

Bab ini menyajikan analisis tematik terhadap Kinerja Keuangan Regional (KFR) Triwulan I 2024 dengan fokus pada Analisis Atas Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas. Analisis terbagi dalam tiga subbab yang menguraikan aspek-aspek kunci terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung.

Pertama, analisis perkembangan belanja dukungan infrastruktur konektivitas. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meneliti dimensi fiskal melalui penelaahan perkembangan belanja program infrastruktur konektivitas. Pemahaman mendalam terhadap pola pengeluaran ini penting untuk mengevaluasi alokasi anggaran serta dampaknya terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang berlangsung.

Kedua, analisis atas capaian indikator infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas implementasi proyek-proyek infrastruktur konektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, evaluasi efektivitas belanja pembangunan infrastruktur konektivitas. Yaitu, dilakukan analisis korelasi yang menghubungkan antara belanja infrastruktur konektivitas dengan capaian indikator konektivitas. Analisis korelasi ini memberikan gambaran awal tentang sejauh mana belanja infrastruktur konektivitas telah berkontribusi pada peningkatan konektivitas wilayah. Hasil dari analisis ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan dan alokasi anggaran di masa mendatang, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik dalam pembangunan infrastruktur konektivitas secara keseluruhan.

4.2. ANALISIS PERKEMBANGAN BELANJA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

4.2.1. Belanja Pemerintah Pusat Pendukung Infrastruktur Konektivitas di Lampung

Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan konektivitas di Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan pengalokasian dana sebesar Rp3,05 triliun selama tiga tahun terakhir, dengan realisasi mencapai Rp2,94 triliun. Dana ini secara khusus dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur konektivitas, yang diharapkan membawa dampak signifikan bagi kemajuan wilayah Lampung.

Selama tiga tahun terakhir, terjadi lonjakan signifikan dalam pagu dan realisasi belanja Pemerintah Pusat terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung. Data menunjukkan peningkatan mencolok dalam realisasi belanja, yaitu sebesar 161,20 persen (yoy) atau hampir tiga kali lipat pada tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi

belanja mencapai Rp1.545,66 miliar, dibandingkan dengan Rp591,74 miliar pada tahun 2022.

Grafik 4.1. Perkembangan Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)



Sumber: Sintesa 2024 (diolah)

Lonjakan anggaran yang dialokasikan untuk Lampung menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh penjuru Indonesia. Infrastruktur konektivitas yang kokoh menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses terhadap peluang baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan peningkatan konektivitas, diharapkan Lampung dapat terhubung dengan lebih baik dengan wilayah lain di Indonesia, membuka peluang perdagangan dan investasi baru, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Belanja Pemerintah Pusat terkait infrastruktur konektivitas selama tiga tahun terakhir di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Dukungan belanja ini dilaksanakan oleh total 14 satuan kerja (satker).

Dalam periode tersebut, anggaran infrastruktur konektivitas paling banyak dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dengan porsi sebesar 91,56 persen hingga 95,98 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat terkait infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung. Anggaran dan

realisasi Kementerian PUPR juga meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari Rp760,77 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.483,57 miliar pada tahun 2023. Sebagian besar anggaran ini digunakan untuk pemeliharaan jalan nasional oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung, dan Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Grafik 4.2. Perkembangan Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas 2021 s.d. 2023 per Kementerian/ Lembaga (Rp miliar)



Sumber: Sintesa 2024 (diolah)

Anggaran terbesar dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan jalan dan jembatan. Tiga pengeluaran terbesar meliputi penanganan jalan daerah sebesar Rp355,99 miliar, dukungan jalan akses simpul transportasi (Program Prioritas Nasional) sebesar Rp109,26 miliar, serta penggantian jembatan sebesar Rp84,80 miliar.

Selanjutnya, anggaran Kementerian Perhubungan di Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi belanja mencapai Rp48,15 miliar pada tahun 2021 dan meningkat sebesar 28,95 persen menjadi Rp62,09 miliar pada tahun 2023. Peningkatan anggaran ini mencakup seluruh aspek dukungan belanja pemerintah pusat untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur konektivitas, keselamatan, keamanan, serta pelayanan transportasi darat dan laut.

Tabel 4.1. Realisasi BPP Infrastruktur Konektivitas Lampung 2021 s.d. 2023 per K/L per Satker (Rp miliar)

Kementerian dan Satuan Kerja	2021	2022	2023
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	760,77	546,77	1.483,57
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	-	8,66	9,31
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung	6,77	-	-



Kementerian dan Satuan Kerja	2021	2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	14,86	39,65	138,92
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung	443,40	321,67	750,76
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung	273,51	149,11	542,47
Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung	22,23	27,69	42,11
Kementerian Perhubungan	48,16	44,97	62,09
Balai Pengelola Transportasi Darat Lampung	-	-	60,62
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI	47,49	44,10	-
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bakauheni	0,10	0,08	-
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Panjang	0,32	0,34	0,74
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung	0,03	0,19	0,26
Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai	0,05	0,09	0,36
Unit Penyelenggara Pelabuhan Menggala	0,10	0,16	0,11
Unit Penyelenggara Pelabuhan Mesuji	0,06	0,01	-
Total	808,92	591,74	1.545,66

Sumber: Sintesa 2024 (diolah)

Meskipun pagu anggaran meningkat secara nominal dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran Kementerian Perhubungan masih relatif kecil, berkisar antara 4,02 persen hingga 8,44 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkait Infrastruktur Konektivitas di Provinsi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan sarana dan prasarana simpul konektivitas strategis seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan masih memerlukan dukungan lebih lanjut di Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas konektivitas transportasi antar daerah.

Adapun anggaran yang ada terutama digunakan untuk peningkatan dan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Air Sebakul Bengkulu yang merupakan Prioritas Nasional, dukungan untuk peningkatan Terminal Penumpang Tipe A, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan, dan rehabilitasi pelabuhan sungai.

Secara keseluruhan, data belanja pemerintah pusat terkait infrastruktur konektivitas fisik pada 2021 s.d. 2023 mengindikasikan bahwa pemerintah pusat semakin fokus pada pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi darat di Lampung, yang

diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi ini. Namun, perhatian terhadap sektor transportasi laut masih terbatas, terlihat dari alokasi anggaran yang relatif kecil dan fluktuatif untuk berbagai pelabuhan di Lampung.

Grafik 4.3. BPP Infrastruktur Konektivitas per Kategori tahun 2023 (Rp miliar)



Sumber: Sintesa 2024 (diolah)

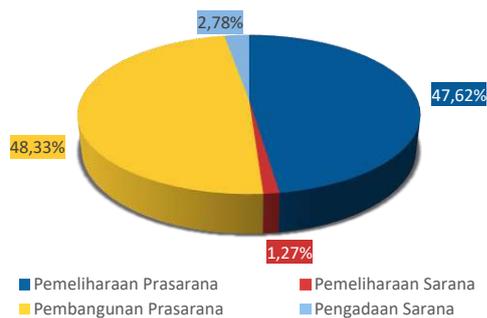
Dukungan belanja pemerintah pusat untuk sektor pelabuhan di Provinsi Lampung, meskipun relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan infrastruktur maritim. Pada tahun 2023, beberapa unit penyelenggara pelabuhan menerima alokasi anggaran yang meningkat, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Panjang yang menerima Rp0,74 miliar, serta Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Maringgai dengan Rp0,36 miliar. Alokasi ini sebagian besar digunakan untuk rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pelabuhan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan maritim.

Meskipun demikian, realisasi anggaran untuk pelabuhan seperti Bakauheni, Kota Agung, Menggala, dan Mesuji masih terbatas, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dukungan terhadap infrastruktur pelabuhan guna memastikan konektivitas maritim yang lebih baik di Provinsi Lampung.

Selain itu, dari struktur anggaran dan belanja pemerintah pusat terkait dukungan infrastruktur konektivitas di Lampung, terlihat bahwa belanja hanya difokuskan pada dua aspek utama: konektivitas darat dan laut. Tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran yang terdedikasi untuk infrastruktur konektivitas udara di Provinsi Lampung.



Grafik 4.4. Porsi Kontribusi Belanja Kerangka Infrastruktur Fisik berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2023



Sumber: Sintesa, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, Belanja Pemerintah Pusat terkait dengan Infrastruktur Konektivitas Fisik menunjukkan komposisi yang terfokus pada beberapa jenis pekerjaan yang mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan keselamatan infrastruktur transportasi.

Sebagian besar anggaran, yaitu sebesar 47,62 persen, dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana infrastruktur tetap, termasuk layanan operasional harian, perawatan rutin, penggantian suku cadang, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi optimal jalan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur transportasi lainnya.

Sementara itu, sekitar 48,33 persen dari belanja tersebut digunakan untuk pembangunan dan perluasan bangunan penunjang angkutan darat, laut, dan udara. Ini termasuk investasi dalam pemeliharaan pelabuhan, bandara, pelebaran jalan, dan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi.

Sisa anggaran sebesar 4,05 persen dialokasikan untuk pengadaan peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berperan sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan di berbagai sektor transportasi. Hal ini mencakup investasi dalam sistem lalu lintas, penyeberangan, dan peningkatan keterpaduan sistem antar moda transportasi guna meningkatkan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara.

Jalan Nasional yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR di Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai panjang sekitar 1.298,41 km. Dengan realisasi anggaran Kementerian PUPR terkait Jalan pada tahun tersebut mencapai

Rp1.483,57 miliar, terlihat upaya yang signifikan dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Lampung. Anggaran tersebut berhasil mengakomodasi pemeliharaan dan pembangunan Jalan Nasional sepanjang sekitar 1.448,89 km, yang mencakup penanganan *blackspot*, pengembangan trotoar, dan perbaikan drainase untuk peningkatan keselamatan jalan. Kondisi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat dalam memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung pertumbuhan dan mobilitas ekonomi di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi risiko kecelakaan, dan mempercepat arus transportasi barang dan manusia di wilayah tersebut, berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kemajuan regional.

4.2.2. Belanja Pemerintah Daerah Pendukung Infrastruktur Konektivitas di Lampung

Terkait dengan Belanja Pemerintah Daerah yang mendukung Infrastruktur Konektivitas, Kanwil DJPb Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk melihat kapasitas sumber daya riil yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi untuk memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sebagai pendukung konektivitas utama untuk perekonomian domestik Lampung.

Perkembangan pagu dan realisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 4.5. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Lampung 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)



Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, 2024

Secara keseluruhan, selama tiga tahun terakhir, total belanja Dinas Bina Marga dan Konstruksi memiliki pagu anggaran mencapai Rp2.295,58



miliar dengan realisasi sebesar Rp1.971,47 miliar. Hal ini menggarisbawahi juga komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Lampung.

Data juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan realisasi belanja infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pagu anggaran sebesar Rp461,37 miliar dengan realisasi Rp420,41 miliar atau 91,12 persen. Pada tahun 2022, pagu anggaran naik menjadi Rp709,18 miliar dengan realisasi Rp653,26 miliar atau 92,11 persen, menunjukkan pertumbuhan realisasi sebesar 50,47 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, pagu anggaran melonjak hingga Rp1.125,03 miliar dengan realisasi Rp897,81 miliar atau 79,80 persen, dengan kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 34,48 persen.

Selama tiga tahun terakhir, Program Penyelenggaraan Jalan merupakan berfokus utamanya pada pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur konektivitas darat (Jalan dan Jembatan) di Provinsi Lampung dengan porsi sebesar 88,40 persen s.d. 93,96 persen dari total seluruh realisasi belanja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Infrastruktur Konektivitas Darat APBD Provinsi Lampung 2021 s.d. 2023 per Program (Rp miliar)

Program	2021	2022	2023
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0,90	2,36	3,89
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	47,86	50,78	52,75
Program Penyelenggaraan Jalan	371,65	600,12	841,17
Total	420,41	653,26	897,81

Kegiatan yang dilakukan terkait pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan. Terkait infrastruktur Jalan dilakukan melalui Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan sepanjang 600,45 km; Rekonstruksi dan/atau Pembangunan Jalan sepanjang 70,18 km; Pelebaran Jalan Menuju Standar dan/atau Menambah Jalur sepanjang 3,39 km; serta Rehabilitasi Jalan sepanjang 37,56 km. Terkait dengan infrastruktur Jembatan, mencakup

Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 8.698,26 meter; Rehabilitasi Jembatan sepanjang 555,94 meter; Pembangunan Jembatan sepanjang 10,50 meter; Penggantian Jembatan sepanjang 27,20 meter; Pemeliharaan Berkala Jembatan sepanjang 608,40 meter.

Selain itu, terdapat dua program lainnya yang dilaksanakan. Pertama, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, yang mencakup pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi, serta operasional layanan informasi jasa konstruksi. Kedua, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana mencakup urusan administrasi.

Dengan demikian, pada tahun 2023, realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi sebesar Rp897,81 miliar hanya mampu mengakomodasi pemeliharaan dan pembangunan jalan Provinsi Lampung sepanjang sekitar 641 km, sedangkan total jalan yang menjadi bagian kewenangan Provinsi adalah sepanjang total 1.695,48 km. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk mencakup seluruh jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi Lampung. Keterbatasan dana tersebut dapat berpotensi menghambat upaya pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur jalan yang diperlukan untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di wilayah Lampung, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap alokasi anggaran dan strategi pengelolaan sumber daya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan Provinsi Lampung.

4.3. ANALISIS ATAS CAPAIAN INDIKATOR INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

Pembangunan infrastruktur konektivitas adalah salah satu prioritas utama dalam strategi meningkatkan perekonomian di berbagai wilayah, termasuk di Lampung. Infrastruktur yang memadai bukan hanya menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk



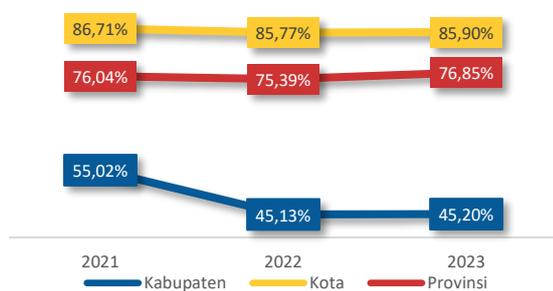
mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur konektivitas terhadap tujuan tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap beberapa indikator kunci.

Beberapa indikator alternatif yang digunakan dalam analisis ini mencakup: Indeks Kestabilan Jalan, Kestabilan Jembatan, Panjang Dermaga Khusus Navigasi, Frekuensi Penerbangan, serta Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Analisis terhadap indikator-indikator ini memungkinkan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas pembangunan infrastruktur konektivitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Lampung.

4.3.1. Capaian Pembangunan Konektivitas Darat di Provinsi Lampung

Indeks Kemantapan Jalan, sebagai indikator utama dalam mengukur kualitas dan kuantitas jaringan jalan di regional Lampung, menjadi penting dalam pemetaan efisiensi transportasi dan pertumbuhan ekonomi. Jalan yang kokoh dan berkualitas tinggi bukan hanya memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menurunkan biaya logistik dan mengoptimalkan waktu tempuh. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pembangunan jalan tidak hanya memperhatikan peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Investasi dalam jalan yang kokoh dapat meningkatkan daya tarik investasi regional dan memperkuat daya saing wilayah.

Grafik 4.6. Perkembangan Indeks Kemantapan Jalan 2021 s.d. 2023



Sumber: Kementerian PUPR, 2024 (diolah)

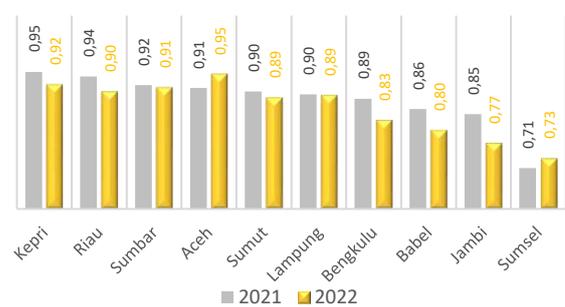
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diolah menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indeks Kemantapan Jalan di Provinsi Lampung menunjukkan angka 76,85 persen untuk jalan Provinsi, 85,90 persen untuk jalan Kota, dan 45,20

persen untuk jalan Kabupaten. Meskipun demikian, tren dalam tiga tahun terakhir menunjukkan sedikit perubahan yang signifikan dalam Indeks Kemantapan Jalan.

Dalam menghadapi tantangan ini, perhatian khusus penting untuk diberikan terhadap kondisi jalan Kabupaten. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembiayaan infrastruktur yang mendukung untuk meningkatkan kualitas jalan di tingkat kabupaten. Investasi yang terarah dan tepat dalam pembangunan jalan kabupaten tidak hanya akan memperbaiki kondisi infrastruktur, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan juga memegang peranan penting dalam menjaga konektivitas wilayah. Indikator Kemantapan Jembatan menjadi alat untuk mengukur kualitas dan ketahanan jembatan yang menghubungkan berbagai bagian di regional Lampung. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang efektif harus memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan jembatan secara berkala guna mencegah kerusakan yang dapat mengganggu kelancaran arus transportasi. Jembatan yang kokoh dan terawat dengan baik tidak hanya mendukung konektivitas antar wilayah, tetapi juga berperan dalam pengembangan daerah terpencil serta memfasilitasi distribusi barang dan jasa secara lebih efisien.

Grafik 4.7. Perkembangan Indeks Kemantapan Jembatan se-Sumatera 2021 s.d. 2023



Sumber: Kementerian PUPR, 2023 (diolah)

Pada tahun 2022, Indeks Kemantapan Jembatan di regional Lampung mencapai 89 persen, menurun sebesar 0,01 persen (yoy) dari nilai pada tahun 2021. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia jembatan, intensitas penggunaan, serta kurangnya optimalitas dalam



pemeliharaan. Namun, perlu dicatat bahwa kondisi infrastruktur jembatan dalam dua tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, menyoroiti kebutuhan akan strategi pemeliharaan yang lebih proaktif dan efisien.

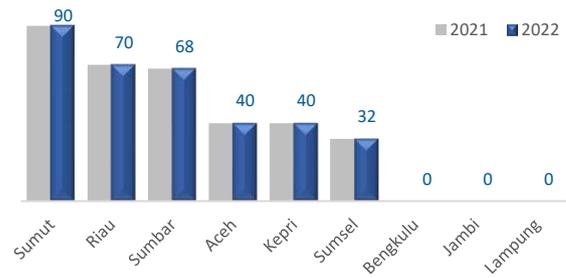
Dibandingkan dengan regional Sumatera, nilai kemantapan jembatan di Lampung (sebesar 89 persen) serta jumlah jembatan nasional yang mencapai 435 unit, berada pada level moderat. Guna meningkatkan kemantapan jembatan dan memperkuat konektivitas wilayah, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dalam pengembangan infrastruktur. Ini melibatkan strategi tata ruang yang terintegrasi, alokasi sumber daya yang bijaksana, serta upaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, infrastruktur jembatan di Lampung dapat menjadi lebih kokoh, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

4.3.2. Capaian Pembangunan Konektivitas Laut di Provinsi Lampung

Dermaga khusus kenavigasian merupakan elemen kunci dalam infrastruktur konektivitas maritim. Panjang Dermaga Khusus Kenavigasian menjadi indikator penting menilai kapasitas pelabuhan dalam menangani arus kapal dan barang. Pelabuhan yang memadai tidak hanya meningkatkan perdagangan regional dan internasional, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri perikanan dan membuka akses pasar baru bagi produk lokal. Oleh karena itu, kebijakan publik harus secara proaktif mendukung pengembangan pelabuhan melalui investasi yang tepat serta regulasi yang memfasilitasi proses ekspor dan impor.

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022, Panjang Dermaga Khusus Kenavigasian di Lampung masih mencapai 0 meter dari total 340 meter yang ada di regional Sumatera. Kondisi ini menyoroiti keterbatasan yang masih ada dalam memastikan keselamatan dan efisiensi kenavigasian, serta dalam mendukung distribusi barang dan pelayaran domestik maupun internasional. Tanpa keberadaan dermaga khusus kenavigasian, Lampung menghadapi kendala dalam menangani aspek keselamatan kapal tertentu dan aktivitas kenavigasian yang lebih spesifik.

Grafik 4.8. Panjang Dermaga Khusus Kenavigasian di Regional Sumatera 2021-2022



Sumber: Kementerian Perhubungan, 2023 (diolah)

Dengan ketiadaan dermaga kenavigasian tersebut, Lampung juga mungkin masih memiliki keterbatasan armada kapal negara kenavigasian pemerintah yang didedikasikan untuk mendukung kegiatan kenavigasian, seperti pengawasan pergerakan di laut, keselamatan pelayaran, dan respon cepat dalam situasi darurat di perairan.

Untuk meningkatkan konektivitas laut dan mengatasi tantangan yang dihadapi, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan yang memadai serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengawasan di laut. Dengan langkah-langkah strategis ini, Lampung dapat meningkatkan peranannya sebagai pusat logistik dan perdagangan maritim yang vital dalam perekonomian nasional.

4.3.3. Capaian Pembangunan Konektivitas Udara di Provinsi Lampung

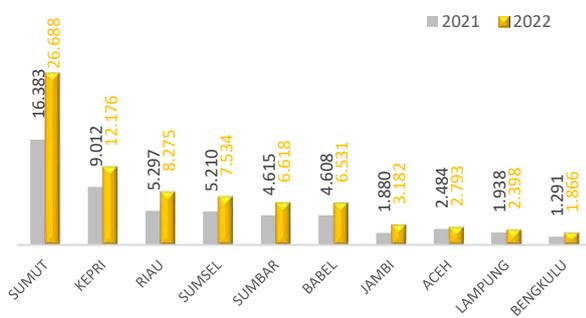
Indikator Keberangkatan Pesawat menjadi cerminan frekuensi dan keterjangkauan akses transportasi udara dari dan ke regional Lampung. Ketersediaan transportasi udara yang efisien dan terjangkau merupakan pendorong penting bagi mobilitas manusia dan barang, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa bandar udara di Lampung dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan dikelola secara efektif guna menarik lebih banyak penerbangan dan wisatawan. Selain itu, pemberian subsidi atau insentif kepada maskapai penerbangan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan jumlah penerbangan.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, jumlah keberangkatan pesawat



di Lampung masih menempati peringkat kedua terbawah di regional Sumatera. Pada tahun 2022, jumlah penerbangan ke Lampung hanya sepertiga dari jumlah penerbangan ke Sumatera Selatan. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam infrastruktur bandara, konektivitas, dan aksesibilitas dalam hal jaringan penerbangan domestik maupun internasional. Selain itu, permintaan pasar yang rendah mungkin juga dipengaruhi oleh faktor bisnis/pariwisata yang belum berkembang atau pemilihan kapal ferry sebagai moda transportasi utama yang lebih dipilih oleh masyarakat.

Grafik 4.9. Jumlah Keberangkatan Pesawat di Regional Sumatera 2021-2022



Sumber: Kementerian PUPR, 2024 (diolah)

Untuk meningkatkan konektivitas udara dan mengatasi tantangan yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait. Investasi dalam infrastruktur bandara yang memadai, perbaikan konektivitas udara, dan promosi pariwisata yang agresif dapat menjadi kunci dalam meningkatkan jumlah penerbangan dan memperluas pasar udara Lampung. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Lampung dapat mengoptimalkan potensi sektor udara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang signifikan dalam skala regional maupun nasional.

4.3.4. Capaian Pembangunan Konektivitas TIK di Provinsi Lampung

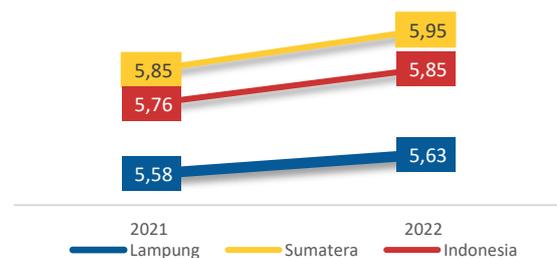
Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) meliputi akses dan kualitas layanan internet, penetrasi perangkat teknologi, serta literasi digital masyarakat. Di era digital ini, infrastruktur TIK yang solid menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi bisnis, mendukung inovasi,

dan memperluas akses pendidikan serta layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mengutamakan peningkatan akses internet ke daerah-daerah terpencil di Lampung, sekaligus mendukung program pelatihan teknologi bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan digital mereka.

Dengan infrastruktur TIK yang kuat, bisnis dapat meningkatkan produktivitas mereka melalui pemanfaatan teknologi untuk mengelola data, memperluas jangkauan pasar melalui platform digital, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, infrastruktur yang baik juga mendukung inovasi, memungkinkan para pengusaha dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi-solusi baru yang didukung oleh teknologi.

Tidak hanya untuk kepentingan bisnis, infrastruktur TIK yang kuat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan adanya akses internet yang luas, pendidikan jarak jauh dan layanan kesehatan online dapat menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkecil kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Grafik 4.10. Indeks Pembangunan Konektivitas TIK di Regional Sumatera 2021-2022



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Provinsi Lampung, yang kaya akan potensi, masih mengejar ketertinggalan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Meskipun masih berada dalam kategori sedang dalam indeks TIK selama dua tahun terakhir, peningkatan skor secara perlahan menunjukkan semangat untuk kemajuan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2023, Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Lampung pada tahun

2022 mencapai angka 5,51, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (5,47). Meskipun belum mencapai rata-rata nasional (5,85) maupun regional Sumatera (6,02), peningkatan nilai IP-TIK Lampung merupakan langkah yang positif.

Ada beberapa aspek positif yang patut disoroti, seperti peningkatan moderat pada subindeks penggunaan TIK sebesar 0,19 poin. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan internet dan menjadi pelanggan broadband.

Namun, dalam konteks konektivitas, yang penting untuk diperhatikan adalah terdapat penurunan pada subindeks akses dan infrastruktur sebesar -0,04 basis poin (yoy) pada periode 2021-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan TIK dari segi akses dan ketersediaan infrastruktur belum membaik, khususnya terkait hal bandwidth internet dan akses terhadap komputer.

Selain itu, subindeks keahlian TIK juga mengalami penurunan sebesar -0,04 basis poin (yoy), menunjukkan bahwa jumlah SDM yang menerima kualitas pendidikan TIK memadai melalui institusi pendidikan formal masih cukup terbatas, terutama di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Provinsi Lampung perlu meningkatkan investasi dan upaya dalam meningkatkan akses, infrastruktur, dan keahlian TIK. Dengan demikian, provinsi ini dapat terus maju dan meraih potensi penuhnya dalam era digital yang semakin berkembang utamanya dalam mendukung sektor basis pertanian dan industri pengolahan di Provinsi Lampung.

Gambar 4.1. Peta Cakupan Jaringan Telkomsel di Regional Lampung



Sumber : nPerf.com, 2023; Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023.

Pada tahun 2023 level penetrasi Internet di Provinsi Lampung adalah sebesar 75,86 persen. Selanjutnya

pada tahun 2024, Provinsi Lampung telah menunjukkan peningkatan dalam aspek infrastruktur sinyal komunikasi. Meskipun masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, upaya untuk meningkatkan cakupan dan kestabilan sinyal telah dilakukan. Diharapkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan dalam level penetrasi internet di Lampung.

Dalam hal elektrifikasi, Lampung terus mempertahankan performa yang baik dengan rasio elektrifikasi yang mendekati sempurna. Berdasarkan data BPS, rasio elektrifikasi di Lampung telah mencapai 99,97 persen pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Lampung.

Dengan adanya dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menargetkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang rampung pada tahun 2024, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas dan cakupan sinyal komunikasi di Lampung, termasuk di daerah pedesaan. Provinsi Lampung terus bergerak menuju peningkatan infrastruktur sinyal komunikasi yang lebih merata dan elektrifikasi yang hampir universal. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan, diharapkan kedua aspek ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

4.4. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS.

Analisis atas efektivitas belanja pembangunan infrastruktur konektivitas memiliki beberapa kepentingan yang sangat relevan dalam konteks pembangunan wilayah dan ekonomi.

Pertama-tama, analisis tersebut memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya yang telah diinvestasikan memberikan hasil yang diharapkan. Ini membantu mengidentifikasi keberhasilan,

kelemahan, dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.

Kedua, analisis ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi anggaran di masa depan, dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak yang lebih besar dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Selain itu, analisis efektivitas belanja juga penting dalam membangun akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memahami secara mendalam dampak dari investasi infrastruktur konektivitas, pemerintah dapat mengarahkan upaya mereka untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jalan di Provinsi Lampung memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Kemantapan Jalan di Provinsi Lampung dengan periode data tahun 2021 s.d. 2023. Hubungan tren Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jembatan juga selaras dengan arah tren Kemantapan Jembatan pada 2021 s.d. 2022. Sedangkan, Belanja Infrastruktur Konektivitas TIK, Laut, dan Udara masih perlu dukungan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4.4.1. Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Infrastruktur Konektivitas Darat

Analisis statistik inferensial telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak Belanja Pemerintah Pusat pada cluster Kerangka Investasi Fisik spesifik Jalan (BJ) terhadap Indeks Kemantapan Jalan (IJ) di Provinsi Lampung selama periode 2021 hingga 2023. Model regresi didapatkan melalui tahapan dan hasil sebagai berikut.

Validasi Model – Uji Asumsi Klasik

Diperlukan proses untuk memastikan bahwa model statistik yang digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan asumsi yang diperlukan. Nilai p dari uji Shapiro Wilk adalah 0,749 yang menunjukkan bahwa diasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal atau kesalahan residual dari model regresi linear terdistribusi secara normal.

Nilai p uji White adalah 1 ($F=0$) yang berarti bahwa varians homogen atau tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya, semua nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 2,5, sehingga tidak ditemukan adanya multikolinearitas yang ditunjukkan dengan interkorelasi antara prediktor (X_i).

Penentuan tingkat signifikansi yaitu p-value $< 0,10$ dikarenakan ukuran dari sampel yang sangat terbatas, semakin kecil tingkat signifikansi maka semakin besar data yang diperlukan. Sebaliknya, semakin besar signifikansi maka data yang diperlukan semakin kecil.

Linear Regression

Metode *backward stepwise method* digunakan untuk melakukan penyaringan awal terhadap prediktor. Ditemukan hasil regresi linier berganda sebagai berikut.

Tabel 4.3. Analisis of Variance (ANOVA) Hubungan Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jalan dengan Indeks Kemantapan Jalan 2021-2023 Provinsi Lampung

Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic	P-Value
Regression (between \hat{y}_i and \hat{y})	1	1.044511	1.044511	40.872515	0.0987779
Residual (between \hat{y}_i and \hat{y})	1	0.0255553	0.0255553		
Total (between \hat{y}_i and \hat{y})	2	1.070067	0.535033		

Sumber: BPS, Kementerian PUPR, 2023 (diolah)

Hubungan Antar Variabel

R square (R^2) sebesar 0.976118, yang berarti bahwa prediktor (X) menjelaskan 97.6 persen dari variasi dalam IJ. Dengan kata lain, model cukup baik dalam menjelaskan variabilitas data respon (Y). Adjusted R square sebesar 0.952236: Adjusted R^2 ini memperhitungkan jumlah prediktor dalam model, menunjukkan bahwa 95.2 persen dari variasi dalam IJ dijelaskan oleh model, setelah menyesuaikan untuk jumlah prediktor yang digunakan. Koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.987987, yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara data yang diprediksi (\hat{y}) dan data yang diamati (y).

Goodness of Fit

Regresi keseluruhan menunjukkan bahwa Uji F satu ekor kanan (right-tailed), $F(1,1) = 40.872515$, p-value = 0.0987779. Karena p-value $< \alpha$ (0.10), maka menolak H_0 . Ini berarti model regresi linier, $Y = b_0 +$

$b1X + \epsilon$, memberikan kecocokan yang lebih baik daripada model tanpa variabel independen, $Y = b0 + \epsilon$. Dengan kata lain, setidaknya ada satu variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi Y.

Semua variabel independen (X_i) signifikan, dimana menunjukkan bahwa setiap prediktor yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon (Y).

Artinya, Belanja Pemerintah Pusat terkait Kerangka Investasi Fisik spesifik Jalan (BJ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan Indeks Kemantapan Jalan (IJ) di Provinsi Lampung selama periode 2021 hingga 2023.

Model Akhir

$$IJ = 37,4001 + 1,4152BJ$$

Keterangan:

IJ = Indeks Kemantapan Jalan

BJ = Belanja Pemerintah Pusat cluster Kerangka Investasi Fisik yang spesifik mendukung Jalan

Dalam model ini, IJ adalah Indeks Kemantapan Jalan dan BJ adalah Belanja Pemerintah Pusat pada cluster Kerangka Investasi Fisik yang mendukung Jalan. Interpretasi model ini adalah sebagai berikut: setiap peningkatan Rp1 miliar dalam belanja pemerintah yang terkait dengan infrastruktur jalan, dapat berkontribusi pada peningkatan sebesar 1,41 persen pada Kondisi Kemantapan Jalan.

Interpretasi model ini mengindikasikan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur jalan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kemantapan jalan di Provinsi Lampung. Dengan meningkatnya kemantapan jalan, diharapkan akan terjadi peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk terus meningkatkan alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Dengan memperhatikan hasil analisis bahwa belanja pemerintah berkontribusi secara signifikan terhadap kemantapan jalan, peningkatan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan akan

menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konektivitas wilayah.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan strategi pemeliharaan yang efisien dan efektif untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan tetap dalam kondisi yang baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Upaya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat lokal, juga penting untuk mengoptimalkan efektivitas dan dampak positif dari pembangunan infrastruktur konektivitas.

Grafik 4.11. Hubungan Belanja Jalan dan Kemantapan Jalan Provinsi Lampung 2021-2023



Sumber: DJPb dan Kementerian PUPR, 2023 (diolah)

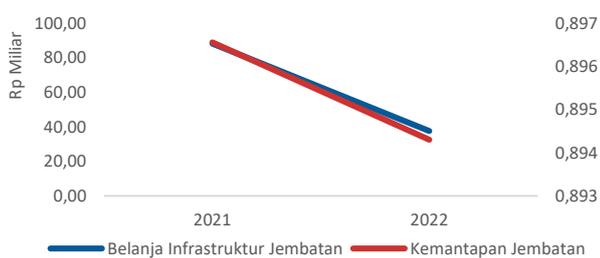
Apabila dilihat secara tren, Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jalan sesuai dengan perkembangan Indeks Kemantapan Jalan Provinsi Lampung periode 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang nyata terhadap kemantapan jalan di wilayah tersebut. Dengan meningkatnya belanja pemerintah pada infrastruktur jalan, terlihat adanya peningkatan yang sejalan dengan kemajuan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan di Provinsi Lampung. Ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang proaktif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbeda dengan analisis hubungan antara belanja pemerintah dan kemantapan jalan, hubungan antara Belanja Kerangka Investasi Fisik terhadap beberapa indikator lain seperti Indeks Kemantapan Jembatan, Indeks Pembangunan TIK, Pelabuhan, dan Keberangkatan Penerbangan tidak dapat

dijelaskan melalui analisis statistik inferensial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia, yang mengakibatkan model regresi yang dihasilkan tidak memiliki keandalan yang memadai untuk digunakan dalam interpretasi yang akurat, yang pada akhirnya dapat menyesatkan hasilnya.

Untuk melanjutkan diskusi, pendekatan analisis yang lebih sederhana akan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara belanja pemerintah pusat terkait infrastruktur konektivitas dengan pencapaian indikator pembangunan infrastruktur konektivitas lainnya.

Grafik 4.12. Hubungan Belanja Jembatan dan Kemantapan Jembatan Provinsi Lampung 2021-2023



Sumber: DJPb dan Kementerian PUPR, 2023 (diolah)

Arah tren Belanja Pemerintah Pusat Terkait Jembatan selaras dengan arah tren Kemantapan Jembatan, pada periode 2021 hingga 2022. Hal ini menyiratkan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan jembatan sejalan dengan upaya meningkatkan kemantapan jembatan itu sendiri. Dengan adanya konsistensi antara peningkatan belanja pemerintah dan peningkatan kemantapan jembatan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kesadaran akan pentingnya infrastruktur jembatan yang kokoh dan berkelanjutan dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan efisiensi infrastruktur jembatan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan infrastruktur nasional.

4.4.2. Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Infrastruktur Konektivitas Laut dan Udara

Analisis perbandingan alokasi belanja per bidang konektivitas menyoroti kesenjangan yang cukup mencolok antara dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur

jalan dan jembatan dengan investasi pada infrastruktur pelabuhan dan bandar udara di Provinsi Lampung. Proporsi belanja yang lebih besar terfokus pada pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan menunjukkan prioritas yang dominan dalam strategi pembangunan infrastruktur konektivitas. Namun, sektor pelabuhan dan bandar udara masih belum mendapatkan perhatian yang seimbang, meskipun memiliki potensi strategis yang besar dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.

Grafik 4.13. Perbandingan Belanja Per Kategori Konektivitas di Lampung 2021-2023



Sumber: DJPb, Kementerian PUPR, dan BPS, 2023 (diolah)

Ketidakseimbangan ini semakin mencolok saat melihat kondisi infrastruktur pelabuhan dan penerbangan di Provinsi Lampung yang masih terbatas, terutama bila dibandingkan dengan standar yang diterapkan di wilayah sekitarnya. Keterbatasan ini menciptakan hambatan nyata dalam optimalisasi potensi konektivitas dan mobilitas barang dan orang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, keterbatasan ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi serta pengembangan wilayah secara keseluruhan, terutama dalam menarik investasi dan memfasilitasi perdagangan regional dan internasional.

Situasi ini menegaskan sebuah tantangan yang perlu diatasi agar Provinsi Lampung dapat meningkatkan daya saingnya, baik di tingkat nasional maupun regional. Penting untuk menangani ketidakseimbangan ini dengan mengalokasikan sumber daya yang lebih proporsional dan efisien, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperkuat infrastruktur pelabuhan dan bandar udara. Dengan demikian, Provinsi Lampung dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan



ekonomi dan pengembangan wilayah yang berdaya saing tinggi.

4.4.3. Tantangan Fiskal Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Lampung

Dalam upaya memahami kondisi terkini serta mengidentifikasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung telah melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait. Hasil wawancara ini mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek mendatang. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang teridentifikasi:

1. Keterbatasan Anggaran Daerah Untuk Pengembangan Infrastruktur Konektivitas

Provinsi Lampung, termasuk pemerintah kota dan kabupaten di dalamnya, menghadapi kendala keterbatasan anggaran yang signifikan. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memelihara apalagi meningkatkan kualitas dan cakupan jalan serta jembatan. Anggaran pemeliharaan jalan hanya mampu mencakup sebagian kecil dari total jaringan jalan yang ada. Kondisi ini mengakibatkan infrastruktur yang ada sulit untuk dipertahankan dalam kondisi optimal dan sering kali tidak memenuhi standar pelayanan yang diharapkan masyarakat.

2. Kompleksitas Pelaksanaan Kewenangan Jalan

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Provinsi Lampung harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan, baik itu provinsi, kota, maupun kabupaten. Kompleksitas ini sering kali menyebabkan kurangnya fleksibilitas dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek. Proyek perbaikan jalan provinsi yang melintasi beberapa kabupaten terkadang sulit untuk terkoneksi dengan tindak lanjut jalan pendukungnya di daerah, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek. Ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah juga memperparah masalah ini, di mana beberapa

daerah memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk mengelola infrastruktur yang ada, sehingga tidak mampu meneruskan proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya terkoneksi.

3. Time Lag Penganggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur

Masalah lain adalah jeda waktu (*time lag*) dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran. Utamanya, Pembahasan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2024 yang dilaksanakan saat tahun anggaran sudah berjalan, sehingga tidak bisa langsung masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas pelaksana teknis pada awal tahun anggaran. Akibatnya, pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan sumber anggaran dimaksud baru dapat dimulai pada pertengahan atau akhir tahun, yang mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Pekerjaan pemeliharaan atau pembangunan infrastruktur yang mendekati hingga akhir tahun anggaran, meningkatkan risiko pengerjaan yang terburu-buru dan kurang optimal.

4. Biaya Tinggi pada Proyek Skala Kecil

Pelaksanaan proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan membutuhkan anggaran besar, terutama untuk biaya sewa alat dan transportasi. Proyek skala kecil sering kali tidak efisien dari segi biaya karena porsi anggaran yang besar dihabiskan untuk biaya tetap (*fixed cost*) seperti sewa alat berat dan transportasi bahan baku. Banyak paket proyek pembangunan jalan di Provinsi dan Kota/Kabupaten menggunakan anggaran terbatas (<200 juta), sehingga biaya sewa alat berat menghabiskan sebagian besar anggaran, dan jumlah jalan yang dapat dibangun atau dipelihara menjadi sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan output dan outcome proyek menjadi tidak optimal, mengurangi *opportunity cost* atas jumlah dan kualitas jalan yang dapat diakses oleh masyarakat.

5. Kerusakan Jalan/Jembatan Akses akibat Penggunaan Alat Berat

Penggunaan alat berat dalam proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan sering kali menyebabkan kerusakan pada jalan akses yang digunakan untuk mengangkut alat berat tersebut. Jalan yang telah





dipelihara sebelumnya bisa kembali rusak akibat beban tonase alat berat, menciptakan siklus perbaikan yang tidak pernah berakhir dan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Alat berat yang digunakan untuk pembangunan jalan utama menyebabkan kerusakan pada jalan akses yang telah dipelihara sebelumnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan ini, diharapkan Pemerintah Pusat maupun Daerah di Regional Lampung dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur konektivitas. Upaya sinergi antar tingkat pemerintahan dan alokasi anggaran yang tepat serta pengelolaan proyek yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Lampung.

6. Keterbatasan Anggaran Pusat maupun Daerah Yang Mendukung Pengembangan Konektivitas Laut dan Udara

Anggaran untuk konektivitas laut dan udara sepertinya belum mendapatkan fokus alokasi anggaran selama tiga tahun terakhir di Provinsi Lampung, baik melalui APBN dan APBD. Hal ini sangat disayangkan karena konektivitas laut dan udara memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan.

Konektivitas laut, melalui pelabuhan dan pelayanan kapal, menjadi pintu gerbang utama bagi perdagangan dan industri maritim, serta menjadi sarana vital untuk distribusi barang dan transportasi penumpang. Sementara itu, konektivitas udara, melalui bandara dan layanan penerbangan, menjadi kunci dalam memfasilitasi mobilitas nasional dan internasional, serta mendukung sektor pariwisata dan investasi. Kurangnya fokus pada pengembangan konektivitas laut dan udara, berpotensi menghilangkan peluang untuk menurunkan daya saing Lampung dalam pasar global dan meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas dengan wilayah lain di Indonesia maupun negara-negara tetangga.

4.4.4. Rekomendasi Kebijakan Fiskal Pendukung Infrastruktur Konektivitas Lampung

Berdasarkan beberapa hasil temuan, diperlukan peningkatan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur di Provinsi Lampung. Berikut adalah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan: Penambahan Skema Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Diperlukan peningkatan dalam pengembangan skema pembangunan infrastruktur yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Salah satu contohnya melalui penerapan Program Inpres Jalan Daerah yang memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan infrastruktur.

1. Meminimalisir *Time Lag* dalam Perencanaan dan Pengalokasian Dana Transfer Ke Daerah. Penting untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengalokasian dana TKD, khususnya untuk bidang infrastruktur. Hal tersebut dapat dicoba dicapai melalui penerapan sistem perencanaan yang responsif dan *real-time*, serta pengaturan *timeline* pembahasan Rencana Pembahasan Kegiatan dan Penganggaran DBH Sawit yang lebih efisien sebelum tahun berjalan atau awal tahun anggaran.
2. Pengelolaan Beban Jalan Akses. Dibutuhkan strategi pengelolaan beban jalan akses yang efektif guna mengurangi kerusakan yang disebabkan alat berat selama proses konstruksi. Salah satu solusinya mempertimbangkan pembangunan jalan sementara atau penerapan metode transportasi yang lebih ringan agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap infrastruktur yang sudah ada.
3. Peningkatan Kualitas dan *Coverage* Infrastruktur Konektivitas. Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur konektivitas di Lampung, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dari APBN dan APBD secara sinergis. Melalui skema seperti Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional antara Pusat dan Daerah, dapat dilakukan perbaikan serta perluasan jaringan jalan utama yang menghubungkan kota dan kabupaten utama dengan daerah pedesaan. Anggaran juga dapat dialokasikan untuk proyek



perluasan akses menuju jalan tol dari Bandar Lampung ke daerah-daerah pinggiran, serta perbaikan jalan provinsi yang menjadi rute utama kendaraan angkutan barang.

4. Insentif Pajak untuk Perusahaan yang Berkontribusi pada Peningkatan Konektivitas Daerah. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dalam membangun konektivitas darat, laut, dan udara di sekitar wilayah operasinya. Insentif ini bertujuan mendorong investasi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara langsung.
5. Insentif Fiskal Dengan Tema Infrastruktur Konektivitas. Diperlukan insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang berhasil dalam proyek-proyek infrastruktur tahun sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan merangsang investasi sektor swasta dalam pembangunan jalan yang lebih luas dan berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan konektivitas dan ekonomi regional.
6. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Laut. Pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Lampung perlu menambah alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas tambahan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Kedua pelabuhan tersebut merupakan pintu gerbang utama masuk ke Provinsi Lampung dari Pulau Jawa, baik untuk mobilitas orang maupun barang. Diperlukan pengembangan dermaga, peningkatan kapasitas penyimpanan barang, serta modernisasi fasilitas pemuatan dan penurunan barang.
7. Insentif Pajak untuk Operator Pelabuhan Swasta. Selain penambahan infrastruktur, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada operator pelabuhan swasta yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak atau fasilitas pajak

lainnya, dengan syarat operator tersebut berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas logistik dan efisiensi operasional.

8. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Udara. Perhatian khusus dan penambahan anggaran substansial diperlukan untuk memperbaiki dan memodernisasi Bandara Radin Inten II di Lampung. Anggaran dari Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dialokasikan untuk memperpanjang landasan pacu, memperluas terminal penumpang, serta meningkatkan sistem navigasi dan keselamatan, sehingga memperbaiki konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada maskapai penerbangan yang membuka rute baru ke Lampung, seperti pembebasan pajak pendaratan atau diskon pajak bahan bakar pesawat.
10. Dalam hal infrastruktur konektivitas Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur penarik investasi jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh Lampung. Misalnya, anggaran digunakan untuk mengembangkan kelayakan kerangka infrastruktur *fiber optic* dan jaringan 5G, serta dukungan investor untuk membangun pusat data yang modern dan aman. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada penyedia layanan internet swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan jaringan internet di daerah-daerah terpencil di Lampung, seperti pembebasan pajak penghasilan atau insentif penurunan tarif pajak.

Dengan beberapa rekomendasi kebijakan fiskal ini, diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan infrastruktur konektivitas di Lampung, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih berkualitas.

“ Anda harus memberi lebih banyak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Berikan baik dalam bentuk pemikiran, kerja keras, prestasi, dan yang paling penting berikan hati anda hanya untuk Indonesia ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Outlook Makroekonomi Regional Lampung

1. Secara *year-on-year*, kinerja ekonomi Lampung triwulan I 2024 sebesar 3,30 persen (*yoy*), melemah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,94 persen (*yoy*). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Lampung pada periode tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% (*yoy*) dan pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,24% (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi Lampung yang positif ini didorong oleh sebagian besar sektor usaha, dengan sektor Administrasi Pemerintahan dan lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif didorong oleh semua komponen, terutama komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga keagamaan dan ormas selama bulan Ramadhan serta peningkatan aktivitas partai politik dalam masa kampanye Pemilu 2024.
2. Secara *quarter-to-quarter*, kinerja ekonomi Lampung triwulan I 2024 dibandingkan triwulan IV 2023 berkontraksi sebesar 1,24 persen (*qtq*), menguat dari capaian triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam yakni sebesar 3,99 persen (*qtq*). Capaian kinerja ekonomi Lampung triwulan I 2024 juga lebih berada di atas capaian ekonomi Sumatera yang berkontraksi 1,56 persen (*qtq*). Meskipun demikian, capaian perekonomian Lampung di bawah pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2024 yang berkontraksi 0,83 persen (*qtq*).
3. Struktur PDRB Lampung berdasarkan Lapangan Usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan distribusi sebesar 23,78 persen dari total PDRB ADHB, meskipun kontribusi sektor ini mengalami tren yang menurun. Struktur PDRB Lampung berdasarkan pengeluaran didominasi

oleh konsumsi Rumah Tangga dengan distribusi sebesar 65,64 persen dari total PDRB ADHB.

4. Pada triwulan I 2024, capaian inflasi Lampung tetap terjaga pada level sasaran $2,5 \pm 1$ persen (*yoy*). Pada Maret 2024, inflasi Lampung tercatat sebesar 3,45 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,05 persen (*yoy*). Sementara itu, secara bulanan, rata-rata inflasi pada triwulan I 2024 sebesar 0,19 persen (*mtm*), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 0,44 persen (*mtm*). Secara garis besar tekanan inflasi triwulan I 2024 didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya komoditas beras. Produksi beras berkurang akibat dampak *climate change* di tahun 2023 sehingga terjadi pergeseran masa tanam dan diperkirakan puncak panen bulan April dan Mei.
5. Meskipun terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, impor bahan baku dan penolong serta barang konsumsi tetap mengalami peningkatan. Kenaikan impor bahan baku dan penolong menandakan masih terdapat dorongan dalam sektor industri dan investasi di Lampung. Kemudian peningkatan impor barang konsumsi di tengah terdepresiasi nilai tukar rupiah mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Lampung masih baik.
6. Pada Februari 2024, TPAK di Provinsi Lampung mencapai 71,51 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK nasional yang tercatat sebesar 69,80 persen dan rata-rata TPAK di wilayah Sumatera yang mencapai 68,77 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi lapangan pekerjaan, dengan mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Komposisi tenaga kerja di Lampung didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Struktur pekerja di Lampung didominasi oleh pekerja informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 turun menjadi 4,12 persen dibandingkan Februari 2023 yang tercatat sebesar 4,18 persen, menunjukkan

pemulihan dari pandemi yang masih berlanjut. Capaian TPT Lampung lebih baik dibandingkan dengan capaian TPT nasional dan rata-rata TPT di regional Sumatera.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menunjukkan tren yang positif meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada triwulan I 2024, rata-rata NTP di Provinsi Lampung sebesar 120,58 dimana lebih tinggi dibandingkan dengan capaian NTP nasional yang sebesar 119,54. Namun demikian NTP Lampung masih berada di bawah rata-rata NTP wilayah regional Sumatera yang sebesar 129,63. Adapun upaya besar Pemerintah Provinsi Lampung telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara lain subsidi benih, akses permodalan KUR bidang pertanian melalui e-KPB, Asuransi Usaha Tani Padi, akses Kartu Petani Berjaya (KPB), dan berbagai dukungan lainnya.
8. Pada triwulan I 2024, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata tercatat sebesar 110,24, berada diatas rata-rata NTN nasional dan regional Sumatera. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mendorong implementasi program kegiatan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah penetapan lima Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan satu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pulau Pasaran.

5.1.2. Kinerja Fiskal Regional Lampung

5.1.2.1. Kinerja APBN

1. Sampai triwulan I 2024, Pendapatan Negara terealisasi Rp2,15 triliun atau 19,24 persen target. Secara kumulatif, pendapatan negara berkontraksi sebesar 4,73 persen (yoy) utamanya disebabkan penurunan Bea Keluar dan PPN dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi PNBPN menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar

39,51 persen (yoy), mencapai Rp0,43 triliun atau 42,62% dari target.

2. Penerimaan perpajakan pemerintah pusat regional Lampung secara agregat tumbuh negatif 11,77 persen (yoy) atau mencapai sebesar Rp1,71 triliun, didominasi oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri. Namun, sebagian besar komponen penerimaan Perpajakan Dalam Negeri mengalami pertumbuhan, terutama Pajak Penghasilan sebagai kontributor utama Pajak Dalam Negeri yang tumbuh 3,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga solid. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tumbuh negatif sebesar 48,35 persen (yoy). Capaian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai 13,43 persen dari target atau Rp177,47 miliar. Penerimaan Bea Masuk tumbuh 14,28 persen (yoy) dengan adanya kenaikan importasi beras. Penerimaan Bea Keluar turun tajam sebesar 77,20 persen (yoy), dipicu moderasi harga referensi CPO beserta turunannya di pasar global. Penerimaan Cukai meningkat sangat signifikan, mencapai pertumbuhan 1.666,99% (yoy) yang dominan ditopang penerimaan denda administrasi cukai.
3. Secara nominal PNBPN di Lampung s.d. bulan Maret 2024 sebesar Rp432,84 miliar atau 42,62 persen dari target APBN 2024, meningkat secara *year-on-year* sebesar 39,51 persen. Komponen PNBPN Lainnya berkontribusi 53,08 persen dari total PNBPN dan terealisasi sebesar Rp229,77 miliar atau 54,95 persen dari target, utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada satker Perguruan Tinggi.
4. Proyeksi Penerimaan yang berasal dari Perpajakan dan PNBPN diperkirakan akan terus tumbuh dan melampaui target pada akhir tahun 2024 yakni mencapai 102,52 persen dari target APBN atau Rp11,18 triliun seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi.
5. Pada tahun 2024 alokasi Belanja Negara di Lampung sebesar Rp31.688,26 miliar, sedikit menurun 1,52 persen (yoy). Sampai dengan



- akhir 31 Maret 2024, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp7.626,33 miliar atau 24,07 persen dari pagu, dan mencatat pertumbuhan 7,27 persen (*yoy*).
6. Hingga 31 Maret 2024, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp2.399,63 miliar atau 25,45 persen dari pagu, tumbuh cukup tinggi 56,38 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Pegawai.
 7. Belanja Pegawai sebesar Rp1.058,54 miliar atau 26,49 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 42,50 persen (*yoy*), dipengaruhi oleh adanya kenaikan gaji pokok PNS dan Pensiunan pada tahun 2024. Belanja Barang yang merupakan komponen terbesar BPP mencatatkan realisasi Rp1.176,60 miliar atau 27,64 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 88,11 persen (*yoy*), dipengaruhi pelaksanaan pemilu pada Februari 2024. Belanja Modal secara nominal terealisasi Rp144,13 miliar, atau 12,66 persen dari pagu, tercatat mengalami penurunan secara tahunan sebesar 11,07 persen (*yoy*), seiring dengan penurunan alokasi pagu Belanja Modal di Tahun 2024 khususnya pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Sementara, Belanja Bantuan Sosial membukukan pertumbuhan yang signifikan yakni mencapai 397,35 persen (*yoy*), atau secara nominal terealisasi Rp20,35 miliar atau 55,21 persen dari pagu, didukung oleh adanya percepatan waktu penyaluran Bantuan Pendidikan Tinggi.
 8. Alokasi TKD pada tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp22.259,81 miliar, meningkat 3,11 persen (*yoy*). Sampai dengan 31 Maret 2024 secara nominal telah tersalurkan sebesar Rp5.226,71 miliar atau 23,48 persen dari pagu, tumbuh negatif 6,25 persen (*yoy*).
 9. Sampai dengan 31 Maret 2024, DTU telah tersalur sebesar Rp3.593,95 miliar atau 25,19 persen dari pagu, sedikit terkontraksi 0,80 persen (*yoy*), yang terdiri dari komponen DAU dan DBH. DAU yang telah disalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp3.520,37 miliar, atau 25,77 persen dari pagu, tercatat mengalami sedikit peningkatan yakni 0,31 persen (*yoy*).
- Sementara, DBH yang telah disalurkan sebesar Rp73,58 miliar, atau 12,21 persen, terkontraksi 34,98 persen (*yoy*).
10. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi DTK secara nominal mencapai Rp5,27 triliun dengan penyaluran sebesar 97,93 persen dari pagu, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, tercatat mengalami kontraksi 5,47 persen (*yoy*). Sampai dengan 31 Maret 2024, belum terdapat penyaluran DAK Fisik pada seluruh pemda di wilayah Provinsi Lampung. DAK Non Fisik di Provinsi Lampung yang telah tersalur sebesar Rp985,70 miliar atau 23,89 persen dari pagu, tercatat menurun secara tahunan sebesar 37,57 persen (*yoy*), dipengaruhi beberapa jenis DAK Non Fisik yang belum terdapat penyaluran.
 11. Alokasi Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2024 sebesar Rp147,69 miliar, yang seluruhnya merupakan Penghargaan atas kinerja tahun sebelumnya, tercatat menurun 42,30 persen (*yoy*). Sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi penyaluran Insentif Fiskal sebesar Rp10,66 miliar, atau 7,22 persen dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
 12. Pagu Dana Desa Tahun 2024 di Provinsi Lampung sebesar Rp2.266,86 miliar, menurun 1,60 persen (*yoy*), yang terdiri atas alokasi Dana Desa Reguler dan Dana Desa *Earmarked*. Sampai dengan 31 Maret 2024, Dana Desa yang telah tersalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp636,39 miliar, meningkat signifikan yakni 70,50 persen (*yoy*), yang dipengaruhi oleh *redesign* kebijakan penyaluran Dana Desa yang semula dilakukan tiga tahap menjadi dua tahap.
 13. Pada Triwulan II, Belanja Negara diproyeksikan terealisasi sebesar Rp7.595,74 miliar yang terdiri dari proyeksi BPP sebesar Rp5.304,23 miliar dan proyeksi TKD Rp2.291,51 miliar. Hingga akhir tahun 2024, dengan memperhitungkan realisasi pada Triwulan I, realisasi Belanja Negara proyeksikan sebesar Rp30.348,94 miliar atau 95,77 persen dari pagu.

14. APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp5.475,39 miliar, atau secara tahunan melebar 12,85 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Rasio defisit APBN terhadap PDRB triwulan I sebesar 4,88 persen. Rasio ini meningkat dari Triwulan I-2023 yang tercatat sebesar 4,60 persen, seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Negara.

5.1.2.2. Kinerja APBD

1. Realisasi pendapatan daerah Lampung sampai dengan triwulan I 2024 mencapai Rp3.892,98 miliar atau 12,07 persen dari target APBD, turun 29,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan dari PAD, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Meskipun Lain-lain Pendapatan yang Sah tumbuh 5,54 persen (yoy), kontribusinya hanya 0,06 persen, sehingga tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan total realisasi.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tercatat sebesar Rp560,36 miliar atau 6,90 persen dari target, tumbuh negatif 49,23 (yoy) persen. Kontraksi ini terjadi seiring dengan penurunan pada kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah (turun 51,35 persen, yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (turun 62,98 persen, yoy), dan Lain-lain PAD yang Sah (turun 61,04 persen, yoy). Pendapatan dari Retribusi Daerah tumbuh signifikan hingga 285,15 persen (yoy).
3. Rasionya PDRD terhadap PDRB Lampung Triwulan I-2024 masih rendah yaitu sebesar 0,40 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dioptimalkan.
4. Pendapatan daerah Lampung masih sangat bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat (TKD), yang menyumbang 69,60 persen dari total target pendapatan daerah dalam APBD 2024. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mencari pembiayaan alternatif

dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Meskipun kebijakan TKD bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal, perlu ada upaya mandiri dalam pengelolaan pendapatan.

5. Dalam hal tingkat kemandirian daerah, rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi dalam tingkat kemandirian antara daerah-daerah di Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan 35,18 persen. Ketergantungan terhadap TKD dapat mengindikasikan risiko ketidakmandirian keuangan daerah.
6. Sampai dengan 31 Maret 2024, Belanja Daerah regional Lampung telah terealisasi sebesar Rp3.804,51 miliar, nilai ini mencapai 11,76 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,29 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Realisasi Belanja Operasi mencapai Rp2.950,47 miliar atau 12,85 persen dari pagu, meningkat 11,46 persen (yoy). Kenaikan ini mencakup hampir semua komponen, kecuali Belanja Bunga yang turun 26,19 persen. Belanja Hibah melonjak 579,91 persen menjadi Rp130,15 miliar, terutama untuk persiapan Pilkada Serentak 2024.
8. Meskipun mengalami penurunan pagu, realisasi Belanja Modal Daerah di Lampung hingga 31 Maret 2024 menunjukkan kinerja positif, tumbuh 62,41 persen (yoy) mencapai Rp332,16 miliar atau 8,27 persen dari pagu 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan, serta Gedung dan Bangunan yang memberikan kontribusi terbesar. Namun, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset lainnya, serta Belanja Modal BLUD mengalami penurunan, bahkan beberapa belum terealisasi.
9. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp516,68 miliar atau 9,91 persen dari pagu, terkontraksi 7,90 persen (yoy). Realisasi didominasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa serta Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.



10. Berdasarkan fungsi, realisasi belanja tertinggi pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp3.347,05 miliar atau tercapai 14,86 persen dari pagu. Kondisi ini terkait cost sharing pendanaan Pilkada Serentak 2024.
11. Realisasi belanja daerah dan belanja modal per kapita bervariasi di Kabupaten/Kota di regional Lampung, Kota Metro memiliki rasio belanja tertinggi, sedangkan rasio belanja modal tertinggi dimiliki Kabupaten Pesisir Barat. Rasio belanja modal per kapita memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana alokasi belanja modal yang tepat dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
12. Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada Triwulan I-2024 23 menunjukkan angka positif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah bersifat kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Hal ini perlu diperhatikan agar pemerintah daerah lebih mampu meningkatkan belanja yang mendorong daya beli masyarakat, dengan tetap memastikan kapasitas keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal.
13. Pembiayaan netto naik signifikan 434,17 persen (yoy). Penerimaan pembiayaan tumbuh signifikan mencapai Rp179,44 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan turun 70,77 persen menjadi Rp12,41 miliar. Peningkatan penerimaan pembiayaan terutama berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5.1.2.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD

1. Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per Maret 2024 Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp2.711,64 miliar dan realisasi Belanja sebesar Rp7.210,55 miliar, sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp4.498,91 miliar. Dari sisi Pembiayaan terealisasi sebesar Rp167,03 miliar.
2. Realisasi pendapatan negara konsolidasian Triwulan I-2024 membukukan realisasi sebesar Rp2.711,64 miliar, terkontraksi 19,47 persen

(yoy) yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak konsolidasi yang termoderasi sebesar 21,47 persen (yoy). Realisasi belanja konsolidasian sebesar Rp7.210,55 miliar, tumbuh 18,59 persen (yoy), didominasi oleh pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat/Daerah.

3. Keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung per 31 Maret 2024 berada pada posisi defisit Rp4.498,91 miliar. Angka defisit ini melebar cukup besar yakni 65,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 yang defisit sebesar Rp2.713,15 miliar.

5.1.2.4. Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

1. Neraca Tingkat Wilayah per 31 Desember 2024 Provinsi Lampung membukukan total aset sebesar Rp79.110,41 miliar, meningkat 1,11 persen (yoy) yang sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan Aset Lancar dan Aset Lainnya. Total Kewajiban tercatat sebesar Rp375,28 miliar meningkat signifikan 162,23 persen (yoy) yang seluruhnya bersumber dari kelompok Kewajiban Jangka Pendek. Nilai kekayaan bersih pemerintah yang dicerminkan pada Ekuitas tercatat sebesar Rp78.735,13 miliar, tercatat menurun 0,81 persen seiring dengan peningkatan Kewajiban.
2. Sepanjang Tahun 2023, realisasi Belanja Modal di Provinsi Lampung mencapai Rp1.511,22 miliar. Rasio Belanja Modal terhadap Penambahan Aset Tetap pada tahun 2023 adalah sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Aset Tetap bruto selama tahun 2023 bukan hanya bersumber dari realisasi Belanja Modal pada tahun berkenaan.
3. Pada tahun 2023, PNPB Pengelolaan Aset ditargetkan mencapai Rp16,42 miliar. Sampai dengan akhir tahun, realisasi PNPB tahun 2023 mencapai Rp21,19 miliar. Pada 2024, target PNPB Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp20,20 miliar atau meningkat 22,99 persen (yoy). Sampai dengan 31 Maret 2024, PNPB Pengelolaan BMN telah terealisasi sebesar Rp6,6 miliar.

5.1.3. Profiling Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

1. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan omset, mengembangkan lini usaha, memperluas akses pembayaran, dan mendukung ekspor.
2. Pemberdayaan UMKM di KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung berfokus pada Usaha Mikro, dengan pertimbangan peran penting Kantor Vertikal DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi monitoring serta evaluasi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem UMKM di area pembiayaan tersebut dan memberikan dukungan yang lebih terarah bagi sektor usaha yang umumnya berasal dari keluarga prasejahtera.
3. Untuk memastikan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM lebih terarah, KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung melakukan *profiling* terhadap sejumlah UMKM. Berdasarkan hasil *profiling*, terdapat 10 UMKM yang terpilih untuk menerima program pemberdayaan intensif dari KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
4. Mayoritas UMKM binaan masih berada dalam kategori UMKM rintisan, sehingga area pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan KPPN dapat berperan dalam berbagai aspek seperti melengkapi aspek legalitas usaha dan meningkatkan pengetahuan dalam pembukuan transaksi usaha, meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran serta meningkatkan akses pembiayaan usaha dari lembaga formal.

5.1.4. Efektivitas Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

1. Beberapa capaian indikator pembangunan infrastruktur konektivitas menunjukkan tantangan bagi Provinsi Lampung. Pada 2023, Indeks Kemantapan Jalan di Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan antara jalan

provinsi, jalan kota, dan jalan kabupaten, dengan tren yang stagnan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, hingga tahun 2022, jumlah keberangkatan pesawat di Lampung juga berada di peringkat kedua terendah di regional Sumatera. Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) Lampung pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun masih di bawah rata-rata nasional dan regional Sumatera.

2. Meskipun dalam tiga tahun terakhir Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Infrastruktur Konektivitas meningkat, namun sumber daya tersebut belum cukup untuk meningkatkan capaian infrastruktur konektivitas di Provinsi Lampung. Misalnya pada infrastruktur jalan, pada tahun 2023, anggaran Pemerintah Provinsi untuk Jalan dan Jembatan sebesar Rp897,81 miliar yang digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan Jalan Provinsi hanya sanggup mengakomodasi sepanjang 641 km dari total 1.695,48 km panjang Jalan Provinsi Lampung.
3. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan konektivitas laut dan udara di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya fokus alokasi baik dari APBN dan APBD. Konektivitas laut dan udara sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, dengan pelabuhan dan bandara berperan vital dalam perdagangan, distribusi barang, dan transportasi penumpang.
4. Hasil Analisis Hubungan Belanja Pemerintah Pendukung Infrastruktur Fisik Jalan terhadap Indeks Kemantapan Jalan di Provinsi Lampung periode 2021 s.d. 2023 menemukan bahwa setiap peningkatan Rp1 miliar dalam belanja pemerintah terkait infrastruktur fisik jalan, dapat berkontribusi pada peningkatan sebesar 1,41 persen pada Kondisi Kemantapan Jalan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.
5. Tantangan lainnya dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Lampung meliputi

kompleksitas pelaksanaan kewenangan jalan antar tingkat pemerintahan yang mengurangi fleksibilitas dan koordinasi proyek, jeda waktu dalam pengalokasian anggaran yang menyebabkan efisiensi dan efektivitas proyek kurang optimal; proyek skala kecil juga menghadapi biaya tinggi terutama untuk sewa alat berat, dan penggunaan alat berat sering menyebabkan kerusakan jalan akses yang berulang, mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi makroekonomi, fiskal, dan pembangunan di Lampung pada Triwulan I 2024, dapat disampaikan beberapa policy responses sebagai berikut. Rekomendasi berikut utamanya guna memitigasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, UMKM, serta kondisi infrastruktur konektivitas.

1. Dukungan anggaran untuk dukungan produktivitas pertanian Lampung sangat diperlukan guna memitigasi penurunan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Alokasi anggaran dapat ditingkatkan untuk subsidi benih, permodalan KUR, asuransi usaha tani, dan pembiayaan melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk mengatasi pergeseran masa tanam/panen dan inflasi komoditas strategis.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengimplementasikan program integratif pembiayaan, pelatihan, dan manajemen risiko bagi pelaku pertanian terdampak perubahan iklim dan penurunan permintaan global. Pendekatan kolaboratif ini harus memberikan dukungan integratif bagi usaha pertanian, agroindustri, dan perikanan yang rentan.
3. Pemerintah dan OJK Lampung perlu mendorong penyaluran KUR Khusus berbasis klaster dan Kredit Usaha Alsintan. Fokus pembiayaan ini harus diarahkan ke daerah penghasil komoditas strategis Lampung seperti padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan PNPB melalui pengembangan potensi agrowisata di Lampung. Strategi ini diharapkan akan memitigasi risiko penurunan penerimaan negara akibat ketergantungan usaha terhadap permintaan global atas komoditas Lampung.
5. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Joint Program antara Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah. Fokusnya pada peningkatan kualitas SDM, pengawasan sumber pendapatan, asistensi perumusan tarif pajak, dan pengembangan teknologi informasi seperti platform pembayaran digital dan tapping box.
6. Pemerintah perlu menambah skema pembangunan infrastruktur kolaboratif antar kewenangan daerah. Misalnya seperti, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sebagai payung hukum untuk memfasilitasi koordinasi pembangunan lintas sektor dan kewenangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
7. Insentif Fiskal dengan Tema Infrastruktur Konektivitas penting diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam proyek infrastruktur sebelumnya dan bagi yang memiliki kapasitas fiskal rendah seperti Provinsi/Kota/Kabupaten di Lampung. Hal tersebut bertujuan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan menarik investasi swasta untuk pertumbuhan ekonomi regional.
8. Penambahan alokasi anggaran diperlukan untuk pembangunan fasilitas tambahan di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Selain itu, insentif pajak juga dapat diberikan kepada operator pelabuhan swasta yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk meningkatkan fasilitas logistik dan efisiensi operasional.
9. Peningkatan anggaran dan modernisasi Bandara Radin Inten II di Lampung diperlukan untuk memperbaiki konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Insentif pajak juga dapat diberikan kepada



- maskapai penerbangan yang membuka rute baru ke Lampung untuk meningkatkan konektivitas udara.
10. Peningkatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga, satuan kerja, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan anggaran. Petunjuk Teknis harus disampaikan secara antisipatif untuk memfasilitasi program kegiatan oleh Satker dan Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran.
 11. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung perlu terus diawasi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung perekonomian rakyat, antara lain dengan meningkatkan kualitas jalan, menjaga kepastian ketersediaan pupuk, dan memperkuat sistem pengairan atau irigasi.
 12. Lapangan usaha di bidang pertanian belum menunjukkan performa maksimal pada triwulan pertama karena bergesernya waktu tanam akibat El Nino. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan momentum masa panen pada triwulan kedua, khususnya produksi padi, untuk menekan angka inflasi.
 13. Perlunya meminimalisir Time Lag dalam Perencanaan dan Pengalokasian Dana Transfer Ke Daerah dengan mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengalokasian dana Transfer Ke Daerah, terutama untuk bidang infrastruktur. Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan memperkenalkan sistem perencanaan yang lebih responsif dan real-time, serta mengatur jadwal pembahasan Rencana Pembahasan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sawit yang lebih efisien sebelum tahun berjalan atau awal tahun anggaran.
 14. Peningkatan strategi pengelolaan beban jalan akses yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh alat berat selama proses konstruksi infrastruktur. Salah satu pendekatan adalah mempertimbangkan pembangunan jalan sementara atau menerapkan metode transportasi yang lebih ringan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap infrastruktur yang sudah ada.
 15. Alokasi anggaran dari APBN dan APBD perlu ditingkatkan secara sinergis untuk perbaikan serta perluasan jaringan jalan utama dan akses menuju jalan tol. Perbaikan juga harus dilakukan pada jaringan jalan provinsi yang menjadi rute utama kendaraan angkutan barang di regional Lampung.
 16. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi dalam pembangunan konektivitas darat, laut, dan udara di sekitar wilayah operasinya. Insentif ini bertujuan untuk mendorong investasi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara langsung.
 17. Perlu dipertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi di seluruh Lampung dan memberikan insentif pajak kepada penyedia layanan internet swasta untuk berinvestasi di daerah terpencil di luar wilayah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan sekitarnya.
 18. Pola pemberdayaan UMKM binaan KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat memprioritaskan sisi administratif pengembangan usaha seperti Surat Izin Usaha, Sertifikat Halal, dan NPWP. Setelah itu perlu pendampingan untuk pengembangan usaha seperti penatausahaan transaksi dengan pembukuan, pemanfaatan teknologi untuk penjualan, dan keikutsertaan dalam event atau bazar.
 19. KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat melakukan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM baik bersama Pemda maupun stakeholders lainnya seperti perbankan, instansi vertikal, dan asosiasi pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi SIKD, <https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi>

Aplikasi SINTESA, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Lampung dalam Angka 2023*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from <https://lampung.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Bank Indonesia.

Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan PNBK Kekayaan Negara di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2024). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). Laporan ALCo Regional Lampung. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

Kementerian Keuangan. (2022). KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2024). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan. (2024). *APBN Kita*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.



LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

KPBU

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.



KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

YoY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.





DJPb
Indonesian Treasury

Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214

Telepon : (0721) 471308 / (0721) 487423

Website : <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>

Email : kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

